

The cover features a background of a blue ocean with white-capped waves. On the left side, there is a large, stylized graphic element consisting of two overlapping, curved shapes in shades of blue and purple, resembling a stylized 'S' or a wave. The title 'LAPORAN KINERJA' is prominently displayed in the upper right quadrant in a large, bold, blue sans-serif font.

LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL
PENATAAN RUANG LAUT

TAHUN 2025

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Effin Martiana

Penyusun:

Bambang Prajoko

Muhammad Hikmat Jayawiguna

Muhajah Babny Muslim

Enny Syafrida Marpaung

Tri Setiyo Wisnu Wardoyo

Anugerah Satria Octoberta

Wahyu Setiawan

Aifia Miftafadilla

Kontributor:

Tim Teknis Tata Kelola Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut

KATA PENGANTAR

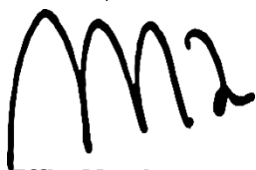
Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (Setditjen PRL) Tahun 2025. Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Setditjen PRL dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Laporan ini memberikan gambaran dan informasi terkait upaya dan langkah-langkah strategis Setditjen PRL pada Tahun 2025 dalam rangka melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi penyelenggaraan program dan kegiatan Setditjen PRL dan sekaligus sebagai bahan evaluasi perencanaan dan kebijakan Setditjen PRL.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi besar dalam pencapaian ini dan berharap menjadi salah satu pertimbangan oleh semua pihak untuk upaya perbaikan dan pengembangan kegiatan kedepan. Kami juga menyadari masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Setditjen PRL, karenanya kami mohon masukan dan kritik yang membangun demi perbaikan masa mendatang.

Jakarta, 23 Januari 2026



Effin Martiana

Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (Setditjen PRL) Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Program dan Kegiatan Setditjen PRL dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja Setditjen PRL Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Dalam perjanjian kinerja Sekretariat Ditjen PRL terdapat 21 Indikator Kinerja yang termasuk dalam sasaran kegiatan Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut. Pengukuran kinerja dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja, yaitu <https://www.kinerjaku.kkp.go.id> dan diperoleh Nilai Capaian Kinerja. Nilai Capaian Kinerja Sekretariat Ditjen PRL Tahun 2025 sebesar 109,71 (termasuk kriteria Baik).

Pada Tahun 2025 terdapat 21 indikator kinerja dengan target dan capaian sebagai yaitu 1). Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL tercapai 88,94 dari target 66, 2). Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Setditjen PRL tercapai 72,85 dari target 66, 3). Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NPKA) DJPRL tercapai 87,09 dari target 81,5, 4). Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL tercapai 84,18 dari target 89, 5). Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja DJPRL tercapai 96,72 dari target 80, 6). Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen PRL tercapai 100 dari target 80, 7). Nilai maturitas struktur dan proses SPIP DJPRL tercapai 3,806 dari target 3,5, 8). Laporan SPIP Setditjen PRL yang disusun tercapai 2 dari target 2, 9). Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPRL tercapai 0,076 dari target 0,5, 10). Indeks profesionalitas ASN DJPRL tercapai 84,13 dari target 80, 11). Indeks profesionalitas ASN Setditjen PRL tercapai 85,23 dari target 80, 12). Persentase pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi yang diselesaikan sesuai ketentuan tercapai 100 dari target 100, 13). Tingkat kepatuhan pengelolaan data DJPRL tercapai 100 dari target 91, 14). Persentase Dokumen Pengelolaan Data Penataan Ruang Laut yang Dihasilkan tercapai 100 dari target 100, 15). Persentase Dokumen Kerja Sama yang Disepakati tercapai 100 dari target 90, 16). Persentase Pemenuhan Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar

Negeri yang Disusun tercapai 100 dari target 90, 17). Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik tercapai 100 dari target 100, 18). Nilai keterbukaan informasi publik DJPRL tercapai 100 dari target 91, 19). Persentase Penyelesaian Instrumen Hukum Penataan Ruang Laut tercapai 100 dari target 100, 20). Nilai pengawasan kearsipan internal DJPRL tercapai 92,81 dari target 70, 21). Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP DJPRL tercapai 100 dari target 76.

Alokasi anggaran yang tersedia untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025 sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2025 yang ditandatangani tanggal 2 Juni 2025 adalah sebesar Rp4.534.770.000 dan terdapat adanya blokir anggaran sebesar Rp470.927.000, sehingga pagu efektif yang dapat digunakan adalah sebesar Rp4.063.843.000 yang bersumber dari rupiah murni, namun demikian pada tanggal 2 Desember 2025 terjadi perubahan perjanjian kinerja yang disebabkan adanya penambahan pagu anggaran sebesar Rp366.910.00 dari pergeseran alokasi anggaran, sehingga total pagu anggaran sebesar Rp4.901.680.000 dengan blokir anggaran sebesar Rp72.610.000, sehingga pagu efektif yang dapat digunakan sebesar Rp4.829.070.000, alokasi anggaran tersebut tercantum pada DIPA Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dengan kode satuan kerja 622145 yang digunakan oleh 2 unit organisasi yaitu Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, dikarenakan sebelumnya merupakan 1 unit organisasi. Adapun realisasi anggaran hingga akhir periode tahun 2025 adalah sebesar Rp4.739.851.328 dengan persentase sebesar 96,70 % dari total pagu anggaran atau 98,15% dari pagu anggaran efektif.

Terdapat kendala dalam pelaksanaan kinerja pada Tahun 2025 yakni keterbatasan SDM yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan. Sebagai upaya peningkatan kinerja Setditjen PRL ke depan, sedang dilakukan Analisis Beban Kerja untuk memetakan kembali kebutuhan pegawai di lingkup Setditjen PRL.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 TUJUAN	2
1.3 ISU STRATEGIS	2
1.4 TUGAS DAN FUNGSI	3
1.4 SUMBER DAYA MANUSIA SETDITJEN PRL	3
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN.....	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	5
2.1 RANCANGAN RENSTRA DJPRL 2025-2029.....	5
2.2 PERJANJIAN KINERJA SETDITJEN PRL TAHUN 2025.....	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	10
3.1 SK 1. TERWUJUDNYA LAYANAN DUKUNGAN MANAJERIAL YANG BAIK LINGKUP DITJEN PENATAAN RUANG LAUT..	12
IK 1. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL	12
IK 2. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Setditjen PRL	19
IK 3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DJPRL.....	25
IK 4. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL	31
IK 5. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja DJPRL.....	37
IK 6. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen PRL	41
IK 7. Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP DJPRL	46
IK 8. Laporan SPIP Setditjen PRL yang Disusun.....	50
IK 9. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPRL	53
IK 10. Indeks Profesionalitas ASN DJPRL.....	57
IK 11. Indeks Profesionalitas ASN Setditjen PRL	65
IK 12. Persentase Pemenuhan Dokumen Reformasi Birokrasi yang Diselesaikan sesuai Ketentuan	71
IK 13. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data DJPRL	75

IK 14. Persentase Dokumen Pengelolaan Data Penataan Ruang Laut yang Dihasilkan	81
IK 15. Presentase Dokumen Kerja Sama yang Disepakati	84
IK 16. Persentase Pemenuhan Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri yang Disusun	89
IK 17. Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik.....	94
IK 18. Nilai Keterbukaan Informasi Publik DJPRL.....	99
IK 19. Persentase Penyelesaian Instrumen Hukum Penataan Ruang Laut	106
IK 20. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal DJPRL.....	111
IK 21. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP DJPRL.....	118
3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	123
BAB IV PENUTUP.....	126
4.1 KESIMPULAN	126
4.2 REKOMENDASI	127
4.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI PERIODE SEBELUMNYA.....	128
LAMPIRAN.....	129
LAMPIRAN 1. PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT TAHUN 2025 (AWAL)	129
LAMPIRAN 2. PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT TAHUN 2025 (REVISI).....	133
LAMPIRAN 3. DAFTAR KERTAS POSISI TAHUN 2025	137

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 KOMPONEN PENGELOLAAN KINERJA.....	1
GAMBAR 2 TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL	3
GAMBAR 3 INDIKATOR KINERJA SETDITJEN PRL TAHUN 2025-2029 ...	7
GAMBAR 4 INDIKATOR DAN TARGET KINERJA SETDITJEN PRL TAHUN 2025.....	8
GAMBAR 5 NILAI CAPAIAN KINERJA SETDITJEN PENATAAN RUANG LAUT TAHUN 2025	10
GAMBAR 6 SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA SETDITJEN PRL TAHUN 2025	11
GAMBAR 7 KATEGORI NILAI PM SAKIP.....	13
GAMBAR 8 RINCIAN HASIL PENILAIAN MANDIRI SAKIP DJPRL TAHUN 2025.....	14
GAMBAR 9 PERBANDINGAN NILAI AKIP DJPKRL TAHUN 2024 DAN TAHUN 2025	15
GAMBAR 10 NILAI PM SAKIP UNIT ESELON I LINGKUP KKP TAHUN 2025.....	16
GAMBAR 11 PEMBAHASAN RENSTRA DJPRL 2025-2029	18
GAMBAR 12 PENGUKURAN DAN VERIFIKASI DATA CAPAIAN KINERJA	19
GAMBAR 13 RINCIAN HASIL PENILAIAN MANDIRI SAKIP SETDITJEN PRL TAHUN 2025.....	22
GAMBAR 14 NILAI PM SAKIP UNIT ESELON II LINGKUP DJPRL TAHUN 2025.....	23
GAMBAR 15 EVALUASI AKIP DAN EVALUASI RENCANA AKSI	25
GAMBAR 16 NKPA UNIT ESELON I LINGKUP KKP TAHUN 2025.....	29
GAMBAR 17 APLIKASI MONEV KEMENKEU	30
GAMBAR 18 IKPA UNIT ESELON I LINGKUP KKP TAHUN 2025	35
GAMBAR 19 APLIKASI OM SPAN KEMENKEU.....	35
GAMBAR 20 PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA UNIT ESELON I LINGKUP KKP TAHUN 2025.....	39
GAMBAR 21 APLIKASI SIDAK	40
GAMBAR 22 PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA UNIT ESELON II LINGKUP DJPRL TAHUN 2025.....	44
GAMBAR 23 TINGKATAN MATURITAS SPIP.....	46

GAMBAR 24 NILAI MATURITAS STRUKTUR DAN PROSES SPIP UNIT ESELON I LINGKUP KKP TAHUN 2025.....	48
GAMBAR 25 LAPORAN SPIP YANG DISUSUN UNIT ESELON II LINGKUP DJPRL TAHUN 2025	51
GAMBAR 26 BATAS TERTINGGI NILAI TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI ATAS LK UNIT ESELON I LINGKUP KKP TAHUN 2025	55
GAMBAR 27 . INDEKS PROFESIONALITAS ASN UNIT ESELON I LINGKUP KKP TAHUN 2025	61
GAMBAR 28 PORTAL IP ASN KKP.....	62
GAMBAR 29 E MILEA KKP	62
GAMBAR 30 BIMBINGAN TEKNIS TNA (TRAINING NEED ANALYSIS) TAHUN 2025	64
GAMBAR 31 IP ASN SETDITJEN PRL TAHUN 2025.....	67
GAMBAR 32 IP ASN UNIT ESELON II LINGKUP DJPRL TAHUN 2025....	68
GAMBAR 33 BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2025	70
GAMBAR 34 RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN OCEAN SATELLITE ACCOUNTS (OSA) DAN RAPAT PEMBAHASAN PENERBITAN PKKPRL OTOMATIS PASCA BAYAR	75
GAMBAR 35 IDENTIFIKASI LAPANGAN RENCANA PENGGELARAN SKKL BTI CABLE SYSTEM DAN IDENTIFIKASI LAPANGAN RENCANA PENGGELARAN LITUP NETWORK	75
GAMBAR 36 TINGKAT KEPATUHAN PENGELOLAAN DATA UNIT ESELON I LINGKUP KKP TAHUN 2025.....	78
GAMBAR 37 KEGIATAN KOORDINASI PENJAMINAN KULITAS IGT MATERI TEKNIS PERAIRAN PESISIR PADA RTRWP	84
GAMBAR 38 IDENTIFIKASI DATA UTAMA LINGKUP DJPRL DAN PEMBAHASAN OMS LAUTRA	84
GAMBAR 39 PENANDATANGANAN PKS ANTARA DITJEN PRL DENGAN YAYASAN WWF INDONESIA DAN PT. DANAREKSA (PERSERO) ..	89
GAMBAR 40 PENANDATANGANAN PKS ANTARA DITJEN PRL DENGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN DAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.....	89
GAMBAR 41 PERTEMUAN THE 5TH APEC OCEAN-RELATED MINISTERIAL MEETING (AOMM-5) DI BUSAN, KOREA SELATAN..	93
GAMBAR 42 PERTEMUAN BBNJ AGREEMENT PREPARATORY COMMISSION 2, DI NEW YORK, AMERIKA SERIKAT, 18-29 AGUSTUS 2025.....	94

GAMBAR 43 PERTEMUAN THE 20TH SENIOR OFFICIAL MEETING CTI CFF DI BALI, INDONESIA	94
GAMBAR 44 KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK DITJEN PRL TAHUN 2025	99
GAMBAR 45 NILAI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK UNIT ESELON I LINGKUP KKP TAHUN 2025	103
GAMBAR 46 LAMAN PPID DITJEN PRL.....	105
GAMBAR 47 MAKLUMAT PELAYANAN.....	105
GAMBAR 48 NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL UNIT ESELON I LINGKUP KKP TAHUN 2025.....	115
GAMBAR 49 PEMUSNAHAN ARSIP	117
GAMBAR 50 PEMBERKASAN ARSIP DAN SOSIALISASI KEARSIPAN.....	117
GAMBAR 51 PERSENTASE RENCANA UMUM PENGADAAN PBJ YANG DIUMUMKAN PADA SIRUP UNIT ESELON I LINGKUP KKP TAHUN 2025.....	120
GAMBAR 52 APLIKASI SIRUP	121
GAMBAR 53 MONITORING RUP PBJ	123

DAFTAR TABEL

TABEL 1 KOMPOSISI PEGAWAI DI SETDITJEN PRL.....	4
TABEL 2 CAPAIAN IK NILAI PM SAKIP DJPRL	14
TABEL 3 KATEGORI NILAI PM SAKIP	20
TABEL 4 CAPAIAN IK NILAI PM SAKIP SETDITJEN PRL	21
TABEL 5 BOBOT INDIKATOR KINERJA ANGGARAN TINGKAT UNIT ESELON I	26
TABEL 6 CAPAIAN IK NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN (NKPA) DJPRL	28
TABEL 7 URAIAN DAN BOBOT INDIKATOR IKPA	32
TABEL 8 CAPAIAN IK NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) DJPRL.....	32
TABEL 9 NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) DJPKRL TAHUN 2025	33
TABEL 10 TABEL CAPAIAN IKPA DJPKRL TAHUN 2024 DAN 2025	34
TABEL 11 CAPAIAN IK PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA DJPRL	37
TABEL 12 REKAPITULASI JUMLAH REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN TAHUN 2025 PADA DJPRL	38
TABEL 13 CAPAIAN IK PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA SETDITJEN PRL.....	42
TABEL 14 REKAPITULASI JUMLAH REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN TAHUN 2025 PADA SETDITJEN PRL.....	42
TABEL 15 CAPAIAN IK NILAI MATURITAS STRUKTUR DAN PROSES SPIP DJPRL	47
TABEL 16 CAPAIAN IK LAPORAN SPIP SETDITJEN PRL YANG DISUSUN.....	50
TABEL 17 CAPAIAN IK BATAS TERTINGGI NILAI TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI ATAS LK DJPRL PADA TAHUN 2025	53
TABEL 18 TEMUAN LHP BPK TAHUN 2024 DAN 2025 DJPKRL	54
TABEL 19 CAPAIAN IK INDEKS PROFESIONALITAS ASN LINGKUP DJPRL	59
TABEL 20 NILAI IP ASN DJPRL TAHUN 2025	59
TABEL 21 CAPAIAN IK INDEKS PROFESIONALITAS ASN SETDITJEN PRL.....	66

TABEL 22 NILAI IP ASN SETDITJEN PRL TAHUN 2025	66
TABEL 23 CAPAIAN IK PERSENTASE PEMENUHAN DOKUMEN REFORMASI BIROKRASI YANG DISELESAIKAN SESUAI KETENTUAN	72
TABEL 24 TARGET CAPAIAN DATA GEOSPASIAL LINGKUP DJPRL TAHUN 2025	76
TABEL 25 CAPAIAN IK TINGKAT KEPATUHAN PENGELOLAAN DATA DJPRL	77
TABEL 26 CAPAIAN IK PERSENTASE DOKUMEN PENGELOLAAN DATA PENATAAN RUANG LAUT YANG DIHASILKAN.....	81
TABEL 27 CAPAIAN IK PRESENTASE DOKUMEN KERJA SAMA YANG DISEPAKATI.....	86
TABEL 28 CAPAIAN IK PERSENTASE PEMENUHAN KERTAS POSISI DALAM PERTEMUAN KERJA SAMA LUAR NEGERI YANG DISUSUN	90
TABEL 30 CAPAIAN IK PERSENTASE PEMENUHAN DOKUMEN PELAYANAN PUBLIK PADA TAHUN 2025	95
TABEL 31 CAPAIAN IK NILAI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DJPRL	102
TABEL 32 CAPAIAN IK PERSENTASE PENYELESAIAN INSTRUMEN HUKUM PENATAAN RUANG LAUT.....	106
TABEL 33 CAPAIAN IK NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL DJPRL	113
TABEL 34 HASIL PENILAIAN KEARSIPAN INTERNAL	114
TABEL 35 CAPAIAN IK PERSENTASE RENCANA UMUM PENGADAAN PBJ YANG DIUMUMKAN PADA SIRUP DJPRL.....	119
TABEL 36 RINCIAN REALISASI ANGGARAN SETDITJEN PRL TAHUN 2025.....	124
TABEL 37 TINDAK LANJUT REKOMENDASI PERIODE SEBELUMNYA	128

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, disebutkan bahwa pengelolaan kinerja merupakan rangkaian kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Adapun komponen pengelolaan kinerja meliputi:



Gambar 1 Komponen Pengelolaan Kinerja

Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut ([DJPRL](#)) sampai dengan level di bawahnya, termasuk Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (Setditjen PRL) turut dalam pengelolaan kinerja lingkup DJPRL. Pelaporan Kinerja merupakan salah satu komponen pengelolaan kinerja sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pelaporan kinerja terdiri atas laporan kinerja interim (setiap triwulan) dan laporan kineja

tahunan. Laporan Kinerja Setditjen PRL Triwulan 1 Tahun 2025 ini menjelaskan secara komprehensif tentang capaian kinerja organisasi Setditjen PRL sampai dengan triwulan pertama tahun 2025. Laporan Kinerja ini memuat capaian, perbandingan, analisis keberhasilan, kendala, solusi, efisiensi, kegiatan pendukung serta rencana tindak lanjut masing - masing indikator kinerja Setditjen PRL tahun 2025.

1.2 TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 adalah untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025.

1.3 ISU STRATEGIS

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 menekankan pada pertumbuhan berkelanjutan, penurunan kemiskinan dan sumber daya manusia berkualitas yang akan dilaksanakan di seluruh wilayah dan dipantau secara berkala.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025, terbentuknya DJPRL sebagai unit kerja baru membawa implikasi pada penyusunan kembali indikator kinerja dan peralihan tugas pokok dan fungsi dari unit sebelumnya. Hal ini menjadi tantangan dalam memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah berjalan, serta harmonisasi kebijakan antar unit kerja.

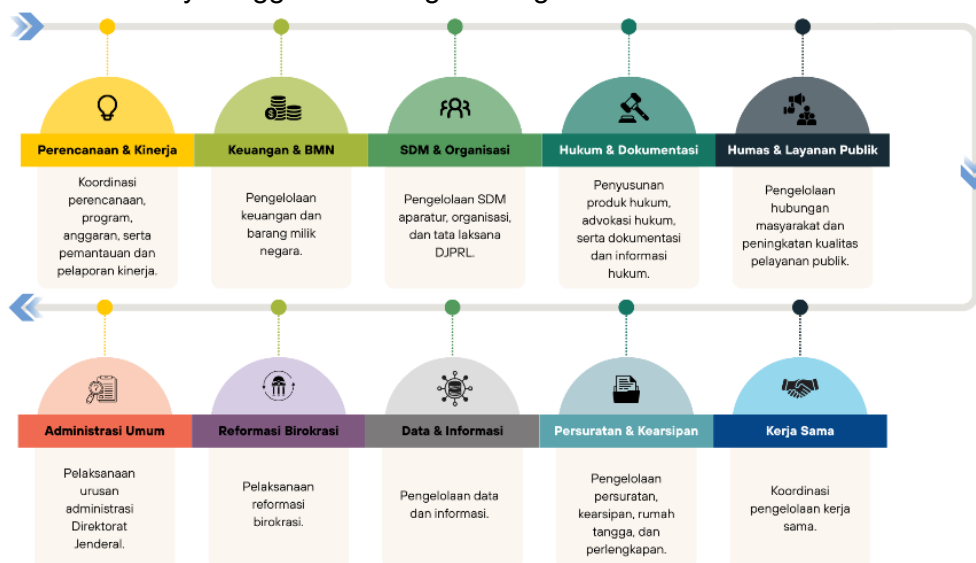
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dituangkan tentang peran strategis Ditjen PRL yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang laut. Setditjen PRL berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan DJPRL guna mewujudkan Reformasi Birokrasi (RB). Sebagaimana Surat Edaran Menteri PANRB No. 6/2025 tentang Penerapan Reformasi Birokrasi Pada Periode Transisi Tahun 2025 sebagai panduan pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) sementara hingga ditetapkannya dua dokumen utama, yaitu Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025–2045 dan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional (RMRBN) 2025–2029.

Reformasi Birokrasi bertujuan mewujudkan birokrasi kelas dunia yang kolaboratif, kapabel, dan berintegritas melalui pendekatan human-based governance dan digital governance, berfokus pada RB General (fondasi) dan

RB Tematik (pengentasan kemiskinan, investasi, hilirisasi, layanan dasar) untuk mendukung tujuan nasional Indonesia Emas 2045.

1.4 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi lingkup direktorat jenderal. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:



Gambar 2 Tugas dan Fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal

Susunan organisasi Setditjen PRL terdiri atas bagian umum, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan umum pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut. Bagian Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

1.4 SUMBER DAYA MANUSIA SETDITJEN PRL

Unit Kerja Setditjen PRL terdiri dari Kepala Bagian Umum dan para Ketua Tim Kerja serta Staf Pelaksana. Jumlah pegawai di lingkup Setditjen PRL adalah 50 orang yang terdiri dari 39 ASN dan 11 PJLP.

Tabel 1 Komposisi Pegawai di Setditjen PRL

No	Unit Kerja	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Sekretaris Ditjen PRL		1	1
2	Tim Kerja Dukungan Manajemen	9	5	14
3	Tim Kerja Program	3	2	5
	Tim Kerja Keuangan	6	2	8
4	Tim Kerja SDM	1	5	6
5	Tim Kerja Hukum dan Advokasi	2	2	4
6	Tim Kerja Kerja Sama dan Data	3	3	6
7	Tim Kerja Hubungan Masyarakat	2	5	6
	Jumlah	25	25	50

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

a. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan latar belakang pengelolaan kinerja, tujuan penyusunan laporan kinerja, permasalahan utama (*strategic issue*) dalam Pengelolaan Kelautan dan laut, tugas dan fungsi organisasi dalam menjawab isu permasalahan utama, dan sistematika penyusunan laporan.

b. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menguraikan rencana strategis, gambaran singkat mengenai sasaran kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut pada tahun 205-2029, rencana kerja dan anggaran Tahun 2025, dan penetapan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut.

c. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisa capaian kinerja.

d. Bab IV Penutup

Pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rancangan Renstra DJPRL 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) 2025-2029 mengacu pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang didalamnya telah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 karena menjadi periode awal dari RPJPN 2025-2045 dalam memulai agenda pembangunan kelautan dan perikanan jangka panjang.

Visi Presiden dan Wakil Presiden untuk tahun 2025-2029, yang termuat dalam RPJMN 2025-2029, adalah "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045." Sejalan dengan visi nasional tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai institusi yang membantu Presiden dalam bidang kelautan dan perikanan, juga memiliki visinya sendiri untuk periode 2025-2029. Visi KKP 2025-2029 adalah "Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045." Visi ini kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan pembangunan kelautan dan perikanan yang meliputi:

- 1) Meningkatnya kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan serta terwujudnya wilayah pesisir dan laut yang adaptif terhadap perubahan iklim dan bencana;
- 2) Meningkatnya produktivitas sektor kelautan dan perikanan yang didukung dengan pengawasan yang tangguh dan efektif;
- 3) Meningkatnya daya saing dan mutu hasil produk kelautan dan perikanan;
- 4) Meningkatnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan; dan
- 5) Birokrasi yang efektif dan efisien yang berorientasi pada kualitas pelayanan publik.

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi

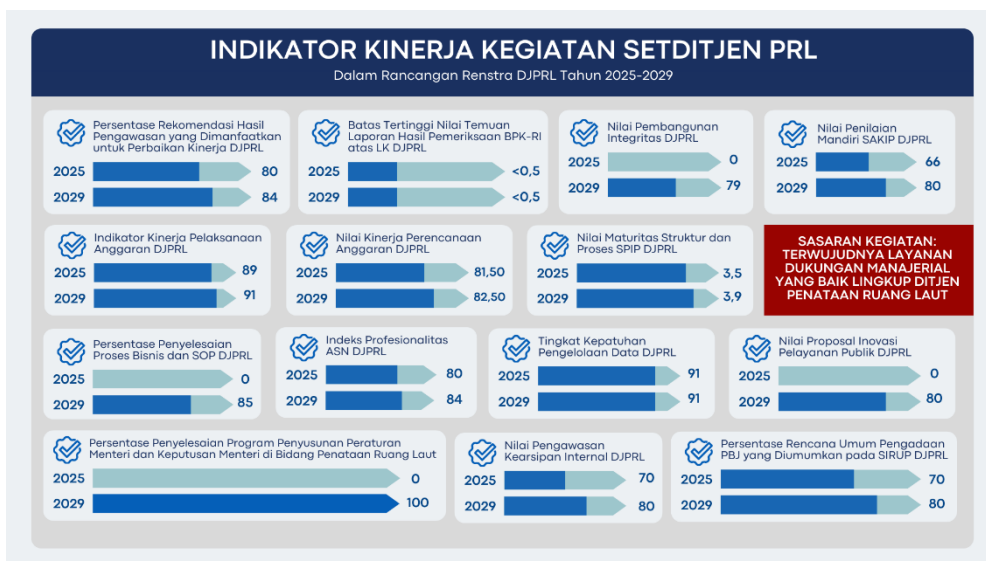
yang diinginkan serta dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu hasil dan dampak dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis (SS) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029, terdiri dari:

- 1) SS-1 Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi Serta Terwujudnya Ketahanan Wilayah Pesisir dan Laut;
- 2) SS-2 Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan;
- 3) SS-3 Meningkatnya Nilai Tambah dan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan;
- 4) SS-4 Meningkatnya SDM Kelautan dan Perikanan yang Kompeten; dan
- 5) SS-5 Meningkatnya Reformasi Birokrasi KKP yang Berkualitas.

DJPRL berkontribusi pada SS-2 “Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan” yang akan dicapai dengan salah satu indikator kinerja yang merupakan tuisi DJPRL yakni “persentase penyelenggaraan penataan ruang laut dan zonasi pesisir” dan SS-5 “Meningkatnya Reformasi Birokrasi KKP yang Berkualitas”. SS-5 tersebut juga turun ke dalam SP DJPRL yakni “Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Ditjen Penataan Ruang Laut” yang didukung oleh indikator kinerja “Nilai Implementasi Reformasi dan Birokrasi lingkup Ditjen PRL”. Indikator tersebut akan diampu oleh Sekretariat Direktorat Jenderal sebagai unit organisasi level dua yang melaksanakan tugas pelayanan teknis dan pelaksanaan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut. Selain berwenang terhadap Indikator Kinerja tersebut, Setditjen PRL juga mendukung kinerja mandatory lingkup KKP yang meliputi:

- 1) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja
- 2) Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK-RI
- 3) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP
- 4) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
- 5) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)
- 6) Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP
- 7) Indeks Profesionalitas ASN
- 8) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data
- 9) Nilai Pengawasan Kearsipan Internal
- 10) Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP.

Seluruh indikator tersebut telah tertuang pada Indikator Kinerja Setditjen PRL Tahun 2025-2029 dalam Renstra DJPRL Tahun 2025-2029 sebagai berikut



Gambar 3 Indikator Kinerja Setditjen PRL Tahun 2025-2029

Seluruh indikator kinerja (IK) ini merupakan indikator kinerja baru yang dirumuskan dalam rangka mendukung tujuan utama DJPRL sebagai unit kerja baru yang memiliki peralihan tugas pokok dan fungsi dari unit kerja sebelumnya (DJPRL). Oleh karena itu, terdapat beberapa IK yang tidak memiliki target pada tahun 2025 karena penyesuaian DJPRL sebagai unit kerja baru yakni

- 1) IK Nilai Pembangunan Integritas DJPRL tidak terdapat target pada tahun 2025 karena pada LKE Nilai Pembangunan Integritas terdapat poin perhitungan tertinggi yaitu Nilai WBK dari lingkup unit kerjanya yang telah memperoleh WBK atau WBBM. Sedangkan pada tahun 2025 per April Ditjen PRL belum memiliki UPT sehingga kemungkinan besar targetnya tidak akan tercapai. Selain itu, Direktorat (unit kerja pusat) sampai dengan sekarang masih dalam tahap membangun.
- 2) IK Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP DJPRL belum dapat dilaksanakan pada tahun 2025 karena proses perubahan Tata Kerja dan Nomenklatur Ditjen PRL sebagai unit kerja yang baru.
- 3) IK Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik DJPRL karena syarat utama inovasi pelayanan publik salah satunya adalah usia inovasi 2 tahun. Ditjen PRL memiliki beberapa inovasi namun semua usianya masih di bawah 2 tahun, sehingga proposal inovasinya tidak dapat dilakukan penilaian di tingkat KKP

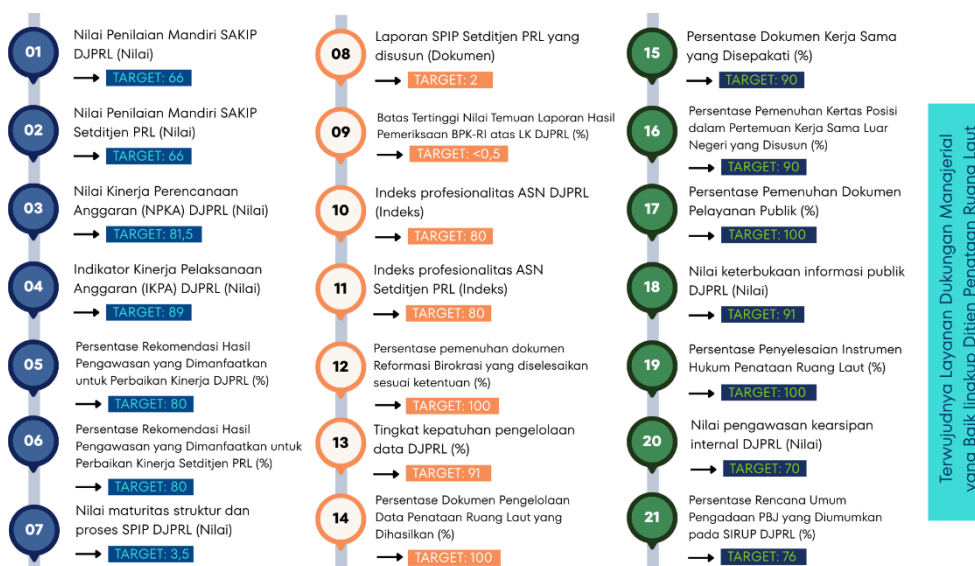
- 4) IK Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri (Progsun) di Bidang Penataan Ruang Laut karena pada tahun 2025 Ditjen Penataan Ruang Laut merupakan organisasi baru dan belum mengusulkan Peraturan/Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. Pengusulan progsun tersebut dilaksanakan pada T-1.

2.2 Perjanjian Kinerja Setditjen PRL Tahun 2025

Penetapan kinerja tahun 2025 menggunakan penekanan pada tiga perspektif yang saling berimbang dan di“cascading” (diturunkan) sampai level staf/individu (pegawai). Dokumen kinerja tersebut kemudian diimplementasikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025. Penentuan IK pada PK 2025 sesuai dengan IK yang tercantum dalam Renstra 2025-2029 dan tambahan IK yang disesuaikan untuk mendukung kinerja pelayanan teknis dan pelaksanaan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada DJPRL, diluar mandatory yang ditetapkan oleh KKP yaitu:

1. Laporan SPIP yang disusun lingkup Setditjen PRL
2. Nilai Keterbukaan Informasi Publik DJPRL
3. Presentase Pelaksanaan Kerjasama bidang Penataan Ruang Laut
4. Persentase Pemenuhan Dokumen Reformasi Birokrasi yang Diselesaikan sesuai Ketentuan.

Adapun IK yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Setditjen PRL tertera pada Gambar berikut.



Gambar 4 Indikator dan Target Kinerja Setditjen PRL Tahun 2025

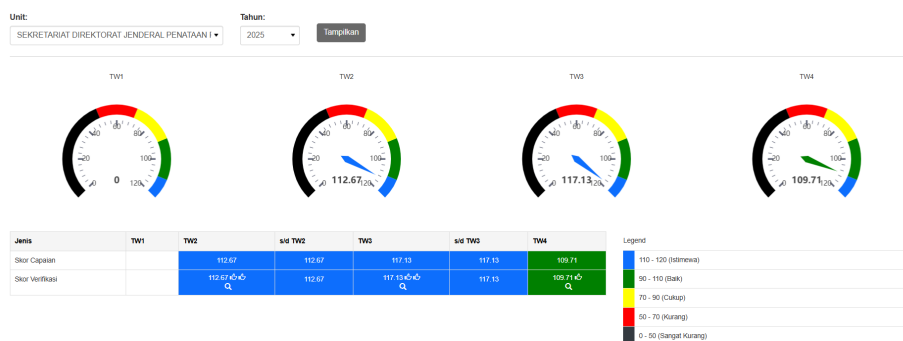
Mayoritas IK tersebut merupakan IK baru setelah terbentuknya DJPRL sebagai unit kerja baru. Namun, terdapat IK yang nilai dan perhitungannya menggunakan IK unit kerja lama (DJPRL) karena komponen penilaiannya masih terkait dengan DJPRL seperti DIPA dan berbagai dokumen kinerja. Adapun IK tersebut yakni

- 1) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL;
- 2) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Setditjen PRL;
- 3) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NPKA) DJPRL;
- 4) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL;
- 5) Nilai pengawasan kearsipan internal DJPRL;
- 6) Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP DJPRL.

Alokasi anggaran yang tersedia untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025 sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2025 yang ditandatangani tanggal 2 Juni 2025 adalah sebesar Rp4.534.770.000 dan terdapat adanya blokir anggaran sebesar Rp470.927.000, sehingga pagu efektif yang dapat digunakan adalah sebesar Rp4.063.843.000 yang bersumber dari rupiah murni, namun demikian pada tanggal 2 Desember 2025 terjadi perubahan perjanjian kinerja yang disebabkan adanya penambahan pagu anggaran sebesar Rp366.910.00 dari pergeseran alokasi anggaran, sehingga total pagu anggaran sebesar Rp4.901.680.000 dengan blokir anggaran sebesar Rp72.610.000, sehingga pagu efektif yang dapat digunakan sebesar Rp4.829.070.000, alokasi anggaran tersebut tercantum pada DIPA Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dengan kode satuan kerja 622145 yang digunakan oleh 2 unit organisasi yaitu Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, dikarenakan sebelumnya merupakan 1 unit organisasi.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Setditjen PRL Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Dalam perjanjian kinerja Sekretariat Ditjen PRL terdapat 21 Indikator Kinerja yang termasuk dalam sasaran kegiatan Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut. Pengukuran kinerja dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja, yaitu <https://www.kinerjaku.kkp.go.id> dan diperoleh Nilai Capaian Kinerja. Nilai Capaian Kinerja Sekretariat Ditjen PRL Tahun 2025 sebesar 109,71 (termasuk kriteria Baik).



Sumber: www.kinerjaku.kkp.go.id

Gambar 5 Nilai Capaian Kinerja Setditjen Penataan Ruang Laut Tahun 2025

Pada Tahun 2025 terdapat 21 indikator kinerja yang memiliki target dan capaian. Secara rinci, capaian masing-masing indikator kinerja Setditjen PRL Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA SETDITJEN PRL TAHUN 2025

Sasaran Kegiatan; Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut



Gambar 6 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Setditjen PRL Tahun 2025

3.1 SK 1. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut

Dalam upaya mencapai Sasaran Kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PRL, capaian kinerja diukur berdasarkan Indikator Kinerja: 1) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL; 2) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Setditjen PRL; 3) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NPKA) DJPRL; 4) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL; 5) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja DJPRL; 6) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen PRL; 7) Nilai maturitas struktur dan proses SPIP DJPRL; 8) Laporan SPIP Setditjen PRL yang disusun; 9) Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPRL; 10) Indeks profesionalitas ASN DJPRL; 11) Indeks profesionalitas ASN Setditjen PRL; 12) Persentase pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi yang diselesaikan sesuai ketentuan; 13) Tingkat kepatuhan pengelolaan data DJPRL; 14) Persentase Dokumen Pengelolaan Data Penataan Ruang Laut yang Dihasilkan; 15) Persentase Dokumen Kerja Sama yang Disepakati; 16) Persentase Pemenuhan Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri yang Disusun; 17) Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik; 18) Nilai keterbukaan informasi publik DJPRL; 19) Persentase Penyelesaian Instrumen Hukum Penataan Ruang Laut; 20) Nilai pengawasan kearsipan internal DJPRL; dan 21) Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP DJPRL.

IK 1. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat Jenderal telah melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja di DJPRL setiap tahunnya. Pada tahun 2021 Pelaksanaan evaluasi ini

berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 dan telah diperbaru melalui Permen RB 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Impelementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada peraturan ini, evaluasi SAKIP yang baru mencakup komponen perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi internal (25%). Pada setiap komponen terdiri dari 3 sub-komponen, yaitu sub-komponen keberadaan (20%), kualitas (30%), dan pemanfaatan (50%).

Tujuan evaluasi adalah menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta saran perbaikan yang diperlukan. Perhitungan capaian untuk indikator kinerja ini adalah berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang sudah dituangkan pada aplikasi kinerjajaku pada menu Evaluasi > LKE).

Nilai PM SAKIP DJPRL adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Inspektorat III, Inspektorat Jenderal KKP. Kategori nilai PM SAKIP yaitu:



Gambar 7 Kategori Nilai PM SAKIP

Indikator ini diperoleh dari Penilaian Mandiri SAKIP DJPKRL sebagai unit kerja lama dari DJPRL. Capaian IK pada Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

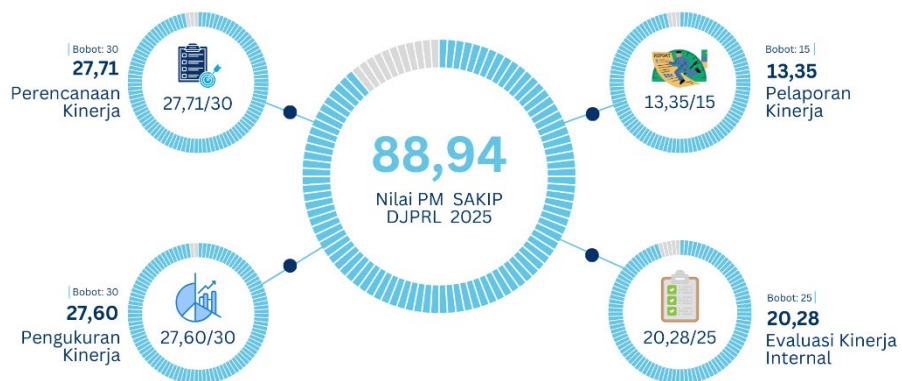
\

Tabel 2 Capaian IK Nilai PM SAKIP DJPRL

SK-1	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut							
IK-1	Nilai PM SAKIP DJPRL							
Tahun 2024	Tahun 2025				Renstra 2025-2029			
Realisasi	Target PK	Capaian	% Capaian (%Kinerjaku)	Kenaikan 2024-2025 (%)	Target 2025	% Capaian 2025	Target 2029	% Capaian 2029
89,07	66	88,94	134,75 (120)	-0,13 (0,14)	66	134,75	80	111,18

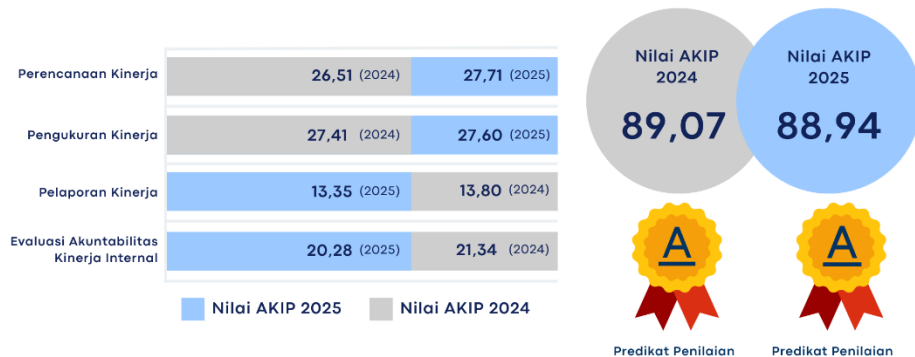
A. Capaian IK Tahun 2025

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL pada tahun 2025 merupakan Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPKRL karena sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 merupakan satu unit kerja yang sama. Capaian IK ini adalah 88,94 predikat A (Memuaskan) sesuai dengan Surat Inspektur I, Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor T.250/ITJ.1/HP.440/VII/2025 tanggal 23 Juli 2025 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut. Adapun target indikator kinerja ini sesuai dengan perjanjian kinerja adalah nilai sebesar 66 sehingga capaian pada tahun ini telah tercapai 134,76% (kinerjaku 120%). Rincian Hasil Penilaian disajikan pada tabel berikut:



Gambar 8 Rincian Hasil Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL Tahun 2025

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024
- Capaian Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL pada Tahun 2025 adalah sebesar 88,94, dan capaian tahun 2024 adalah sebesar 89,07, sehingga apabila dibandingkan maka terdapat penurunan nilai sebesar 0,13 atau 0,14 %. Adapun rincian perbandingan aspek penilaian PM SAKIP tahun 2024 dan 2025 disajikan pada tabel berikut:



Gambar 9 Perbandingan Nilai AKIP DJPKRL Tahun 2024 dan Tahun 2025

Hasil penilaian tahun 2025 terdapat peningkatan pada komponen perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja, namun terdapat penurunan pada komponen pelaporan dan evaluasi kinerja internal. Hal tersebut dikarenakan reviu laporan kinerja yang dilaksanakan setelah tanggal penyampaian laporan kinerja kepada pimpinan, serta perbandingan Nilai Kinerja Organisasi tahun 2024 lebih kecil dari tahun 2023.

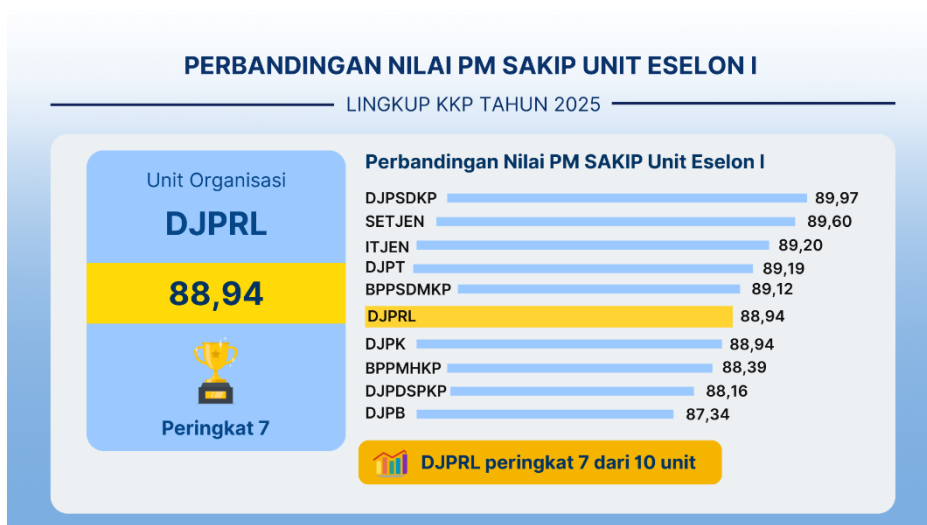
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra DJPRL 2025-2029

Capaian indikator kinerja Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL pada tahun 2025 sebesar 88,94 menunjukkan hasil yang sangat optimal dan jauh melampaui target tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 66, dengan tingkat capaian mencapai 134,75%. Jika dibandingkan dengan target Renstra 2025–2029, capaian ini tidak hanya memenuhi target awal tahun 2025, tetapi juga telah melampaui target akhir tahun 2029 yang sebesar 80. Dengan demikian, capaian tahun 2025 mengindikasikan kinerja yang sangat progresif dan berada pada level yang lebih tinggi dibandingkan

ekspektasi jangka menengah. Namun demikian nilai capaian tahun 2025 merupakan hasil penilaian unit organisasi DJPKRL sebelum bertransformasi menjadi 2 unit organisasi DJPRL dan DJPK. Oleh karenanya nilai tahun 2025 belum mencerminkan hasil evaluasi DJPRL sepenuhnya.

D. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit kerja Setara)

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Unit Eseon I Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 disajikan pada gambar berikut :



Gambar 10 Nilai PM SAKIP Unit Eselon I Lingkup KKP Tahun 2025

Berdasarkan perbandingan capaian Nilai PM SAKIP antar unit Eselon I Lingkup KKP, DJPRL memperoleh nilai 88,94 yang berada pada posisi tengah dibandingkan dengan capaian unit eselon I lainnya. Posisi ini menempatkan DJPRL pada urutan ke 6 dari 10 unit organisasi. Hasil ini mengindikasikan adanya ruang peningkatan dalam evaluasi implementasi SAKIP periode berikutnya.

E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

- Faktor Pendukung Keberhasilan

Adanya komitmen unit kerja dalam pencapaian target dengan realisasi sebesar 134,76%, DJPRL telah memanfaatkan teknologi informasi dalam implementasi SAKIP melalui aplikasi

Kinerjaku, serta dikerjakan oleh pegawai yang berkompeten dibidang akuntabilitas kinerja dan telah mengikuti *elearning* SAKIP.

- Faktor Penghambat Kegagalan dan Kendala
DJPRL merupakan unit kerja baru, komponen penilaian yang tersedia dan dipertahankan setidaknya baru setahun terakhir, belum terdapat inovasi dibidang akuntabilitas kinerja, dan ketersediaan pegawai bidang AKIP baru terpenuhi 60% dari kebutuhan sesuai peta jabatan.
- Solusi
Mempertahankan ketersediaan dan mendokumentasikan komponen penilaian AKIP secara berkelanjutan melalui digitalisasi, mendorong inovasi pengelolaan kinerja, berupaya memenuhi kebutuhan pegawai dibidang perencanaan dan/atau penganggaran.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian indikator kinerja Nilai PM SAKIP DJPRL tercapai 134,76% (kinerjaku 120%) dari target, implementasi SAKIP telah menggunakan sistem digital atau pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi kinerjaku, tim tata kelola kinerja DJPRL telah mengikuti *elearning* SAKIP sehingga dapat dianggap kompeten, dan dari sisi alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian indikator ini adalah sebesar Rp80.000.000 (layanan perencanaan dan penganggaran) yang juga digunakan untuk mendukung 2 indikator kinerja lainnya (PM SAKIP Setditjen PRL dan NKPA DJPRL), dengan realisasi Rp79.822.970 atau 99,78%, menunjukkan efisiensi anggaran karena output melampaui target dengan realisasi anggaran yang tidak sepenuhnya terpakai. Secara kuantitatif sederhana dapat dikalkulasikan pada realisasi alokasi anggaran sebesar 99,78% dan capaian kinerja 134,76%, sehingga rasio efisiensi kinerja terhadap input anggaran sebesar 135,06% yang menunjukkan efektivitas kinerja tinggi.

G. Kegiatan Pendukung

Pada Tahun 2025, kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan:

1. Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Rencana Aksi DJPKRL dan Setditjen PKRL Triwulan IV Tahun 2024
2. Verifikasi Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024

3. Finalisasi Dokumen Kinerja Lingkup DJPKRL Tahun 2025
4. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi DJPKRL Tahun 2025
5. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 dan Manual IKU Level 1 Lingkup Ditjen PKRL tahun 2025
6. Reviu Laporan Kinerja Tahun 2024 Direktorat dan UPT lingkup DJPKRL.
7. Penyusunan Manual IK Level 2 Lingkup Ditjen PKRL Tahun 2025.
8. Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Rencana Aksi DJPKRL dan Setditjen PKRL Triwulan I Tahun 2025
9. Verifikasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025
10. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi DJPRL Tahun 2025
11. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025
12. Penyusunan Manual IKU Level 1 Lingkup Ditjen PRL tahun 2025
13. Reviu Laporan Kinerja Tahun 2024 Direktorat dan UPT lingkup DJPRL.
14. Penyusunan Manual IK Level 2 Lingkup Ditjen PRL Tahun 2025.
15. Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Rencana Aksi DJPKRL dan Setditjen PKRL Tahun 2025
16. Finalisasi Dokumen Kinerja Lingkup DJPRL Tahun 2025
17. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025



Gambar 11 Pembahasan Renstra DJPRL 2025-2029



Gambar 12 Pengukuran dan Verifikasi Data Capaian Kinerja

H. Rencana Aksi Tahun 2026

1. Penyusunan dokumen perencanaan dan pengukuran kinerja tahun 2026
2. Dialog kinerja tahun 2026
3. Reviu laporan kinerja tahun 2025 dan Penyusunan laporan kinerja interim tahun 2026
4. Evaluasi AKIP Lingkup DJPRL tahun 2026
5. Penyusunan pagu alokasi anggaran tahun 2027

IK 2. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Setditjen PRL

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat Jenderal telah melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja di DJPRL setiap tahunnya. Pada tahun 2021 Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 dan telah diperbaru melalui Permen RB 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Impelementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada peraturan ini, evaluasi SAKIP yang baru mencakup komponen perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja

(30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi internal (25%). Pada setiap komponen terdiri dari 3 sub-komponen, yaitu sub-komponen keberadaan (20%), kualitas (30%), dan pemanfaatan (50%).

Tujuan evaluasi adalah menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta saran perbaikan yang diperlukan. Perhitungan capaian untuk indikator kinerja ini adalah berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang sudah dituangkan pada aplikasi kinerjajaku pada menu Evaluasi > LKE).

Nilai PM SAKIP DJPRL adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Inspektorat III, Inspektorat Jenderal KKP. Kategori nilai PM SAKIP yaitu:

Tabel 3 Kategori Nilai PM SAKIP

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

Predikat	Nilai	Interpretasi
B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50-60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Indikator ini diperoleh dari Penilaian Mandiri SAKIP Setditjen PKRL sebagai unit kerja lama dari DJPRL. Capaian IK pada Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

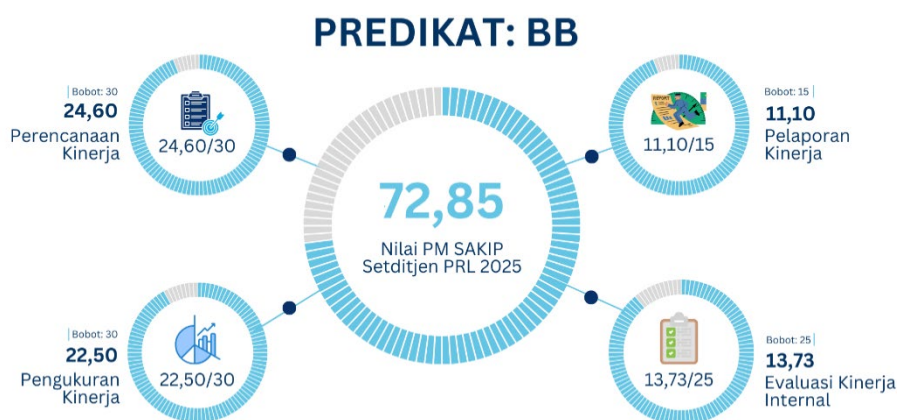
Tabel 4 Capaian IK Nilai PM SAKIP Setditjen PRL

SK-1	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut							
IK-2	Nilai PM SAKIP Setditjen PRL							
Tahun 2024	Tahun 2025				Renstra 2025-2029			
Realisasi	Target PK	Capaian	% Capaian (%Kinerjaku)	Kenaikan 2024-2025 (%)	Target 2025	% Capaian 2025	Target 2029	% Capaian 2029
-	66	72,85	110,38 (110,38)	- (-)	66	110,38	80	91,06

A. Capaian IK Tahun 2025

Capaian indikator kinerja Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Setditjen PRL pada tahun 2025 ini nilai SAKIP Setditjen PRL yaitu sebesar

72,85 predikat BB (Sangat Baik) sesuai dengan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Nomor T.1860/DJPRL.1/RC.610/XI/2025 tanggal 26 November 2025 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut. adapun target indikator kinerja ini sesuai dengan perjanjian kinerja adalah sebesar 66, sehingga tercapai 110,38% (kinerjaku 110,38%). Rincian Hasil Penilaian disajikan pada tabel berikut:



Gambar 13 Rincian Hasil Penilaian Mandiri SAKIP Setditjen PRL Tahun 2025

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024
Capaian pada Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Tahun 2024, dikarenakan indikator kinerja baru dan Setditjen PRL merupakan unit kerja yang baru dibentuk pada tahun 2025.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra DJPRL 2025-2029
Capaian indikator kinerja Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Setditjen PRL pada tahun 2025 adalah sebesar 72,85 dari target, hal ini menunjukkan hasil yang sangat optimal dan telah melampaui target tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 66, dengan tingkat capaian sebesar 110,38%. Jika dibandingkan dengan target Renstra 2025–2029, capaian ini tidak hanya memenuhi target awal tahun 2025, tetapi juga hampir mencapai target akhir tahun 2029 yang ditetapkan sebesar 80, sehingga bila dibandingkan telah tercapai 91,06% dari target akhir renstra. Dengan demikian, capaian tahun

2025 mengindikasikan kinerja yang sangat positif dan berada pada level yang selaras dengan ekspektasi target jangka menengah.

D. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Organisasi Setara)

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Level II Lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025 disajikan pada gambar berikut:



Gambar 14 Nilai PM SAKIP Unit Eselon II Lingkup DJPRL Tahun 2025

Nilai PM SAKIP Setditjen PRL tahun 2025 di Lingkungan Ditjen PRL menempati posisi ke 2 besar dengan nilai 72,85 sama dengan Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan predikat BB (sangat baik), hasil ini mengindikasikan adanya ruang peningkatan pada seluruh aspek evaluasi SAKIP baik dari perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja internal, sehingga kedepan berpotensi untuk terus meningkat.

E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

- Faktor Pendukung Keberhasilan

Adanya komitmen unit kerja dalam pencapaian target dengan realisasi sebesar 110,38%, Setditjen PRL telah memanfaatkan teknologi informasi dalam implementasi SAKIP melalui aplikasi Kinerjaku, serta dikerjakan oleh pegawai yang berkompeten

dibidang akuntabilitas kinerja dan telah mengikuti *elearning* SAKIP.

- Faktor Penghambat Kegagalan dan Kendala
Setditjen PRL merupakan unit kerja baru, komponen penilaian yang tersedia dan dipertahankan setidaknya baru setahun terakhir, belum terdapat inovasi dibidang akuntabilitas kinerja, dan ketersediaan pegawai bidang AKIP baru terpenuhi 60% dari kebutuhan sesuai peta jabatan.
- Solusi
Mempertahankan ketersediaan dan mendokumentasikan komponen penilaian AKIP secara berkelanjutan melalui digitalisasi, mendorong inovasi pengelolaan kinerja, berupaya memenuhi kebutuhan pegawai dibidang perencanaan dan/atau penganggaran.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian indikator kinerja Nilai PM SAKIP Setditjen PRL tercapai 110,38% dari target, implementasi SAKIP telah menggunakan sistem digital atau pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi kinerjaku, kebutuhan pegawai sesuai dengan peta jabatan adalah 10 pegawai, namun pada tahun 2025 baru tersedia sebanyak 6 pegawai, sehingga masih terdapat kekurangan 40%, seluruh tim tata kelola kinerja Setditjen PRL telah mengikuti *elearning* SAKIP sehingga dapat dianggap kompeten, dan dari sisi alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian indikator ini adalah sebesar Rp80.000.000 (layanan perencanaan dan penganggaran) yang juga digunakan untuk mendukung 2 indikator kinerja lainnya (SAKIP DJPRL dan NKPA DJPRL), realisasi anggaran sebesar Rp79.822.970 atau 99,78%, menunjukkan efisiensi anggaran karena output melampaui target dengan realisasi anggaran yang tidak sepenuhnya terpakai.

Secara kuantitatif sederhana dapat dikalkulasikan pada realisasi alokasi anggaran sebesar 99,78% dan capaian kinerja 110,38%, sehingga rasio efisiensi kinerja terhadap input anggaran sebesar 110,62% yang menunjukkan efektivitas kinerja tinggi.

G. Kegiatan Pendukung

Pada Tahun 2025, kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan:

1. Penyusunan Teknokratik Renstra DJPRL 2025 – 2029.

2. Penyusunan dokumen perencanaan dan pengukuran kinerja tahun 2025
3. Dialog kinerja setditjen PRL tahun 2025
4. Pengusulan kode satker baru dan Penyusunan dokumen penganggaran tahun 2026
5. Pengukuran dan evaluasi rencana aksi
6. verifikasi data capaian kinerja
7. Penyusunan laporan kinerja Setditjen PRL dan DJPRL
8. Evaluasi AKIP lingkup DJPRL



Gambar 15 Evaluasi AKIP dan Evaluasi Rencana Aksi

- E. Rencana Aksi Tahun 2026
 1. Penyusunan dokumen perencanaan dan pengukuran kinerja tahun 2026
 2. Dialog kinerja tahun 2026
 3. Penyusunan dan reviu laporan kinerja tahun 2025
 4. Evaluasi AKIP Lingkup DJPRL tahun 2026

IK 3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DJPRL

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran.

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Target NKPA DJPRL Tahun 2025 sebesar 81,50. Capaian NKPA DJPRL nantinya diperoleh dari NKPA DJPKRL Tahun 2025 karena DJPRL masih menggunakan DIPA lama (DIPA DJPKRL).

Kategori Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila NKPA > 90;
2. Baik, apabila NKPA >80 – 90;
3. Cukup, apabila NKPA >60 – 80;
4. Kurang, apabila NKPA >50 – 60;
5. Sangat Kurang, apabila NKPA ≤ 50

Formula Perhitungan:

NKPA Unit Eselon I, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian Capaian Indikator Kinerja Program, Nilai Efektivitas Satker dan Nilai Efisiensi Satker dengan bobot masing-masing indikator. Adapun bobot setiap indikator Kinerja Anggaran Tingkat Unit Eselon I sebagai berikut:

Tabel 5 Bobot Indikator Kinerja Anggaran Tingkat Unit Eselon I

Variabel	Uraian	Bobot
Efektivitas (75)	Capaian Indikator Kinerja Program	30
	Nilai Efektivitas Satker	45
Efisiensi (25)	Nilai Efisiensi Satker	25

a. Efektifitas

1. Capaian Indikator Kinerja Program

CIKP=

$$\left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RIKPi}{TIKPi} \times \frac{1}{n} \right) \times 100\% \right)$$

Keterangan:

- CIKSS : Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis K/L
- RIKSSi : Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis i
- TIKSSi : Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis i
- n : Jumlah Indikator Kinerja Sasaran Strategis

2. Nilai Efektifitas Satker

Nef Satker =

$$\left(\sum_{i=1}^n \frac{RVROi}{TVROi} \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

- Nef Satker : Nilai Efektivitas Satker
- RVROi : Realisasi Volume RO i
- TVROi : Target Volume RO i
- n : Jumlah RO seluruh Satker

b. Efisiensi

NE Satker = (40% X Penggunaan SBK) + (60% X Efisiensi SBK)

Formula Perhitungan NKA Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

$NKA\ UEI = (CIKP \times WCIKP) + (NEfsatker \times WNEfsatker) + (NESatker \times WNESatker)$

Keterangan:

- NKA UEI : Nilai Kinerja Anggaran Unit Eselon I
- CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program
- NEfsatker : Nilai Efektivitas Satker
- NESatker : Nilai Efisiensi Satker
- WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
- WNEfsatker : Bobot Nilai Efektivitas Satker
- WNESatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker

Indikator ini diperoleh dari Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DJPKRL karena DIPA DJPRL masih menggunakan DIPA lama atau DIPA DJPKRL. Capaian IK pada Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 6 Capaian IK Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DJPRL

SK-1	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut							
IK-3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DJPRL							
Tahun 2024	Tahun 2025				Renstra 2025-2029			
Realisasi	Target PK	Capaian	% Capaian (%Kinerjaku)	Kenaikan 2024-2025 (%)	Target 2025	% Capaian 2025	Target 2029	% Capaian 2029
96,84	81,5	87,09	106,86 (106,86)	-9,75 (-10,06)	81,5	106,86	82,5	105,56

A. Capaian IK Tahun 2025

Capaian indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NPKA) DJPRL (Nilai) tahun 2025 yaitu sebesar 87,09 dari target 81,5 atau tercapai 106,86%, sesuai dengan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN Nomor 138/SJ.2/RC.610/I/2026 tanggal 13 Januari 2026 perihal Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Level Unit Eselon I dan Level Satker di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.

Penilaian indikator kinerja ini menggunakan hasil penilaian terhadap unit organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, dikarenakan masih dalam 1 DIPA antara DJPRL dan DJPK pada Tahun 2025

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024

Capaian indikator kinerja NKPA pada Tahun 2025 adalah sebesar 87,09 dan capaian tahun 2024 adalah sebesar 96,84, apabila dibandingkan maka terdapat penurunan sebesar 9,75. Hasil ini disebabkan kinerja perencanaan anggaran DJPRL dan DJPK saling mempengaruhi, dikarenakan masih dalam 1 DIPA DJPKRL.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra DJPRL 2025-2029

Capaian indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NPKA) DJPRL pada tahun 2025 adalah sebesar 87,09 dari target, hal ini menunjukkan hasil yang sangat optimal dan telah melampaui target tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 81,5, dengan tingkat

capaian sebesar 106,86%. Jika dibandingkan dengan target Renstra 2025–2029, capaian ini tidak hanya memenuhi target awal tahun 2025, tetapi juga telah melampaui target akhir tahun 2029 yang ditetapkan sebesar 82,5, sehingga bila dibandingkan telah tercapai 105,56% dari target akhir renstra. Dengan demikian, capaian tahun 2025 mengindikasikan kinerja yang sangat positif dan berada pada level diatas ekspektasi target jangka menengah.

D. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Organisasi Setara)

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NPKA) Unit Eseon I Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 disajikan pada gambar berikut :



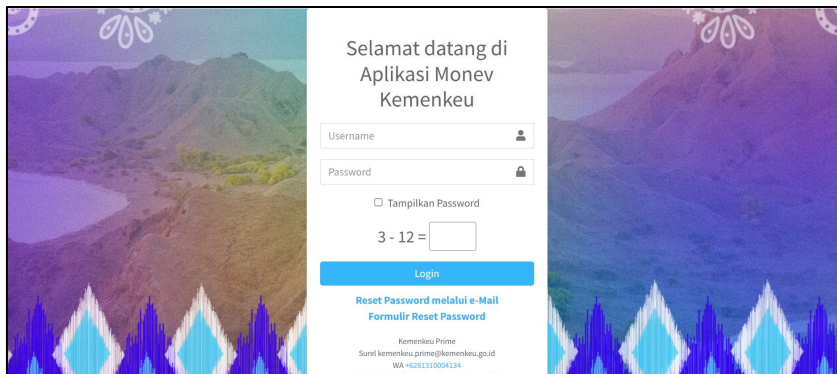
Gambar 16 NKPA Unit Eselon I Lingkup KKP Tahun 2025

Berdasarkan perbandingan capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NPKA) antar unit Eselon I Lingkup KKP, DJPRL memperoleh nilai 87,09 yang berada pada posisi menengah kebawah dibandingkan dengan capaian unit eselon I lainnya. Posisi ini menempatkan DJPRL pada urutan ke 6 dari 9 unit organisasi diatas DJPT, DJPSDKP dan ITJEN. hasil ini mengindikasikan adanya ruang peningkatan dalam perencanaan kinerja anggaran periode berikutnya.

E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

- Faktor Pendukung Keberhasilan

Adanya komitmen unit kerja DJPKRL (DJPRL dan DJPK) dalam pencapaian target dengan realisasi sebesar 106,86%, pengukuran indikator kinerja telah menggunakan teknologi informasi berupa aplikasi monev-Kemenkeu, seluruh target rincian output kewenangan DJPRL tercapai 100% atau lebih.



Gambar 17 Aplikasi monev Kemenkeu

- Faktor Penghambat Kegagalan dan Kendala
Penilaian NKPA masih menggunakan unit organisasi lama yaitu DJPKRL, sehingga capaian rincian output DJPRL dan DJPK saling mempengaruhi hasil perhitungan.
- Solusi
Untuk mengatasi kendala tersebut, DJPRL telah berupaya untuk mengusulkan kode satker baru dan telah disetujui oleh Kementerian Keuangan, sehingga pada tahun 2026 pencapaian indikator kinerja ini tidak lagi dipengaruhi oleh unit organisasi lain.

- F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- Pencapaian indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NPKA) DJPRL tercapai 106,86% dari target, penilaian NKPA telah menggunakan sistem digital atau pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi monev kemenkeu, dan dari sisi alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian indikator ini adalah sebesar Rp80.000.000 (layanan perencanaan dan penganggaran) yang juga digunakan untuk mendukung 2 indikator kinerja lainnya (SAKIP DJPRL dan SAKIP Setditjen PRL), realisasi anggaran sebesar Rp79.822.970 atau 99,78%, menunjukkan efisiensi anggaran karena output melampaui target dengan realisasi anggaran yang tidak sepenuhnya terpakai.

Secara kuantitatif sederhana dapat dikalkulasikan pada realisasi alokasi anggaran sebesar 99,78% dan capaian kinerja 106,86%, sehingga rasio efisiensi kinerja terhadap input anggaran sebesar 107,09% yang menunjukkan efektivitas kinerja tinggi.

G. Kegiatan Pendukung

Pada Tahun 2025, kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan:

1. Koordinasi Dengan Unit Kerja DJPK penggunaan akun bersama
2. Pengusulan Kode Satker baru untuk Satker Lingkup DJPRL
3. Revisi POK untuk pemenuhan kebutuhan anggaran Dukungan Manajemen DJPRL
4. Pembahasan Rencana Kerja DJPRL Tahun 2026 dan penginputan pada Aplikasi Krisna Bappenas.
5. Penelahaan Pagu Anggaran Tahun 2025 Ditjen PRL
6. Pengusulan Penggunaan PNB 13%
7. Reviu rekomposisi penggunaan anggaran PNB tahun 2025
8. Penginputan data capaian output pada aplikasi SAKTI.

H. Rencana Aksi Tahun 2026

1. Penggunaan kode satker baru DJPRL
2. Penginputan data capaian output pada aplikasi SAKTI secara berkala
3. Pemantauan rutin terhadap pencapaian target indikator kinerja program, nilai efisiensi dan nilai efektivitas satker.

IK 4. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Formula Perhitungan:

$$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$$

Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. Sedangkan, konversi

bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

Tabel 7 Uraian dan Bobot Indikator IKPA

No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)
1	Revisi DIPA	10
2	Deviasi RPD	15
3	Penyerapan Anggaran	20
4	Belanja Kontraktual	10
5	Penyelesaian Tagihan	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10
7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)
8	Capaian Output	25

Target IKPA DJPRL Tahun 2025 sebesar 85. Capaian IKPA DJPRL nantinya diperoleh dari IKPA DJPKRL Tahun 2025 karena DJPRL masih menggunakan DIPA lama (DIPA DJPKRL).

Indikator ini diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPKRL karena DIPA DJPRL masih menggunakan DIPA lama atau DIPA DJPKRL. Berikut capaian dan perkembangan IK ini pada Tahun 2025

Tabel 8 Capaian IK Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL

SK-1	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut							
IK-4	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL							
Tahun 2024	Tahun 2025				Renstra 2025-2029			
Realisasi	Target PK	Capaian	% Capaian (%Kinerjaku)	Kenaikan 2024-2025 (%)	Target 2025	% Capaian 2025	Target 2029	% Capaian 2029
85,67	89	84,18	94,58 (94,58)	-1,73 (-2,01)	89	94,58	91	92,51

A. Capaian IK Tahun 2025

Capaian indikator kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL tahun 2025 sebesar 84,18 dari target 89 atau tercapai 94,58%, sesuai dengan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN Nomor 111/SJ.2/RC.610/I/2026 tanggal 10 Januari 2026 perihal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja

Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester II Tahun 2025.

penilaian indikator kinerja ini menggunakan hasil penilaian terhadap unit organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, dikarenakan masih dalam 1 DIPA antara Ditjen PK dan Ditjen PRL pada Tahun 2025.

indikator kinerja ini tidak tercapai disebabkan tidak maksimalnya nilai kriteria kualitas perencanaan anggaran yang memperoleh nilai 79,47% dan nilai kriteria kualitas pelaksanaan anggaran memperoleh nilai 86,10%, serta terdapat pengurangan dari adanya dispensasi SPM sebesar 0,75, selain itu penilaian IKPA masih menjadi satu dengan Ditjen Pengelolaan Kelautan, sehingga kinerja pelaksanaan anggaran saling mempengaruhi.

**Tabel 9 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
DJPRL Tahun 2025**

No	Aspek Penilaian	Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Nilai Aspek
1.	Kualitas Perencanaan Anggaran				79,47
	Revisi DIPA	97,78	10	9,78	
	Deviasi Halaman III DIPA	61,16	15	9,17	
2.	Kualitas Pelaksanaan Anggaran				86,10
	Penyerapan Anggaran	65,41	20	13,08	
	Belanja Kontraktual	85,50	10	8,55	
	Penyelesaian Tagihan	100	10	10	
	Pengelolaan UP TUP	93,50	10	9,35	
3.	Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran				100
	Capaian Output	100	25	25	
Nilai Total					84,93
Konversi Bobot					100
Dispensasi SPM (Pengurangan)					0,75
Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)					84,18

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024

Capaian indikator kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL pada Tahun 2025 adalah sebesar 84,18 dan capaian tahun 2024 adalah sebesar 85,67, apabila dibandingkan maka terdapat penurunan sebesar 1,73 atau 2,01%. Hasil ini disebabkan kinerja

pelaksanaan anggaran DJPRL dan DJPK saling mempengaruhi, dikarenakan masih dalam 1 DIPA DJPKRL.

Tabel 10 Tabel Capaian IKPA DJPKRL Tahun 2024 dan 2025

NO	Aspek Penilaian	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Revisi DIPA	5	9,78
2	Deviasi Hal. III DIPA	11,43	9,17
3	Penyerapan Anggaran	16,19	13,08
4	Belanja Kontraktual	9,4	8,55
5	Penyelesaian Tagihan	9,92	10
6	Pengelolaan UP TUP	10	9,35
7	Capaian Output	24,72	25
Nilai Total		86,67	84,93
Konversi Bobot		100	100
Dispensasi SPM		1	0,75
Nilai Akhir		85,67	84,18

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra DJPRL 2025-2029

Capaian indikator kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL pada tahun 2025 adalah sebesar 84,18 dari target, hal ini menunjukkan hasil yang kurang optimal dan belum melampaui target tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 89, dengan tingkat capaian sebesar 94,58%%. Jika dibandingkan dengan target Renstra 2025–2029, capaian ini tidak hanya belum memenuhi target awal tahun 2025, tetapi juga masih jauh dari target akhir tahun 2029 yang ditetapkan sebesar 91, sehingga bila dibandingkan baru tercapai 92,51% dari target akhir renstra. Dengan demikian, capaian tahun 2025 mengindikasikan kinerja yang kurang optimal dan berada pada level dibawah ekspektasi target jangka menengah.

D. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Organisasi Setara)

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Unit Eseon I Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 disajikan pada gambar berikut :

PERBANDINGAN IKPA UNIT ESELON I

LINGKUP KKP TAHUN 2025

Unit Organisasi

DJPRL

84,18



Peringkat 9

Perbandingan IKPA Unit Eselon I

DJPSPDKP	97,30
BPPSDMKP	96,52
SETJEN	95,58
BPPMHKP	94,64
ITJEN	93,58
DJPDSKP	93,45
DJPB	89,57
DJPT	85,50
DJPRL	84,18



DJPRL peringkat 9 dari 9 unit

Gambar 18 IKPA Unit Eselon I Lingkup KKP Tahun 2025

Berdasarkan perbandingan capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) antar unit Eselon I Lingkup KKP, DJPRL memperoleh nilai 84,18 yang berada pada posisi paling bawah dibandingkan dengan capaian unit eselon I lainnya. Posisi ini menempatkan DJPRL pada urutan terakhir unit organisasi dibawah DJPB dan DJPT. hasil ini mengindikasikan adanya ruang peningkatan dalam kinerja pelaksanaan anggaran periode berikutnya.

E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

- Faktor Pendukung Keberhasilan

Pengukuran indikator kinerja telah menggunakan teknologi informasi berupa aplikasi OM SPAN Kemenkeu.

MONETVPA													
Indikator Pelaksanaan Anggaran													
FILTER: SAMPAI DENGAN DESEMBER													
NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN RE DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT	
1	175	032	622145	SEKRETARIAT DJPBN	Nilai	80,00	55,08	64,34	84,00	100,00	93,25	0,00	56,86
				PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LALUT	Bobot	10	15	20	10	10	10	25	
					Nilai Akhir	8,00	8,26	12,87	8,40	10,00	9,33	0,00	
					Nilai Aspek	67,54			85,40			0,00	

Gambar 19 Aplikasi OM SPAN Kemenkeu

- Faktor Penghambat Kegagalan dan Kendala
Penilaian IKPA masih menggunakan unit organisasi lama yaitu DJPKRL, sehingga capaian tiap indikator penilaian IKPA DJPRL dan DJPK saling mempengaruhi hasil perhitungan.
- Solusi
Untuk mengatasi kendala tersebut, DJPRL telah berupaya untuk mengusulkan kode satker baru dan telah disetujui oleh Kementerian Keuangan, sehingga pada tahun 2026 pencapaian indikator kinerja ini tidak lagi dipengaruhi oleh unit organisasi lain.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian indikator kinerja Pelaksanaan Anggaran (IPKA) DJPRL tercapai 94,58% dari target, penilaian IKPA telah menggunakan sistem digital atau pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi OM SPAN kemenkeu, dan dari sisi alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian indikator ini adalah sebesar Rp80.000.000 (layanan manajemen keuangan) yang juga digunakan untuk mendukung pencapaian 5 indikator kinerja lainnya (Rekomendasi Hasil Pengawasan DJPRL, Rekomendasi Hasil Pengawasan Setditjen PRL, Maturitas SPIP, Laporan SPIP dan Batas Temuan LHP BPK), realisasi anggaran sebesar Rp77.569.945 atau 96,96%, masih menunjukkan adanya efisiensi anggaran karena output melampaui target dengan realisasi anggaran yang tidak sepenuhnya terpakai.

Secara kuantitatif sederhana dapat dikalkulasikan pada realisasi alokasi anggaran sebesar 96,96% dan capaian kinerja 94,58%, sehingga rasio efisiensi kinerja terhadap input anggaran sebesar 97,54% yang menunjukkan efektivitas kinerja baik.

G. Kegiatan Pendukung

Pada Tahun 2025, kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan:

1. Penyampaian Surat kepada Pimpinan Unit Kerja di lingkup DJPRL perihal Pemuktahiran Rencana Penarikan Dana halaman DIPA III Triwulan II Tahun 2025
2. Pelaporan Target dan Capaian Output.
3. Revisi DIPA dan RKAKL
4. Penyusunan dan penyampaian rencana penarikan dana
5. Penyampaian data kontrak
6. Pengelolaan UP dan TUP

7. Konfirmasi capaian output melalui aplikasi SAKTI

H. Rencana Aksi Tahun 2026

1. Penggunaan kode satker baru DJPRL
2. Pemutakhiran perencanaan anggaran melalui revisi dan rencana penarikan dana
3. Pelaksanaan anggaran melalui pengelolaan UP/TUP dan kontraktual
4. Penginputan data capaian output pada aplikasi SAKTI secara berkala
5. Pemantauan rutin terhadap pencapaian IKPA pada aplikasi Om SPAN Kemenkeu.

IK 5. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja DJPRL

Definisi rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh unit DJPRL sampai dengan waktu pengukuran.

Formula perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja}} \times 100\%$$

Frekuensi pengukuran IKU ini dilakukan secara triwulanan.

Capaian IK pada Tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah ini

Tabel 11 Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja DJPRL

SK-1	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut							
IK-5	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja DJPRL							
Tahun 2024	Tahun 2025				Renstra 2025-2029			
Realisasi	Target PK	Capaian	% Capaian (%Kinerjaku)	Kenaikan 2024-2025 (%)	Target 2025	% Capaian 2025	Target 2029	% Capaian 2029
-	80	96,72	120,90 (120)	- (-)	80	120,90	84	115,14

A. Capaian IK Tahun 2025

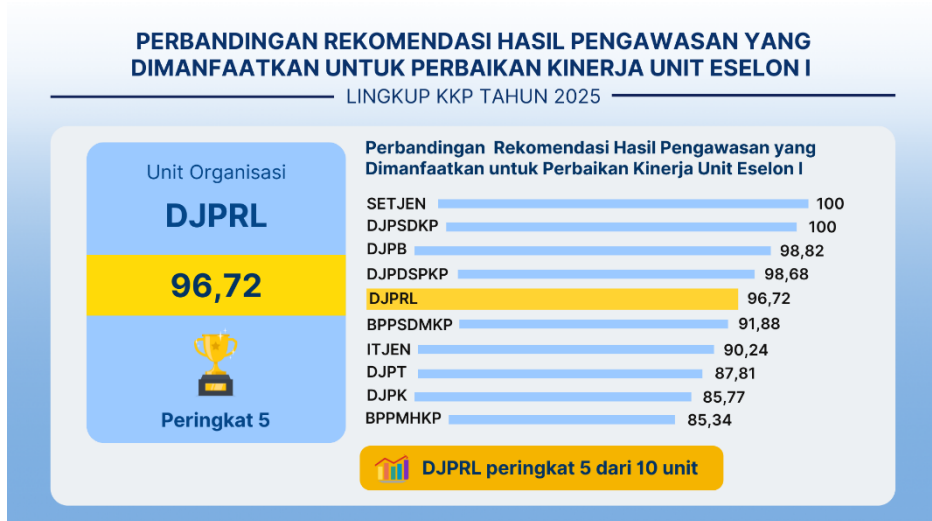
Capaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja DJPRL sampai dengan periode triwulan IV tahun 2025 ini adalah sebesar 96,72% dari target 80% atau tercapai 120,9% (kinerjaku 120%) sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal KKP Nomor 60/ITJ.0/RC.610/I/2026 tanggal 8 Januari 2026 Hal Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP" Tahun 2025. Adapun rekapitulasi jumlah rekomendasi disajikan pada tabel berikut:

Tabel 12 Rekapitulasi Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Tahun 2025 pada DJPRL

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	% Tuntas	Sisa Rekomendasi	% Sisa
1	Ditjen PRL	61	59	96,72	2	3,28

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024
Capaian Kinerja Pada Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 karena Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 dan Ditjen PRL merupakan unit organisasi yang baru terbentuk tahun 2025.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra DJPRL 2025-2029
Capaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja DJPRL pada tahun 2025 adalah sebesar 96,72, hal ini menunjukkan hasil yang sangat optimal dan telah melampaui target tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 80, dengan tingkat capaian sebesar 120,90%. Jika dibandingkan dengan target Renstra 2025–2029, capaian ini tidak hanya memenuhi target awal tahun 2025, tetapi juga telah melampaui target akhir tahun 2029 yang ditetapkan sebesar 84, sehingga bila dibandingkan telah tercapai 115,14% dari target akhir renstra. Dengan demikian, capaian tahun 2025 mengindikasikan kinerja yang sangat optimal dan berada pada level diatas ekspektasi target jangka menengah.
- D. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Organisasi Setara)

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Unit Eseon I Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 disajikan pada gambar berikut :



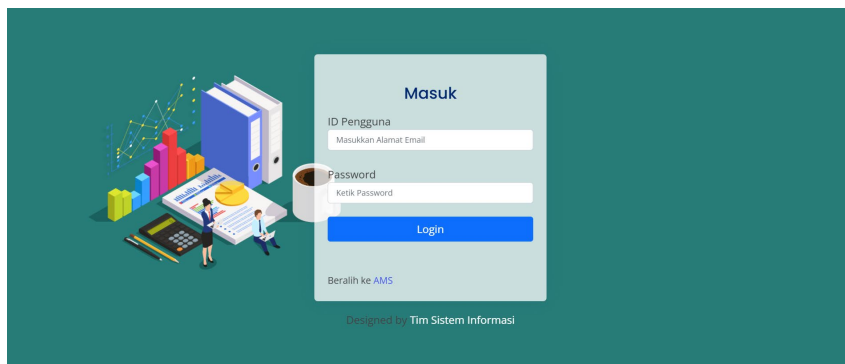
Gambar 20 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP Tahun 2025

Berdasarkan perbandingan capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja antar unit Eselon I Lingkup KKP, DJPRL memperoleh nilai 96,72 yang berada pada posisi menengah atas dibandingkan dengan capaian unit eselon I lainnya. Posisi ini menempatkan DJPRL pada urutan ke 5 unit organisasi dibawah DJPDSPKP dan diatas BPPSDMKP. hasil ini mengindikasikan adanya ruang peningkatan dalam kinerja pemanfaatan hasil pengawasan periode berikutnya.

E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

- Faktor Pendukung Keberhasilan

Adanya komitmen unit kerja dalam pencapaian target dengan realisasi sebesar 120,90%, selain itu pengukuran indikator kinerja telah menggunakan teknologi informasi berupa aplikasi SIDAK.



Gambar 21 Aplikasi SIDAK

- Faktor Penghambat Kegagalan dan Kendala
Masih terdapat 2 rekomendasi hasil pengawasan yang belum ditindaklanjuti, yaitu rekomendasi pada Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut, sehingga tidak dapat nilai sempurna dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan.
- Solusi
Sisa rekomendasi hasil pengawasan akan ditindaklanjuti pada periode berikutnya.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja tercapai 120,90%, penilaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan telah menggunakan sistem digital atau pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi SIDAK, dan dari sisi alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian indikator ini adalah sebesar Rp80.000.000 (layanan manajemen keuangan) yang juga digunakan untuk mendukung pencapaian 5 indikator kinerja lainnya (Nilai IKPA, Rekomendasi Hasil Pengawasan Setditjen PRL, Maturitas SPIP, Laporan SPIP dan Batas Temuan LHP BPK), realisasi anggaran sebesar Rp77.569.945 atau 96,96%, masih menunjukkan adanya efisiensi anggaran karena output melampaui target dengan realisasi anggaran yang tidak sepenuhnya terpakai.

Secara kuantitatif sederhana dapat dikalkulasikan pada realisasi alokasi anggaran sebesar 96,96% dan capaian kinerja 120,90%, sehingga rasio efisiensi kinerja terhadap input anggaran sebesar 124,69% yang menunjukkan efektivitas kinerja tinggi.

G. Kegiatan Pendukung

Pada Tahun 2025, kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan:

1. Pembahasan Hasil Audit Dokumen Pertanggungjawaban Proyek LAUTRA pada tanggal 6 Februari 2025
2. Rapat Koordinasi Pembahasan Progress TL LHP BPK dan APIP pada DKP Prov dan Kab lingkup DJPKRL pada 5 Maret 2025
3. Rapat Pembahasan Tindak Lanjut atas LHA Pertanggungjawaban Keuangan dan Realisasi Anggaran Kegiatan LAUTRA TA 2024 dan 2025 pada Satker Lingkup DJPKRL pada tanggal 12 Maret 2025
4. Identifikasi Penetapan Akun Signifikan PIPK pada Entitas Akuntansi lingkup DJPKRL Tahun 2025 pada tanggal 11 Maret 2025 34
5. Entry Meeting Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Itjen TW 1 2025 pada tanggal 18 Maret 2025
6. Koordinasi Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK Pemenuhan Data Persediaan & BMN 2024 pada tanggal 26 Maret 2025
7. Pembahasan tindaklanjut temuan BPK dan Itjen sampai dengan tahun 2025.

H. Rencana Aksi Tahun 2025

1. Menindaklanjuti sisa rekomendasi hasil pengawasan dan rekomendasi yang akan disampaikan pada periode mendatang.
2. Melakukan pemantauan rekomendasi hasil pengawasan pada DJPRL.

IK 6. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen PRL

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Setditjen PRL sampai dengan waktu pengukuran.

Formula perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja}} \times 100\%$$

Berikut capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen PRL pada Tahun 2025.

Tabel 13 Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen PRL

SK-1	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut							
IK-6	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen PRL							
Tahun 2024	Tahun 2025				Renstra 2025-2029			
Realisasi	Target PK	Capaian	% Capaian (%Kinerjaku)	Kenaikan 2024-2025 (%)	Target 2025	% Capaian 2025	Target 2029	% Capaian 2029
-	80	100	125 (120)	- (-)	80	125	84	119,05

A. Capaian IK Tahun 2025

Capaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen PRL sampai dengan periode triwulan IV tahun 2025 ini adalah sebesar 100% dari target 80% atau tercapai 125% (kinerjaku 120%) sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal PRL Nomor B.62/DJPRL.1/TU.140/I/2026 tanggal 12 Januari 2026 Hal Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PRL" periode Triwulan IV Tahun 2025. Adapun rekapitulasi jumlah rekomendasi disajikan pada tabel berikut:

Tabel 14 Rekapitulasi Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Tahun 2025 pada Setditjen PRL

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	% Tuntas	Sisa Rekomendasi	% Sisa
1	Setditjen PRL	26	26	100	0	0

Capaian ini diperoleh dari hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal KKP yang terbit pada periode 1 oktober 2024 s.d 30 September 2025 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (1 rekomendasi) oleh DJPRL sampai dengan 30 September 2025.

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024
Capaian Kinerja Pada Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 karena Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 dan Setditjen PRL merupakan unit kerja yang baru terbentuk tahun 2025.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra DJPRL 2025-2029
Capaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen PRL pada tahun 2025 adalah sebesar 100, hal ini menunjukkan hasil yang sangat optimal dan telah melampaui target tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 80, dengan tingkat capaian sebesar 125%. Jika dibandingkan dengan target Renstra 2025–2029, capaian ini tidak hanya memenuhi target awal tahun 2025, tetapi juga telah melampaui target akhir tahun 2029 yang ditetapkan sebesar 84, sehingga bila dibandingkan telah tercapai 119,05% dari target akhir renstra. Dengan demikian, capaian tahun 2025 mengindikasikan kinerja yang sangat optimal dan berada pada level diatas ekspektasi target jangka menengah.
- D. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Kerja Setara)
Perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Level II Lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025 disajikan pada gambar berikut:



Gambar 22 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon II Lingkup DJPRL Tahun 2025

Berdasarkan perbandingan hasil pencapaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen PRL, Setditjen PRL beserta 4 Direktorat lainnya menunjukkan komitmen nyata dalam menindak lanjuti rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan dengan capaian 100%, dan hanya Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut yang hanya memperoleh nilai sebesar 92%.

- E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi
 - Faktor Pendukung Keberhasilan
Adanya komitmen unit kerja dalam pencapaian target dengan realisasi sebesar 125%, selain itu pengukuran indikator kinerja telah menggunakan teknologi informasi berupa aplikasi SIDAK.
 - Faktor Penghambat Kegagalan dan Kendala
Dalam pencapaian target indikator kinerja ini tidak terdapat faktor penghambat maupun kendala yang dihadapi.
 - Solusi
Tidak terdapat solusi, karena pencapaian indikator kinerja ini telah memperoleh nilai sempurna pada tahun 2025.
- F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen PRL tercapai 125%, penilaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan telah menggunakan sistem digital atau pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi SIDAK, dan dari sisi alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian indikator ini adalah sebesar Rp80.000.000 (layanan manajemen keuangan) yang juga digunakan untuk mendukung pencapaian 5 indikator kinerja lainnya (Nilai IKPA, Rekomendasi Hasil Pengawasan DJPRL, Maturitas SPIP, Laporan SPIP dan Batas Temuan LHP BPK), realisasi anggaran sebesar Rp77.569.945 atau 96,96%, masih menunjukkan adanya efisiensi anggaran karena output melampaui target dengan realisasi anggaran yang tidak sepenuhnya terpakai.

Secara kuantitatif sederhana dapat dikalkulasikan pada realisasi alokasi anggaran sebesar 96,96% dan capaian kinerja 125%, sehingga rasio efisiensi kinerja terhadap input anggaran sebesar 128,91% yang menunjukkan efektivitas kinerja tinggi.

G. Kegiatan Pendukung

Pada Tahun 2025, kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan:

1. Rapat Koordinasi Pembahasan Progress TL LHP BPK dan APIP pada DKP Prov dan Kab lingkup DJPKRL
2. Rapat Pembahasan Tindak Lanjut atas LHA Pertanggungjawaban Keuangan dan Realisasi Anggaran Kegiatan LAUTRA TA 2024 dan 2025 pada Satker Lingkup DJPKRL
3. Identifikasi Penetapan Akun Signifikan PIPK pada Entitas Akuntansi lingkup DJPKRL Tahun 2025
4. Entry Meeting Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Itjen TW 1 2025
5. Koordinasi Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK Pemenuhan Data Persediaan & BMN 2024
6. Pembahasan tindaklanjut temuan BPK dan Itjen sampai dengan tahun 2025.
7. Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Satker Lingkup Ditjen PRL
8. Koordinasi dan Pemantauan Tindak Lanjut Satker Lingkup Ditjen PRL

9. memanfaatkan Layanan Tindak Lanjut Online pada Inspektorat Jenderal KKP melalui Aplikasi SIDAk.

H. Rencana Aksi Tahun 2026

1. Menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan yang akan disampaikan pada periode mendatang.
2. Melakukan pemantauan rekomendasi hasil pengawasan lingkup DJPRL.

IK 7. Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP DJPRL

Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Nilai akan disampaikan melalui Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN yang berisi sumber data dari Inspektorat Jenderal. Penilaian maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja Eselon I dilakukan untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP, yaitu (1) Lingkungan Pengendalian, (2) Penilaian Risiko (3) Kegiatan Pengendalian, (4) Informasi dan Komunikasi (5) Pemantauan. Kerangka maturitas SPIP terpola dalam 5 (lima) tingkatan yaitu:

LEVEL MATURITAS		INTERVAL SKOR
1	Rintisan	1,0 s/d kurang dari 2,0 ($1,0 \leq \text{skor} < 2,0$)
2	Berkembang	2,0 s/d kurang dari 3,0 ($2,0 \leq \text{skor} < 3,0$)
3	Terdefinisi	3,0 s/d kurang dari 4,0 ($3,0 \leq \text{skor} < 4,0$)
4	Terkelola dan Terukur	4,0 s/d kurang dari 4,5 ($4,0 \leq \text{skor} < 4,5$)
5	Optimum	Lebih dari 4,5 s/d 5,0 ($4,5 \leq \text{skor} \leq 5$)

Gambar 23 Tingkatan Maturitas SPIP

Formula Perhitungan:

- b. Hasil penilaian dikeluarkan oleh APIP.
- c. Mekanisme Penilaian Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja Eselon I terdiri atas:
 1. Penilaian Mandiri (PM) oleh Unit Kerja Eselon I

2. Penjaminan Kualitas (PK) oleh APIP.

Berikut capaian dan perkembangan IK ini pada Tahun 2025

**Tabel 15 Capaian IK Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP
DJPRL**

SK-1	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut							
IK-7	Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP DJPRL							
Tahun 2024	Tahun 2025				Renstra 2025-2029			
Realisasi	Target PK	Capaian	% Capaian (%Kinerjaku)	Kenaikan 2024-2025 (%)	Target 2025	% Capaian 2025	Target 2029	% Capaian 2029
-	3,5	3,683	108,74 (108,74)	- (-)	3,5	108,74	3,9	97,59

A. Capaian IK Tahun 2025

Capaian indikator kinerja Nilai maturitas struktur dan proses SPIP DJPRL tahun 2025 adalah sebesar 3,806 dari target sebesar 3,5 atau tercapai 108,74% sesuai dengan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara nomor 257/SJ.2/TU.210/I/2026 tanggal 21 Januari 2026 Hal Perubahan atas Hasil penjaminan kualitas penilaian mandiri maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP tahun 2025 pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024

Capaian Kinerja Pada Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 karena Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 dan Setditjen PRL merupakan unit kerja yang baru terbentuk tahun 2025.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra DJPRL 2025-2029

Capaian indikator kinerja Nilai maturitas struktur dan proses SPIP DJPRL pada tahun 2025 adalah sebesar 3,806, hal ini menunjukkan hasil yang sangat optimal dan telah melampaui target tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 3,5, dengan tingkat capaian sebesar 108,74%. Jika dibandingkan dengan target Renstra 2025–2029, capaian ini tidak hanya memenuhi target awal tahun 2025, tetapi juga hampir memenuhi target akhir tahun 2029 yang ditetapkan sebesar 3,9, sehingga bila dibandingkan telah tercapai 97,59% dari

target akhir renstra. Dengan demikian, capaian tahun 2025 mengindikasikan kinerja yang sangat optimal dan berada pada level yang selaras dengan target jangka menengah.

D. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Organisasi Setara)

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai maturitas struktur dan proses SPIP Unit Eseon I Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 disajikan pada gambar berikut :



Gambar 24 Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP Unit Eselon I Lingkup KKP Tahun 2025

Berdasarkan perbandingan hasil pencapaian indikator kinerja Nilai maturitas struktur dan proses SPIP, DJPRL memperoleh nilai 3,806 yang berada pada posisi atas dibandingkan dengan capaian unit eselon I lainnya. Posisi ini menempatkan DJPRL pada urutan ke 2 unit organisasi lingkup KKP dibawah DJPSDKP. hasil ini mengindikasikan adanya ruang peningkatan dalam implementasi maturitas struktur dan proses SPIP periode berikutnya.

E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

- Faktor Pendukung Keberhasilan
Adanya komitmen unit kerja dalam pencapaian target dengan realisasi sebesar 108,74%, level status maturitas adalah terdefinisi
- Faktor Penghambat Kegagalan dan Kendala

Dalam pencapaian target indikator kinerja ini tidak terdapat faktor penghambat maupun kendala yang dihadapi.

- Solusi

Tidak terdapat solusi, karena pencapaian indikator kinerja ini telah memperoleh nilai sempurna pada tahun 2025.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian Indikator Kinerja Nilai maturitas struktur dan proses SPIP tercapai 108,74% dan dari sisi alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian indikator ini adalah sebesar Rp80.000.000 (layanan manajemen keuangan) yang juga digunakan untuk mendukung pencapaian 5 indikator kinerja lainnya (Nilai IKPA, Rekomendasi Hasil Pengawasan DJPRL, Rekomendasi Hasil Pengawasan Setditjen PRL, Laporan SPIP dan Batas Temuan LHP BPK), realisasi anggaran sebesar Rp77.569.945 atau 96,96%, masih menunjukkan adanya efisiensi anggaran karena output melampaui target dengan realisasi anggaran yang tidak sepenuhnya terpakai.

Secara kuantitatif sederhana dapat dikalkulasikan pada realisasi alokasi anggaran sebesar 96,96% dan capaian kinerja 108,74%, sehingga rasio efisiensi kinerja terhadap input anggaran sebesar 112,15% yang menunjukkan efektivitas kinerja tinggi.

G. Kegiatan Pendukung

Pada Tahun 2025, kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan:

1. Pembahasan Rancangan Surat Keputusan Tim SPIP Ditjen PRL Tahun 2024 tanggal 21 Mei 2025
2. Sosialisasi Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Resiko
3. Penyampaian dan Pembahasan Hasil Asistensi MR tahun 2026 oleh Inspektorat Jenderal.
4. Bimbingan Teknis penyusunan Manajemen Risiko tahun 2025
5. Penyusunan Laporan triwulan dan bulanan
6. Evaluasi Maturitas SPIP oleh BPKP.

H. Rencana Aksi Tahun 2026

1. Pemenuhan dokumen penilaian maturitas struktur dan proses SPIP
2. Monitoring dan evaluasi maturitas struktur dan proses SPIP

IK 8. Laporan SPIP Setditjen PRL yang Disusun

Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan DJPRL. Hal ini menjadi amanah sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/Permen-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Teknik Menghitung IK ini adalah dengan menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen laporan SPIP yang telah disusun. Laporan SPIP disusun secara triwulanan. Laporan SPIP yang disusun pada tahun 2025 adalah Laporan SPIP pada periode s.d. Tahun 2025.

Berikut capaian dan perkembangan IK ini pada Tahun 2025

Tabel 16 Capaian IK Laporan SPIP Setditjen PRL yang Disusun

SK-1	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut							
IK-8	Laporan SPIP Setditjen PRL yang Disusun							
Tahun 2024	Tahun 2025				Renstra 2025-2029			
Realisasi	Target PK	Capaian	% Capaian (%Kinerjaku)	Kenaikan 2024-2025 (%)	Target 2025	% Capaian 2025	Target 2029	% Capaian 2029
-	2	2	100 (100)	- (-)	-	-	-	-

A. Capaian IK Tahun 2025

Capaian indikator kinerja Laporan SPIP yang disusun Setditjen PRL yang disusun sampai dengan periode triwulan IV tahun 2025 ini adalah sebanyak 2 dokumen dari target 2 dokumen atau tercapai 100%. adapun capaian dimaksud adalah sebagai berikut:

- Laporan SPIP triwulan II Tahun 2025 Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut tanggal 18 Juli 2025:
- Laporan SPIP triwulan III Tahun 2025 Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut tanggal 10 Oktober 2025

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024
Capaian Kinerja Pada Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 karena Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 dan Setditjen PRL merupakan unit kerja yang baru terbentuk tahun 2025.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra DJPRL 2025-2029
Indikator kinerja ini tidak terdapat dalam renstra DJPRL 2025-2029, sehingga capaian indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan target renstra, indikator ini digunakan untuk mendukung pencapaian nilai maturitas struktur dan proses SPIP pada level I.
- D. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional
Perbandingan capaian indikator kinerja Laporan SPIP yang disusun Level II Lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025 disajikan pada gambar berikut:



Gambar 25 Laporan SPIP yang disusun Unit Eselon II Lingkup DJPRL Tahun 2025

Berdasarkan perbandingan indikator kinerja Laporan SPIP yang disusun di Lingkungan Ditjen PRL, seluruh unit kerja telah mencapai 100%, hal ini menunjukkan bahwa unit kerja level II lingkup Ditjen PRL memiliki komitmen yang tinggi dalam mendukung penerapan SPIP.

- E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
- Faktor Pendukung Keberhasilan

Adanya komitmen unit kerja dalam pencapaian target dengan realisasi sebesar 100%, tim SPIP lingkup Ditjen PRL telah melibatkan seluruh entitas.

- Faktor Penghambat Kegagalan dan Kendala
Dalam pencapaian target indikator kinerja ini tidak terdapat faktor penghambat maupun kendala yang dihadapi.
- Solusi
Tidak terdapat solusi, karena pencapaian indikator kinerja ini telah memperoleh nilai sempurna pada tahun 2025.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian Indikator Kinerja Laporan SPIP yang disusun Setditjen PRL tercapai 100% dan dari sisi alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian indikator ini adalah sebesar Rp80.000.000 (layanan manajemen keuangan) yang juga digunakan untuk mendukung pencapaian 5 indikator kinerja lainnya (Nilai IKPA, Rekomendasi Hasil Pengawasan DJPRL, Rekomendasi Hasil Pengawasan Setditjen PRL, Maturitas SPIP dan Batas Temuan LHP BPK), realisasi anggaran sebesar Rp77.569.945 atau 96,96%, masih menunjukkan adanya efisiensi anggaran karena output melampaui target dengan realisasi anggaran yang tidak sepenuhnya terpakai.

Secara kuantitatif sederhana dapat dikalkulasikan pada realisasi alokasi anggaran sebesar 96,96% dan capaian kinerja 100%, sehingga rasio efisiensi kinerja terhadap input anggaran sebesar 103,13% yang menunjukkan efektivitas kinerja tinggi.

G. Kegiatan Pendukung

Pada Tahun 2025, kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan:

1. Rapat Dengan Biro Keuangan Dan BMN Mengenai Pembahasan Penetapan Konteks Manajemen Risiko Kementerian
2. Persiapan Penilaian Mandiri Maturitas Tahun 2025 Pada Tanggal 17 Maret 2025.
3. Pembahasan Rancangan Surat Keputusan Tim SPIP Ditjen PRL Tahun 2024 tanggal 21 Mei 2025
4. Sosialisasi Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko
5. Penyampaian dan Pembahasan Hasil Asistensi MR tahun 2026 oleh Inspektorat Jenderal

6. Bimbingan Teknis penyusunan Manajemen Risiko tahun 2025
 7. Penyusunan Laporan triwulan dan bulanan
 8. Evaluasi Maturitas SPIP oleh BPKP
 9. Penetapan Tim SPIP dan Penyusunan Laporan SPIP DJPRL Tahun 2025
- H. Rencana Aksi Tahun 2026
1. Penetapan Tim SPIP
 2. Penyusunan Laporan SPIP secara berkala

IK 9. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPRL

Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPRL merupakan jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi Unit Eselon I atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan KKP Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi anggaran Unit Eselon I tahun 2024.

Formula perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah nilai temuan BPK pada LK Unit Eselon I Tahun 2024}}{\text{Jumlah realisasi anggaran Unit Eselon I Tahun 2024}} \times 100\%$$

Berikut capaian dan perkembangan IK ini pada Tahun 2025

Tabel 17 Capaian IK Batas tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPRL pada Tahun 2025

SK-1	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut							
IK-9	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPRL							
Tahun 2024	Tahun 2025				Renstra 2025-2029			
Realisasi	Target PK	Capaian	% Capaian (%Kinerjaku)	Kenaikan 2024-2025 (%)	Target 2025	% Capaian 2025	Target 2029	% Capaian 2029
0,044	0,5	0,076	120 (120)	-0,032 (72,73)	0,5	120	0,5	120

- A. Capaian IK Tahun 2025
- Capaian indikator kinerja Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPRL pada tahun 2025 adalah sebesar 0,076 % dari target 0,5% atau tercapai 120% (kinerjaku) sesuai dengan Nota Dinas Inspektur Jenderal Kementerian

Kelautan dan Perikanan Nomor 82/ITJ/RC.610/X/2025 tanggal 7 Oktober 2025 perihal Capaian IKU Batas Tertinggi Nilai Temuan BPK RI atas Laporan Keuangan KKP. temuan dimaksud merupakan temuan atas Laporan Keuangan Ditjen PKRL sebelum bertransformasi menjadi 2 unit Eselon I yaitu Ditjen Penataan Ruang Laut dan Ditjen Pengelolaan Kelautan.

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024
Capaian Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPRL pada Tahun 2025 adalah sebesar 0,076%, dan capaian tahun 2024 adalah sebesar 0,044%, sehingga apabila dibandingkan maka terdapat peningkatan temuan sebesar 0,032%. Adapun rincian perbandingan temuan tahun 2024 dan 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 18 Temuan LHP BPK Tahun 2024 dan 2025 DJPKRL

 2024	Temuan LHP BPK Tahun 2024 dan 2025 DJPKRL	 2025
399.297.824.951	< Realisasi (Rp)* >	471.154.781.232
175.999.847	< Temuan (Rp)* >	357.650.852
0,044	< Persentase >	0,076
0,032	< Selisih >	0,032

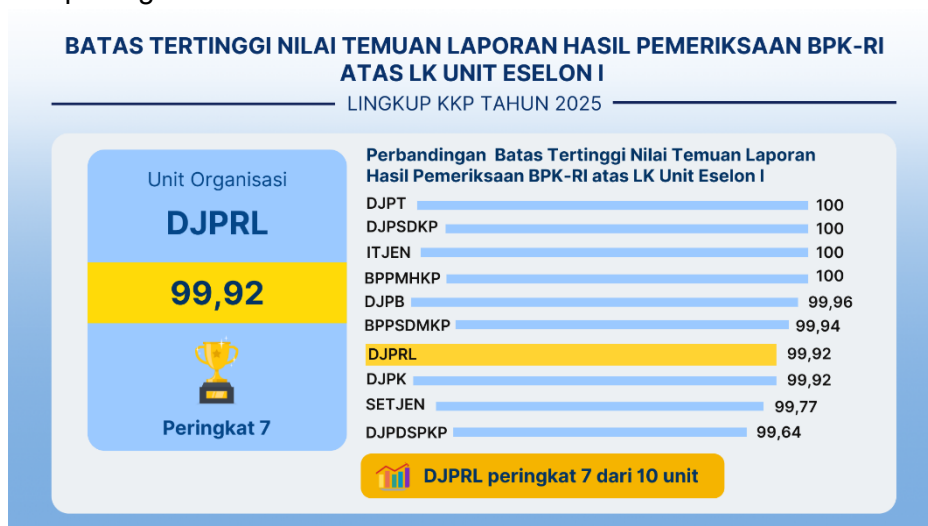
**Realisasi dan temuan T-1*

- C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra DJPRL 2025-2029

Target Renstra DJPRL Tahun 2025–2029 untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 0,5 pada tahun 2029, capaian kinerja pada Tahun 2025 adalah sebesar 0,076, sehingga apabila dilakukan perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan target renstra, maka telah tercapai sebesar 120%.

D. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Organisasi Setara)

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Unit Eselon I Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 disajikan pada gambar berikut :



Gambar 26 Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Unit Eselon I Lingkup KKP Tahun 2025

Indikator kinerja Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPRL tahun 2025 di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan menempati posisi ke 7 besar dari 10 unit organisasi (menggunakan capaian DJPKRL) dilihat dari persentase temuan terkecil.

E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

- Faktor Pendukung Keberhasilan

Adanya komitmen unit kerja dalam pencapaian target dengan realisasi sebesar 120% (Kinerjaku), Tim Pengelola Keuangan sudah berkompeten dan memiliki jabatan fungsional bidang keuangan negara, pelaksanaan belanja dan pengadministrasian keuangan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- Faktor Penghambat Kegagalan dan Kendala

Masih terdapat adanya temuan laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan keuangan DJPKRL tahun 2024.

- Solusi

Telah dilakukan rekonsiliasi atas pengelolaan keuangan antara DJPRL dan DJPK atas pelaksanaan DIPA DJPKRL Tahun 2025 untuk meminimalkan kesalahan administrasi keuangan.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian Indikator Kinerja Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPRL tercapai 120% (kinerjaku), Tim Pengelola keuangan DJPRL merupakan para pegawai yang berkompeten yang menduduki jabatan fungsional bidang keuangan negara, dan dari sisi alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian indikator ini adalah sebesar Rp80.000.000 (layanan manajemen keuangan) yang juga digunakan untuk mendukung pencapaian 5 indikator kinerja lainnya (Nilai IKPA, Rekomendasi Hasil Pengawasan DJPRL, Rekomendasi Hasil Pengawasan Setditjen PRL, Maturitas SPIP dan Laporan SPIP yang disusun), realisasi anggaran sebesar Rp77.569.945 atau 96,96%, masih menunjukkan adanya efisiensi anggaran karena output melampaui target dengan realisasi anggaran yang tidak sepenuhnya terpakai.

Secara kuantitatif sederhana dapat dikalkulasikan pada realisasi alokasi anggaran sebesar 96,96% dan capaian kinerja 100%, sehingga rasio efisiensi kinerja terhadap input anggaran sebesar 123,76% yang menunjukkan efektivitas kinerja tinggi.

G. Kegiatan Pendukung

Pada Tahun 2025, kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan:

1. Rapat Koordinasi Pembahasan Progress TL LHP BPK dan APIP pada DKP Prov dan Kab lingkup DJPKRL
2. Rapat Pembahasan Tindak Lanjut atas LHA Pertanggungjawaban Keuangan dan Realisasi Anggaran Kegiatan LAUTRA TA 2024 dan 2025 pada Satker Lingkup DJPKRL
3. Identifikasi Penetapan Akun Signifikan PIPK pada Entitas Akuntansi lingkup DJPKRL Tahun 2025
4. Entry Meeting Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Itjen TW 1 2025
5. Koordinasi Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK Pemenuhan Data Persediaan & BMN 2024
6. Pembahasan Tanggapan atas konsep temuan BPK RI
7. Pembahasan tindak lanjut temuan BPK dan Itjen sampai dengan tahun 2025.

8. Percepatan penyelesaian tindak lanjut atas sisa temuan yang belum tuntas dengan dilengkapi dengan dokumen pendukung yang relevan dan memadai.

H. Rencana Aksi Tahun 2026

1. Penyusunan Laporan Keuangan DJPKRL tahun 2025
2. Tindak lanjut temuan LHP BPK jika ada

IK 10. Indeks Profesionalitas ASN DJPRL

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Formula Perhitungan:

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$

$$IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$$

$$IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$$

$$IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i

IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

$W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j

$W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k

$W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l

$W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m

Capaian IK Tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 19 Capaian IK Indeks Profesionalitas ASN lingkup DJPRL

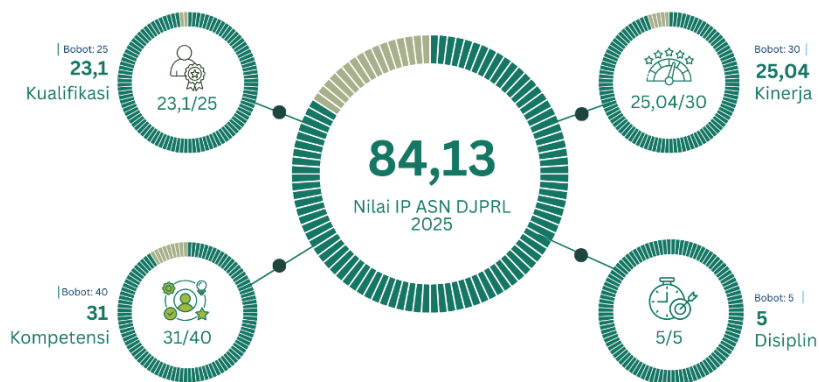
SK-1	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut							
IK-10	Indeks Profesionalitas ASN DJPRL							
Tahun 2024	Tahun 2025				Renstra 2025-2029			
Realisasi	Target PK	Capaian	% Capaian (%Kinerjaku)	Kenaikan 2024-2025 (%)	Target 2025	% Capaian 2025	Target 2029	% Capaian 2029
-	80	84,13	105,16 (105,16)	- (-)	80	105,16	84	100,15

A. Capaian IK Tahun 2025

Indikator kinerja Indeks Profesionalisme ASN (IP ASN) memiliki komponen penilaian dari aspek kualifikasi (bobot 25%), kompetensi (bobot 40%), kinerja (bobot 30%), disiplin (bobot 5%). Capaian indikator kinerja Indeks profesionalitas ASN DJPRL pada periode Semester II tahun 2025 adalah sebesar 84,13 dari target 80 atau tercapai 105,16% sesuai dengan Nota Dinas Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi Nomor 8/SJ.3/TU.210/I/2026 tanggal 4 Januari 2026 perihal Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) di Lingkungan KKP Triwulan IV/Semester II Tahun 2025 dan Target Capaian IP ASN KKP Tahun 2026. Indeks Profesionalisme ASN KKP dapat pula dilihat pada tautan <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2025/eselon>. Adapun rincian IP ASN DJPRL tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 20 Nilai IP ASN DJPRL Tahun 2025

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	Kualifikasi	25	23,1
2	Kompetensi	40	31
3	Kinerja	30	25,04
4	Disiplin	5	5
Indeks		100	84,13



- B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024
 Capaian pada Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 karena indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 dan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut merupakan Unit Kerja baru pada tahun 2025.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra DJPRL 2025-2029
 Target Renstra DJPRL Tahun 2025-2029 untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 80 pada tahun 2025, capaian kinerja pada Tahun 2025 adalah sebesar 84,13, sehingga apabila dilakukan perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan target renstra, maka telah tercapai sebesar 105,16%. Capaian tersebut telah melampaui target Renstra DJPRL Tahun 2025-2029.
 Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2025 adalah sebesar 84,13 termasuk kategori tinggi, hal ini menunjukkan hasil yang sangat optimal dan telah melampaui target tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 80, dengan tingkat capaian sebesar 105,16%. Jika dibandingkan dengan target Renstra 2025–2029, capaian ini tidak hanya memenuhi target awal tahun 2025, tetapi juga telah memenuhi target akhir tahun 2029 yang ditetapkan sebesar 84, sehingga bila dibandingkan telah tercapai 100,15% dari target akhir renstra. Dengan demikian, capaian tahun 2025 mengindikasikan kinerja yang sangat optimal dan berada pada level yang selaras dengan target jangka menengah.
- D. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Organisasi Setara)

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Unit Eselon I Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 disajikan pada gambar berikut:



Gambar 27 . Indeks Profesionalitas ASN Unit Eselon I Lingkup KKP Tahun 2025

Berdasarkan perbandingan hasil pencapaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN, DJPRL memperoleh nilai 84,13 yang berada pada posisi terbawah dibandingkan dengan capaian unit eselon I lainnya. Posisi ini menempatkan DJPRL pada urutan ke 10 unit organisasi lingkup KKP dibawah DJPB. hasil ini mengindikasikan adanya ruang peningkatan dalam peningkatan Indeks Profesionalitas ASN periode berikutnya.

E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

- Faktor Pendukung Keberhasilan

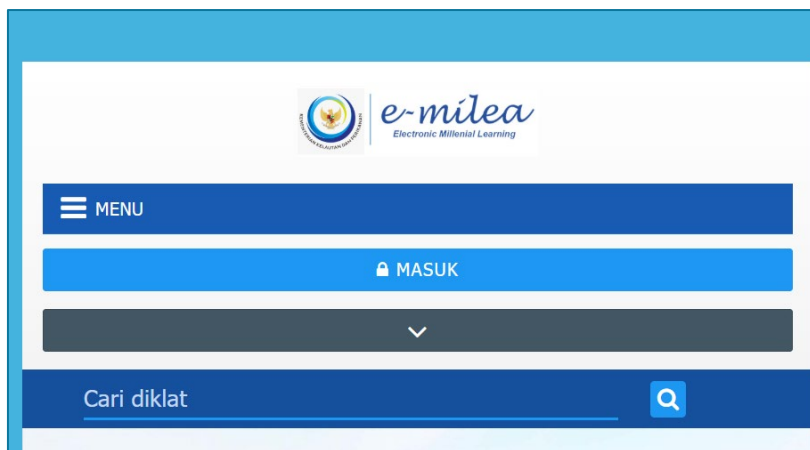
Adanya komitmen unit kerja dalam pencapaian target dengan realisasi sebesar 105,16%, Pengukuran IP ASN telah memanfaatkan teknologi informasi melalui My ASN maupun Portal KKP, Fasilitas elearning melalui eMilia untuk pemenuhan peningkatan kompetensi pegawai.

IP ASN 2025 Dashboard Eselon Pegawai FAQ IP ASN 2024

Silakan ketik Nama Unit Kerja: Cari

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	SEKRETARIAT JENDERAL	547	22.71	90.84 %	34.47	86.17 %	26.18	87.27 %	5	100 %	88.37	TINGGI
2	DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT	126	23.1	92.4 %	31	77.5 %	25.04	83.47 %	5	100 %	84.13	TINGGI
3	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN	581	22.49	89.96 %	33.16	82.9 %	26.2	87.33 %	4.99	99.8 %	86.84	TINGGI
4	DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	1581	22.7	90.8 %	33.59	83.98 %	26.76	89.2 %	4.99	99.8 %	88.04	TINGGI
5	DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA	1195	22.18	88.72 %	31.52	78.8 %	25.68	85.6 %	5	100 %	84.37	TINGGI
6	DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	403	23.45	93.8 %	33.46	83.65 %	25.22	84.07 %	5	100 %	87.13	TINGGI
7	DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1496	22.84	91.36 %	32.24	80.6 %	25.1	83.67 %	4.99	99.8 %	85.17	TINGGI
8	INSPEKTORAT JENDERAL	195	22.59	90.36 %	34.68	86.7 %	25.15	83.83 %	5	100 %	87.42	TINGGI
9	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	4862	22.54	90.16 %	32.87	82.17 %	25.2	84 %	4.99	99.8 %	85.61	TINGGI
10	BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	901	22.85	91.4 %	33.01	82.52 %	25.1	83.67 %	4.98	99.6 %	85.94	TINGGI

Gambar 28 Portal IP ASN KKP



Gambar 29 E Milea KKP

- **Faktor Penghambat Kegagalan dan Kendala**
Beberapa kendala yang menjadi penghambat pencapaian indikator kinerja ini meliputi: Pimpinan belum mengikuti diklatpim, pegawai belum memenuhi diklat wajib 20 jam pelatihan dan juga tidak memperbarui diklat pada myASN.
- **Solusi**
Mendorong pegawai untuk pemenuhan diklat peningkatan kompetensi melalui sarana diklat online eMilea yang telah difasilitasi oleh KKP dan pembaruan diklat pada myASN.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN tercapai 105,16%, pengelolaan IP ASN telah memanfaatkan teknologi informasi melalui portal KKP dan MyASN, dan dari sisi alokasi anggaran yang tersedia untuk mendukung pencapaian indikator ini adalah sebesar Rp80.000.000 (layanan organisasi dan tata kelola internal) yang juga digunakan untuk mendukung pencapaian 3 indikator kinerja lainnya (IP ASN Setditjen PRL, Pemenuhan dokumen RB, dan Pemenuhan dokumen Pelayanan Publik), realisasi anggaran sebesar Rp79.299.906 atau 99,12%, masih menunjukkan adanya efisiensi anggaran karena output melampaui target dengan realisasi anggaran yang tidak sepenuhnya terpakai. Secara kuantitatif sederhana dapat dikalkulasikan pada realisasi alokasi anggaran sebesar 99,12% dan capaian kinerja 105,16%, sehingga rasio efisiensi kinerja terhadap input anggaran sebesar 106,09% yang menunjukkan efektivitas kinerja tinggi.

G. Kegiatan Pendukung

Pada Tahun 2025, kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan:

1. Penyusunan dan Penetapan Rencana Kinerja Pegawai/SKP Tahun 2025 pada aplikasi e-Kinerja BKN lingkup Ditjen PRL.
2. Seleksi Calon Peserta Tugas Belajar.
3. Peremajaan dan Sinkronisasi Data melalui aplikasi SIASN dan e-kinerja BKN serta Verifikasi berkas Usul Kenaikan Pangkat Pegawai.
4. Pelantikan Jabatan Fungsional melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain.
5. Pemantauan kepatuhan Pelaporan LHKPN, LHKASN, dan pelaporan Pajak SPT Tahunan.
6. Penginputan Rencana Aksi, Realiasi dan Upload Bukti Dukung SKP dalam rangka Penilaian SKP Pegawai pada aplikasi e-Kinerja BKN lingkup Ditjen PRL.
7. Updating Data Pegawai melalui aplikasi SIASN BKN dan Approval Data Diklat Pegawai Lingkup Ditjen PRL.
8. Bimbingan Teknis TNA (*Training Need Analysis*) tahun 2025.
9. Approval Data Diklat pemenuhan Diklat 20 JP Pegawai pada IP ASN dan Pengusulan Pencantuman Gelar Pendidikan dan Vokasi Pegawai Lingkup Ditjen PRL.
10. Pelaksanaan Diklat 20 JP melalui MOOC.

11. Pemantauan atas kedisiplinan pegawai melalui *e-presensi*.



Gambar 30 Bimbingan Teknis TNA (Training Need Analysis) Tahun 2025

H. Rencana Aksi Tahun 2026

Akan dilaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, yaitu:

1. Bimtek Pengelolaan Perizinan Dasar.
2. *Training Need Analysis (TNA)* dan Pengisian Gap Kompetensi.
3. Bimtek *Public Speaking* untuk Petugas Pelayanan.
4. Bimtek Pemanfaatan Teknologi AI bidang Pemerintahan.
5. Bimtek ISO SMAP dan ISO Manajemen Mutu.
6. *Coaching* Pengembangan SDM dan Karir Pegawai.
7. *Corporate University* (Pendukung Program Prioritas KKP).
8. Bimtek Penguatan Pengawasan (Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, Benturan Kepentingan, dan Pengendalian Gratifikasi).
9. Diklat Dasar Jabatan Fungsional dan Diklat Struktural/Kepemimpinan.
10. Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja, meliputi dialog kinerja, monev kinerja 2025, reviu dan penilaian SKP
11. Pemantauan pelaksanaan disiplin pegawai/kode etik.

IK 11. Indeks Profesionalitas ASN Setditjen PRL

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Formula Perhitungan:

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$
$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$

$$IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$$

$$IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$$

$$IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i

IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

$W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j

$W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k

$W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l

$W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m

Capaian IK Tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 21 Capaian IK Indeks Profesionalitas ASN Setditjen PRL

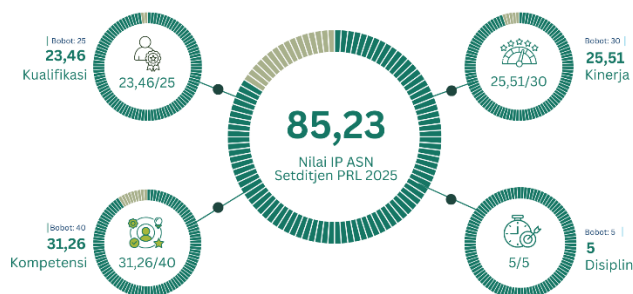
SK-1	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut							
IK-11	Indeks Profesionalitas ASN Setditjen PRL							
Tahun 2024	Tahun 2025				Renstra 2025-2029			
Realisasi	Target PK	Capaian	% Capaian (%Kinerjaku)	Kenaikan 2024-2025 (%)	Target 2025	% Capaian 2025	Target 2029	% Capaian 2029
-	80	85,23	106,54 (106,54)	- (-)	80	106,54	84	101,46

A. Capaian IK Tahun 2025

IK Indeks Profesionalisme ASN (IP ASN) memiliki komponen penilaian dari aspek kualifikasi (bobot 25%), kompetensi (bobot 40%), kinerja (bobot 30%), disiplin (bobot 5%). Capaian indikator kinerja Indeks profesionalitas ASN Setditjen PRL pada periode tahun 2025 adalah sebesar 85,23 dari target 80 atau tercapai 106,54% sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut nomor 39/DJPRL.1/TU.210/I/2026 tanggal 7 Januari 2026 perihal Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) di Lingkungan KKP Triwulan IV/Semester II Tahun 2025 dan Target Capaian IP ASN KKP Tahun 2026. IP ASN KKP dapat dilihat pada tautan <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2025/eselon>. Adapun rincian IP ASN Setditjen PRL tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 22 Nilai IP ASN Setditjen PRL Tahun 2025

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	Kualifikasi	25	23,46
2	Kompetensi	40	31,26
3	Kinerja	30	25,51
4	Disiplin	5	5
Indeks		100	85,23





IP ASN 2025

[Dashboard](#)

[Eselon](#)

[Pegawai](#)

[FAQ](#)

[IP ASN 2024](#)

Silakan ketik Nama Unit Kerj

Cari

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Presentase	IP	Presentase	IP	Presentase	IP	Presentase		
1	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT	40	23,5	94 %	29,98	74,95 %	24,88	82,93 %	5	100 %	83,35	TINGGI
2	DIREKTORAT PERENCANAAN RUANG PERAIRAN	16	22,5	90 %	30,25	75,63 %	24,69	82,3 %	5	100 %	82,44	TINGGI
3	DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	16	23,12	92,48 %	30,42	76,05 %	25,31	84,37 %	5	100 %	83,86	TINGGI
4	DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG KOLOM PERAIRAN DAN DASAR LAUT	25	22,8	90,4 %	27,78	69,45 %	22,8	76 %	5	100 %	78,18	SEDANG
5	DIREKTORAT PEMBINAAN PENATAAN RUANG LAUT	14	23,57	94,28 %	29,93	74,83 %	25,36	84,53 %	5	100 %	83,86	TINGGI
6	DIREKTORAT PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG LAUT	14	21,79	87,16 %	32,73	81,82 %	25,36	84,53 %	5	100 %	84,88	TINGGI

Gambar 31 IP ASN Setditjen PRL Tahun 2025

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024
Capaian pada Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 karena indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 dan Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut merupakan Unit Kerja baru pada tahun 2025
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra DJPRL 2025-2029
Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2025 adalah sebesar 85,23 termasuk kategori tinggi, hal ini menunjukkan hasil yang sangat optimal dan telah melampaui target tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 80, dengan tingkat capaian sebesar 106,54%. Jika dibandingkan dengan target Renstra 2025–2029, capaian ini tidak hanya memenuhi target awal tahun 2025, tetapi juga telah memenuhi target akhir tahun 2029 yang ditetapkan sebesar 84, sehingga bila dibandingkan telah tercapai 101,46% dari target akhir renstra. Dengan demikian, capaian tahun 2025 mengindikasikan

kinerja yang sangat optimal dan berada pada level yang selaras dengan target jangka menengah.

D. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Kerja yang Setara)

Perbandingan capaian indikator kinerja IP ASN level II Lingkup Ditjen PRL Tahun 2025 disajikan pada gambar berikut:



Gambar 32 IP ASN Unit Eselon II Lingkup DJPRL Tahun 2025

Berdasarkan perbandingan hasil pencapaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup DJPRL, Setditjen PRL memperoleh nilai 85,23 yang berada pada posisi teratas dibandingkan dengan capaian unit kerja lainnya. Posisi ini menempatkan Setditjen PRL pada urutan pertama unit kerja lingkup DJPRL. hasil ini mengindikasikan adanya ruang untuk mempertahankan capaian dan peningkatan Indeks Profesionalitas ASN periode berikutnya.

E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

- Faktor Pendukung Keberhasilan

Adanya komitmen unit kerja dalam pencapaian target dengan realisasi sebesar 106,54%, Pengukuran IP ASN telah memanfaatkan teknologi informasi melalui My ASN maupun Portal KKP, Fasilitasi elearning melalui eMilia untuk pemenuhan peningkatan kompetensi pegawai.

- Faktor Penghambat Kegagalan dan Kendala
Beberapa kendala yang menjadi penghambat pencapaian indikator kinerja ini meliputi: pegawai belum memenuhi diklat wajib 20 jam pelatihan dan juga tidak memperbarui diklat pada myASN.
- Solusi
Mendorong pegawai untuk pemenuhan diklat peningkatan kompetensi melalui sarana diklat online eMilea yang telah difasilitasi oleh KKP dan pembaruan diklat pada myASN.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN tercapai 106,54%, pengelolaan IP ASN telah memanfaatkan teknologi informasi melalui portal KKP dan MyASN, maupun penyediaan peningkatan kompetensi melalui *e-learning* dan dari sisi alokasi anggaran yang tersedia untuk mendukung pencapaian indikator ini adalah sebesar Rp80.000.000 (layanan organisasi dan tata kelola internal) yang juga digunakan untuk mendukung pencapaian 3 indikator kinerja lainnya (IP ASN DJPRL, Pemenuhan dokumen RB, dan Pemenuhan dokumen Pelayanan Publik), realisasi anggaran sebesar Rp79.299.960 atau 99,12%, masih menunjukkan adanya efisiensi anggaran karena output melampaui target dengan realisasi anggaran yang tidak sepenuhnya terpakai.

Secara kuantitatif sederhana dapat dikalkulasikan pada realisasi alokasi anggaran sebesar 99,12% dan capaian kinerja 106,54%, sehingga rasio efisiensi kinerja terhadap input anggaran sebesar 107,48% yang menunjukkan efektivitas kinerja tinggi.

G. Kegiatan Pendukung

Pada Tahun 2025, kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan:

1. Penyusunan dan Penetapan Rencana Kinerja Pegawai/SKP Tahun 2025 pada aplikasi e-Kinerja BKN lingkup Ditjen PRL.
2. Seleksi Calon Peserta Tugas Belajar.
3. Peremajaan dan Sinkronisasi Data melalui aplikasi SIASN dan e-kinerja BKN serta Verifikasi berkas Usul Kenaikan Pangkat Pegawai.
4. Pelantikan Jabatan Fungsional melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain.

5. Pemantauan kepatuhan Pelaporan LHKPN, LHKASN, dan pelaporan Pajak SPT Tahunan.
6. Penginputan Rencana Aksi, Realiasi dan Upload Bukti Dukung SKP dalam rangka Penilaian SKP Pegawai pada aplikasi e-Kinerja BKN lingkup Ditjen PRL.
7. Updating Data Pegawai melalui aplikasi SIASN BKN dan Approval Data Diklat Pegawai Lingkup Ditjen PRL.
8. Bimbingan Teknis TNA (*Training Need Analysis*) tahun 2025.
9. Approval Data Diklat pemenuhan Diklat 20 JP Pegawai pada IP ASN dan Pengusulan Pencantuman Gelar Pendidikan dan Vokasi Pegawai Lingkup Ditjen PRL.
10. Pelaksanaan Diklat 20 JP melalui MOOC.
11. Pemantauan atas kedisiplinan pegawai melalui *e-presensi*.
12. Pengusulan Pencantuman Gelar Pendidikan dan Vokasi Pegawai Lingkup Ditjen PRL.



Gambar 33 Bimbingan Teknis Peningkatan Pelayanan Publik Tahun 2025

H. Rencana Aksi Tahun 2026

1. Pelatihan Ragam Disabilitas dan Bahasa Isyarat.
2. Pemutakhiran Data dan Informasi pada SIPPN PANRB.
3. ISO SMAP dan ISO Manajemen Mutu.
4. Pelayanan Prima.
5. Pembangunan Zona Integritas (Pengisian LKE)
6. Bimtek Pengelolaan Perizinan Dasar.
7. *Training Need Analysis (TNA)* dan Pengisian Gap Kompetensi.
8. Bimtek *Public Speaking* untuk Petugas Pelayanan.
9. Bimtek Pemanfaatan Teknologi AI bidang Pemerintahan.
10. *Coaching* Pengembangan SDM dan Karir Pegawai.

12. *Corporate University* (Pendukung Program Prioritas KKP).
13. Bimtek Penguatan Pengawasan (Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, Benturan Kepentingan, dan Pengendalian Gratifikasi).
14. Diklat Dasar Jabatan Fungsional dan Diklat Struktural/Kepemimpinan.
15. Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja, meliputi dialog kinerja, monev kinerja 2025, revidi dan penilaian SKP.
16. Pemantauan pelaksanaan disiplin pegawai/kode etik.

IK 12. Persentase Pemenuhan Dokumen Reformasi Birokrasi yang Diselesaikan sesuai Ketentuan

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah instrument alat (*tools*) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional.

RB menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahan Presiden tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*).

Tujuan RB adalah Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pelaksanaan RB memiliki dua sasaran utama yakni RB General dan RB Tematik.

Dokumen RB adalah dokumen yang terkait dengan rangkaian kegiatan dalam rangka melaksanakan RB General dan RB Tematik di lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut.

Dokumen RB terdiri dari:

- 1) Dokumen rencana kerja RB Tematik
- 2) Dokumen monitoring RB Tematik.

Formula Perhitungan:

$$\frac{\text{jumlah dokumen RB yang diselesaikan}}{\text{jumlah dokumen RB yang ditentukan}} \times 100\%$$

Berikut capaian dan perkembangan IK ini pada Tahun 2025

Tabel 23 Capaian IK Persentase Pemenuhan Dokumen Reformasi Birokrasi yang Diselesaikan sesuai Ketentuan

SK-1	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut							
IK-12	Persentase Pemenuhan Dokumen Reformasi Birokrasi yang Diselesaikan sesuai Ketentuan							
Tahun 2024	Tahun 2025				Renstra 2025-2029			
Realisasi	Target PK	Capaian	% Capaian (%Kinerjaku)	Kenaikan 2024-2025 (%)	Target 2025	% Capaian 2025	Target 2029	% Capaian 2029
-	100	100	100 (100)	- (-)	-	-	-	-

A. Capaian IK Tahun 2025

Capaian indikator kinerja Persentase pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi yang diselesaikan sesuai ketentuan tahun 2025 adalah sebesar 100% dari target 100% sesuai dengan Nota Dinas ketua Tim Kerja SDM Aparatur dan Organisasi Nomor 90/DJPRL.1/OT.730/I/2026 tanggal 13 Januari 2026 Hal Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan Dokumen Reformasi Birokrasi. Indikator Kinerja (IK) ini pada tahun 2025 adalah Persentase pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi yang diselesaikan sesuai ketentuan. Capaian IK Persentase Pemenuhan Dokumen Reformasi Birokrasi yang Diselesaikan sesuai Ketentuan Tahun 2025 merupakan capaian yang didapatkan dari pelaksanaan RB Tematik Ditjen PRL yaitu tema **realisasi investasi** dengan sasaran meningkatnya investasi kelautan dan perikanan. IK ini memiliki target dan capaian tahunan dan telah tercapai 100%, melalui pemenuhan dokumen dari kegiatan-kegiatan:

1. Fasilitasi Perizinan/Layanan Pendampingan Perizinan Pemanfaatan Ruang/Dasar Laut.
2. Pemberian Rekomendasi Pengelolaan KKPRL melalui Penerbitan Dokumen Perizinan.
3. Penilaian Laporan Tahunan KKPRL.

4. Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi SDM Layanan Perizinan
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024
Capaian kinerja pada Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2024, IK ini merupakan IK baru pada tahun 2025.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra DJPRL 2025-2029
Capaian Kinerja Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan karena tidak ada di dalam target renstra 2025-2029.
- D. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Kerja Setara)
Tidak ada target nasional atau target di unit kerja lain untuk Persentase pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi yang diselesaikan sesuai ketentuan tahun 2025, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target nasional.
- E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi
- Faktor Pendukung Keberhasilan
Pencapaian indikator ini karena Ditjen PRL terlibat aktif pada monev yang dilaksanakan oleh PIC RB tingkat KKP, aktif berkoordinasi dengan Direktorat teknis terkait pemenuhan dokumen dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan, serta memanfaatkan penyimpanan arsip bersama secara digital.
 - Faktor Penghambat
Indikator kinerja ini telah digunakan pada level I
 - Solusi
Direkomendasikan indikator kinerja ini tidak lagi digunakan pada periode berikutnya, dikarenakan sudah digunakan pada level I.
- F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Pencapaian Indikator Kinerja Persentase pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi yang diselesaikan sesuai ketentuan tercapai 100%, pemanfaatan teknologi untuk koordinasi dengan Direktorat lingkup Ditjen PRL dan antar tim kerja lingkup Setditjen PRL, rapat-rapat dan kegiatan pemantauan/monev melalui zoom. Penyimpanan dokumen-dokumen terkait reformasi birokrasi dilakukan secara digital melalui https://heylink.me/RB_KKP/ dan informasi melalui persuratan dengan memanfaatkan portal.kkp.go.id. dan dari sisi

alokasi anggaran yang tersedia untuk mendukung pencapaian indikator ini adalah sebesar Rp80.000.000 (layanan organisasi dan tata kelola internal) yang juga digunakan untuk mendukung pencapaian 3 indikator kinerja lainnya (IP ASN DJPRL, IP ASN Setditjen PRL, dan Pemenuhan dokumen Pelayanan Publik), realisasi anggaran sebesar Rp79.299,906 atau 99,12%, masih menunjukkan adanya efisiensi anggaran karena output melampaui target dengan realisasi anggaran yang tidak sepenuhnya terpakai. Secara kuantitatif sederhana dapat dikalkulasikan pada realisasi alokasi anggaran sebesar 99,12% dan capaian kinerja 100%, sehingga rasio efisiensi kinerja terhadap input anggaran sebesar 100,88% yang menunjukkan efektivitas kinerja tinggi.

G. Kegiatan Pendukung

Pada Tahun 2025, kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan:

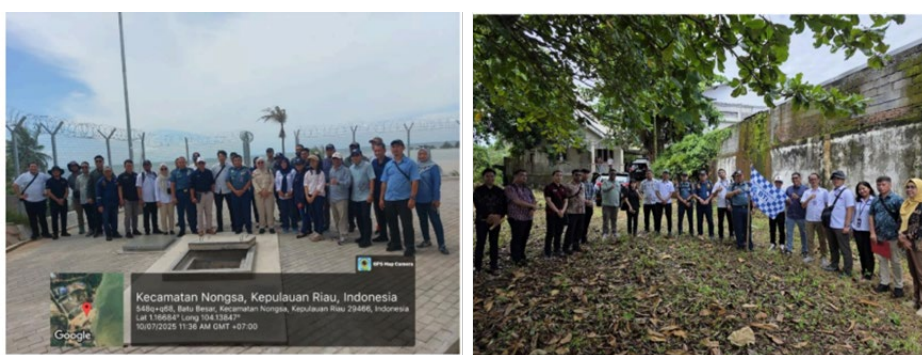
1. Pelayanan Pra Pendaftaran Penyelenggaraan KKPRL.
2. Penilaian Permohonan KKPRL.
3. Pengelolaan Data KKPRL.
4. Pelaksanaan Monitoring Sistem OSS.
5. Koordinasi Pemanfaatan Ruang Laut Nasional dan Internasional.
6. Pelaksanaan Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Sertifikasi, dan Pelatihan.

H. Rencana Aksi Tahun 2026

1. Layanan Pendampingan Perizinan Pemanfaatan Ruang Kolom dan Dasar Laut baik *online* maupun *offline* dari pusat maupun dari UPT di wilayah kerja lingkup Ditjen PRL.
2. Pemberian Rekomendasi Pengelolaan KKPRL melalui Penerbitan Dokumen Perizinan.
3. Penilaian Laporan Tahunan KKPRL.
4. Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi SDM Layanan Perizinan.



Gambar 34 Rapat Koordinasi Penyusunan Ocean Satellite Accounts (OSA) dan Rapat Pembahasan Penerbitan PKKPRL Otomatis Pasca Bayar



Gambar 35 Identifikasi Lapangan Rencana Penggelaran SKKL BTI Cable System dan Identifikasi Lapangan Rencana Penggelaran LitUp Network

IK 13. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data DJPRL

Tingkat kepatuhan pengelolaan data kelautan dan perikanan adalah penilaian terhadap pencapaian kepatuhan dalam pengelolaan di laman satu data KKP. Secara umum parameter penilaian tingkat kepatuhan pengelolaan data kelautan dan perikanan yang termasuk ke dalam kategori tidak patuh, cukup patuh, patuh dan sangat patuh mencakup 3 (tiga) variabel perhitungan, yaitu:

1. Persentase Jumlah Pelaku Usaha KP yang Terintegrasi (X1), Bobot Nilai 30%.
2. Persentase Data Produksi KP yang Tervalidasi (X2), Bobot Nilai 40%.
3. Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi (X3), Bobot Nilai 30%.

Namun demikian, di lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut tidak memiliki indikator jumlah pelaku usaha KP dan data produksi KP,

sehingga yang dihitung sebagai indikator hanya realisasi data geospasial yang terintegrasi. Persentase realisasi data geospasial yang terintegrasi lingkup DJPRL diukur dari capaian tingkat kematangan Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dan Peta Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ-KAW).

Target capaian Data Geospasial lingkup DJPRL tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 24 Target Capaian Data Geospasial lingkup DJPRL tahun 2025

No	Nama IGT	Tingkat Kematangan Eksisting	Target
1	Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut	3	4
2	Peta Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah	3	4

Terdapat 5 (lima) ukuran tingkat kematangan data geospasial DJPRL yang Terjamin dengan bobotnya, yaitu:

- 1) Tingkat Kematangan 1 : Telah dilakukan perencanaan dan rapat koordinasi
- 2) Tingkat Kematangan 2 : Telah dilakukan pengumpulan data
- 3) Tingkat Kematangan 3 : Telah dilakukan produksi peta/pengolahan data yang terstandar
- 4) Tingkat Kematangan 4 : Telah dilakukan kontrol dan evaluasi kualitas
- 5) Tingkat Kematangan 5 : Telah dilakukan penjaminan kualitas dan penyebarluasan/ berbagi pakai

Formula Perhitungan: **Persentase TKPD: X1 + X2 + X3**

Adapun kriteria penilaiannya adalah :

Nilai TKPD 0 % - 25,9 % (tidak patuh)

Nilai TKPD 26 % - 50,9 % (cukup patuh)

Nilai TKPD 51 % - 75,9 % (patuh)

Nilai TKPD 76 % - 100 % (sangat patuh)

Rumus Variabel Persentase Jumlah Pelaku Usaha KP yang Terintegrasi KUSUKA (X1):

$$\sum KUSUKA = \left(\frac{\text{Jumlah Pelaku Usaha KP yang telah Valid, Terdaftar, Termutakhirkan}}{\text{Total Target}} \right) \times 100$$

Rumus Variabel Persentase Data Produksi KP yang Tervalidasi (X_2):

$$X = \left(\frac{\text{Realisasi jumlah sampling yang divalidasi}}{\text{Jumlah data sampling produksi garam yang diinput}} \right)$$

Rumus Variabel Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi (X_3)

$$\text{Nilai per eselon 1} = \left(\frac{\text{jumlah rencana aksi yang diselesaikan}}{\text{total kegiatan berdasarkan rencana aksi}} \right) \times 100$$

Berikut capaian dan perkembangan IK ini pada Tahun 2025

Tabel 25 Capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data DJPRL

SK-1	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut							
IK-13	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data DJPRL							
Tahun 2024	Tahun 2025				Renstra 2025-2029			
Realisasi	Target PK	Capaian	% Capaian (%Kinerjaku)	Kenaikan 2024-2025 (%)	Target 2025	% Capaian 2025	Target 2029	% Capaian 2029
-	91	100	109,89 (109,89)	- (-)	91	109,89	91	109,89

A. Capaian IK Tahun 2025

Capaian indikator kinerja Tingkat kepatuhan pengelolaan data DJPRL Tahun 2025 adalah sebesar 100% dari target 91% atau tercapai 109,89% sesuai dengan Nota Dinas Kepala Pusat Data dan Informasi Nomor 170/SJ.8/TU.140/I/2026 Tanggal 14 Januari 2026 Hal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Mandatory Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data (TKPD) Kelautan dan Perikanan di Lingkungan KKP Tahun 2025

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024

Capaian indikator kinerja Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 karena indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025, dan Ditjen PRL merupakan unit kerja baru yang dibentuk tahun 2025.

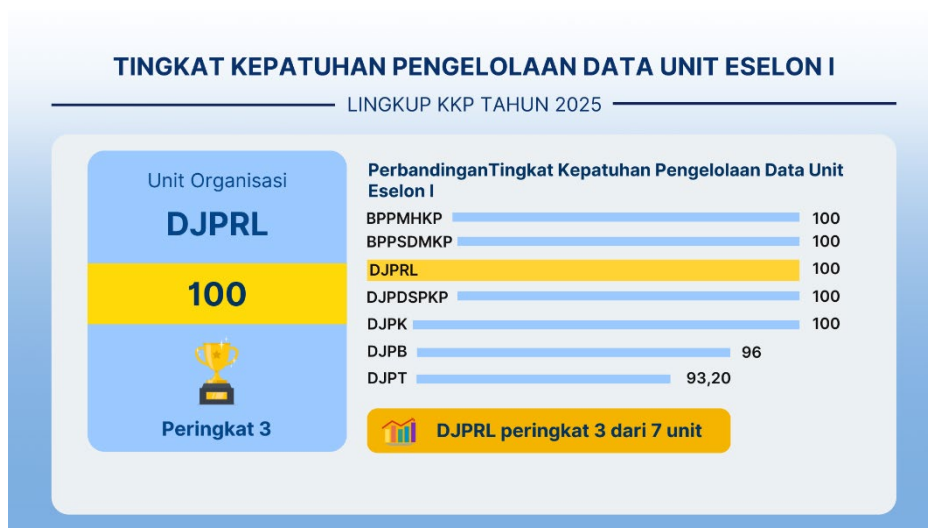
C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra DJPRL 2025-2029

Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2025 adalah sebesar 100 termasuk kategori tinggi, hal ini menunjukkan hasil yang sangat optimal dan telah melampaui target tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 91, dengan tingkat capaian sebesar 109,89%. Jika

dibandingkan dengan target Renstra 2025–2029, capaian ini tidak hanya memenuhi target awal tahun 2025, tetapi juga telah memenuhi target akhir tahun 2029 yang ditetapkan sebesar 91, sehingga bila dibandingkan telah tercapai 109,89% dari target akhir renstra. Dengan demikian, capaian tahun 2025 mengindikasikan kinerja yang sangat optimal dan berada pada level yang selaras dengan target jangka menengah.

D. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Organisasi Setara)

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Tingkat kepatuhan pengelolaan data Unit Eselon I Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 disajikan pada gambar berikut:



Gambar 36 Tingkat kepatuhan pengelolaan data Unit Eselon I Lingkup KKP Tahun 2025

Berdasarkan perbandingan hasil pencapaian indikator kinerja Tingkat kepatuhan pengelolaan data, DJPRL memperoleh nilai 100 yang berada pada posisi atas bersama 4 unit organisasi lainnya yang memperoleh nilai sempurna. Hasil ini mengindikasikan adanya ruang komitmen dalam kepatuhan pengelolaan data di lingkungan KKP, dan ini menjadi modal awal untuk mempertahankan capaian pada periode berikutnya.

E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

- Faktor Pendukung Keberhasilan

Tersusunnya form kontrol kualitas (QC) dan form evaluasi kualitas (EQ) untuk IG KKPRL dan IG RZ-KAW.

- Faktor Penghambat
Terdapat kendala dalam penyusunan form QC dan QE membutuhkan waktu lama karena personil dari unit kerja terkait yang mengerjakan berganti sehubungan dengan pembentukan Ditjen PRL sebagai unit organisasi Eselon I baru.
- Solusi
kegiatan pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial oleh Badan Informasi Geospasial.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian Indikator Kinerja Tingkat kepatuhan pengelolaan data DJPRL tercapai 109,89%, melibatkan seluruh Satker Pusat dan UPT dalam penyusunan dan pelaksanaan QC/QE. dan dari sisi alokasi anggaran yang tersedia untuk mendukung pencapaian indikator ini adalah sebesar Rp80.000.000 (layanan kerjasama sub bidang penataan ruang laut) yang juga digunakan untuk mendukung pencapaian 3 indikator kinerja lainnya (Pengelolaan Data PRL, Kerjasama yang disepakati, dan Pemenuhan kertas posisi) , realisasi anggaran sebesar Rp79.454.090 atau 99,32%, masih menunjukkan adanya efisiensi anggaran karena output melampaui target dengan realisasi anggaran yang tidak sepenuhnya terpakai. Secara kuantitatif sederhana dapat dikalkulasikan pada realisasi alokasi anggaran sebesar 99,32% dan capaian kinerja 109%, sehingga rasio efisiensi kinerja terhadap input anggaran sebesar 110,64% yang menunjukkan efektivitas kinerja tinggi.

G. Kegiatan Pendukung

Pada Tahun 2025, kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan:

1. User Acceptance Test (UAT) Modul Produksi dan Valnas Lingkup DJPKRL tanggal 7 Januari 2025
2. Sosialisasi Portal Data KKP Modul Kusuka tanggal 15 - 17 Januari 2025
3. Penyusunan Metadata dan Target Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) Lingkup DJPKRL 30-31 Jan 2025 \
4. Rapat Koordinasi Pendataan Kusuka pada tanggal 5 Maret 2025
5. Asistensi Pemutakhiran Informasi Geospasial Tematik (IGT) Lingkup DJPKRL pada Portal Data KKP Modul Satu Peta 12 Maret 2025.

6. Validasi KUSUKA petambak garam dari 12 Kabupaten/Kota di 6 Provinsi.
7. Validasi produksi garam tahun 2024, data petambak garam, luas lahan, dan produksi garam
8. Pembaruan Data Rencana Tata Ruang Laut/Rencana Zonasi (Materi Teknis Ruang Perairan RTRWP) dalam Portal Data KKP
9. Validasi Nasional Satu Data KP Tahun 2024 semester II
10. Pemutakhiran Daftar IGT lingkup DJPRL
11. Penyusunan Draft Spesifikasi Produk Data IG RZ KSNT dalam Pembinaan IGT KKP oleh BIG
12. Pembahasan IKU TKPD
13. Pembahasan IGT Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut/ KKPRL
14. Pembahasan Publikasi RTRWP Ruang Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada Portal Data KKP
15. Pembinaan IGT oleh BIG - Pendampingan Manajemen Kualitas
16. Rakornas IG Tahun 2025
17. Pembinaan IGT oleh BIG - Pendampingan Penyusunan dan Pemutakhiran Spesifikasi Produk Data (SPD)
18. Koordinasi Kompilasi dan Integrasi IGT yang merupakan program Prioritas Nasional 2025-2029
19. Koordinasi Data IGT BPSPL Serang - Wilker Semarang
20. Pembahasan IGT KSNT Cadangan Karbon Biru
21. Pembahasan Standar Data Informasi Geospasial Tematik lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
22. Pembahasan progres dan perbaikan Modul Satu Peta Portal Data Kementerian Kelautan dan Perikanan
23. Pembinaan IGT oleh BIG - Pendampingan Penyusunan Spesifikasi Produk Data (SPD) dan Manajemen Kualitas IGT
24. Koordinasi Penjaminan Kualitas IGT Materi Teknis Perairan Pesisir Pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (KKPRL RTRWP)
25. Penyampaian Hasil Kontrol Kualitas dan Evaluasi Kualitas Informasi Geospasial KKPRL RTRWP
26. Sosialisasi Standar Informasi Geospasial.
27. Pelatihan Sistem Informasi Geospasial tematik Estimasi Karbon Biru Mangrove dan Lamun
28. Pembahasan Roadmap Pengembangan Sistem Informasi DJPRL

H. Rencana Aksi Tahun 2026

1. Pelaksanaan QC/QE IG KKPRL dan IG RZ-KAW
2. Penyusunan Rencana Aksi IGT lingkup DJPRL tahun 2026

IK 14. Persentase Dokumen Pengelolaan Data Penataan Ruang Laut yang Dihasilkan

Dokumen Pengelolaan Data Penataan Ruang Laut adalah dokumen yang berisi kumpulan data terkait lingkup tugas dan fungsi DJPRL. Dokumen ini disusun dan dikumpulkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Komponen Utama:

1. Data DJPRL Dalam Angka yang tercantum dalam buku KPDA DJPKRL (Kelautan dan Perikanan dalam Angka): Dokumen tahunan yang menyajikan data statistik terkait kegiatan dan capaian DJPRL. Berfungsi sebagai sumber informasi kuantitatif untuk evaluasi dan perencanaan.
2. Album Peta RZ-KAW: Dokumen visual yang memuat peta – peta terkait Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ-KAW). Menyediakan representasi spasial untuk mendukung perencanaan dan pengawasan.

Formula Perhitungan:

$$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Jumlah dokumen yang disusun dan diterbitkan}}{\text{Target dokumen tahunan}} \right) \times 100\%$$

Berikut capaian dan perkembangan IK ini pada Tahun 2025

Tabel 26 Capaian IK Persentase Dokumen Pengelolaan Data Penataan Ruang Laut yang Dihasilkan

SK-1	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut							
IK-14	Persentase Dokumen Pengelolaan Data Penataan Ruang Laut yang Dihasilkan							
Tahun 2024	Tahun 2025				Renstra 2025-2029			
Realisasi	Target PK	Capaian	% Capaian (%Kinerjaku)	Kenaikan 2024-2025 (%)	Target 2025	% Capaian 2025	Target 2029	% Capaian 2029
-	100	100	100 (100)	- (-)	-	-	-	-

- A. Capaian IK Tahun 2025
Capaian indikator kinerja Persentase Dokumen Pengelolaan Data Penataan Ruang Laut yang Dihasilkan tahun 2025 adalah sebesar 100% dari target 100% sesuai dengan Nota Dinas Ketua Tim Kerja Sama dan Data Nomor 88/DJPRL.1/TU.140/I/2026 tanggal 13 Januari 2026 hal Laporan Capaian Indikator Kinerja Persentase Dokumen Pengelolaan Data Penataan Ruang Laut yang Dihasilkan Tahun 2025.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024
Capaian indikator kinerja Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 karena indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025, dan Ditjen PRL merupakan unit kerja baru yang dibentuk tahun 2025.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra DJPRL 2025-2029
Capaian Kinerja Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan karena tidak terdapat di dalam target renstra 2025-2029.
- D. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Organisasi Setara)
Tidak ada target nasional atau target di unit kerja lain untuk Indikator kinerja Persentase Dokumen Pengelolaan Data Penataan Ruang Laut yang Dihasilkan, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target nasional.
- E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi
- Faktor Pendukung Keberhasilan
Komitmen unit kerja dalam pengelolaan data, dikerjakan oleh SDM yang kompeten dibidang data.
 - Faktor Penghambat
Indikator kinerja ini merupakan kontribusi dalam pencapaian indikator kinerja tingkat kepatuhan pengelolaan data.
 - Solusi
Direkomendasikan indikator kinerja ini tidak lagi digunakan pada periode berikutnya, selain tidak terdapat pada renstra, tetapi juga perhitungan capaian merupakan bagian dari pencapaian indikator kinerja tingkat kepatuhan pengelolaan data.
- F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Dokumen Pengelolaan Data Penataan Ruang Laut yang Dihasilkan tercapai 100% dan dari sisi alokasi anggaran yang tersedia untuk mendukung pencapaian

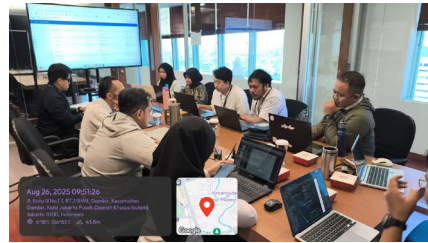
indikator ini adalah sebesar Rp80.000.000 (layanan kerjasama sub bidang penataan ruang laut) yang juga digunakan untuk mendukung pencapaian 3 indikator kinerja lainnya (Tingkat kepatuhan pengelolaan data, Kerjasama yang disepakati, dan Pemenuhan kertas posisi) , realisasi anggaran sebesar Rp79.454.090 atau 99,32%, masih menunjukkan adanya efisiensi anggaran karena output melampaui target dengan realisasi anggaran yang tidak sepenuhnya terpakai.

Secara kuantitatif sederhana dapat dikalkulasikan pada realisasi alokasi anggaran sebesar 99,32% dan capaian kinerja 100%, sehingga rasio efisiensi kinerja terhadap input anggaran sebesar 100,68% yang menunjukkan efektivitas kinerja tinggi.

G. Kegiatan Pendukung

Pada Tahun 2025, kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan:

1. Identifikasi Data Utama Pada Tahun 2025 telah dilaksanakan lingkup DJPRL dan Pembahasan Ocean Monitoring System (OMS) LAUTRA
2. Pembahasan Standar Data Lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan
3. Rapat Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN GPI) 2024-2030
4. Identifikasi Data Utama lingkup DJPK dan DJPRL Tahun 2025 (9 jul)
5. Rapat Koordinasi dan Identifikasi Ketersediaan Data dalam rangka Penyusunan Ocean Satellite Accounts/ OSA
6. Rapat Pemenuhan Dokumen PUG Es. I lingkup KKP Semester I Tahun 2025
7. Pengembangan Sistem Informasi DJPRL
8. Pembahasan Rancangan Kepmen KP tentang Data Utama lingkup KKP
9. Penyusunan Laporan Nasional Implementasi Konvensi Keanekaragaman Hayati ke-7/ NATREP 7
10. Evaluasi Penyelenggaraan PUG Tahun 2024 (Penganugerahan Parahita Ekapraya Tahun 2025)
11. Sosialisasi Penjelasan Pengisian Matriks Evaluasi PUG 2024 oleh Kemen PP/PA
12. Rapat Finalisasi Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Data Utama di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.



Gambar 37 Kegiatan Koordinasi Penjaminan Kulaitas IGT Materi Teknis Perairan Pesisir pada RTRWP



Gambar 38 Identifikasi Data Utama lingkup DJPRL dan Pembahasan OMS LAUTRA

H. Rencana Aksi Tahun 2026

1. Penyusunan KPDA DJPRL tahun 2025
2. Penyusunan Album Peta DJPRL

IK 15. Presentase Dokumen Kerja Sama yang Disepakati

Kerja Sama adalah kegiatan yang dilakukan oleh KKP dengan satu atau lebih lembaga/badan/organisasi, untuk mendukung kinerja KKP. Pelaksanaan kerja sama di lingkungan KKP berpedoman pada Permen KP Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kerja sama dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- 1) Mengutamakan kepentingan nasional;
- 2) Kejelasan tujuan dan hasil;
- 3) Kemitraan, kesetaraan, dan kebersamaan;
- 4) Saling menghargai dan menguntungkan;
- 5) Menjunjung asas musyawarah untuk mufakat;
- 6) Tidak menimbulkan ketergantungan;
- 7) Terencana dan berkelanjutan;

- 8) Dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal;
- 9) Berbasis indikator, kinerja, efektif dan efisien; dan
- 10) Bersifat kelembagaan.

Pelaksanaan kerjasama bidang Penataan Ruang Laut meliputi kerjasama nasional dan internasional. Kerja Sama nasional meliputi kerja sama yang dilakukan DJPRL dengan Kementerian dan lembaga pemerintah non Kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga non pemerintah. Kerja sama internasional meliputi kerja sama bilateral, regional, maupun multilateral dengan negara asing, organisasi internasional pemerintah, organisasi internasional non pemerintah, dan organisasi/lembaga asing. Untuk mencapai sasaran dan target program Penataan Ruang Laut, DJPRL memerlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak di dalam negeri seperti Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, swasta, perguruan tinggi, organisasi profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ataupun kelompok masyarakat. Penguatan dukungan dalam berbagai bentuk kerja sama dari luar negeri tidak luput dari sasaran potensial mitra kerja sama dalam akselerasi pencapaian program Penataan Ruang Laut. Kerja sama luar negeri dapat dijalin melalui kerja sama bilateral, regional, multinasional, lembaga internasional di bawah Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Lembaga Donor, Non Government Organization (NGO) asing, maupun Organisasi Masyarakat Asing (Ormas Asing).

Formula Perhitungan:

Membandingkan antara jumlah dokumen kerja sama yang ditandatangani sampai dengan Desember 2025 dengan jumlah dokumen kerja sama yang diusulkan periode April – Oktober 2025. Adapun penghitungannya dengan dengan rumus:

$$\frac{a}{b} \times 100\%$$

Keterangan:

a = Jumlah dokumen kerja sama yang ditandatangani

b = Jumlah dokumen kerja sama yang diusulkan.

Berikut capaian dan perkembangan IK ini pada Tahun 2025

Tabel 27 Capaian IK Presentase Dokumen Kerja Sama yang Disepakati

SK-1	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut							
IK-15	Presentase Dokumen Kerja Sama yang Disepakati							
Tahun 2024	Tahun 2025				Renstra 2025-2029			
Realisasi	Target PK	Capaian	% Capaian (%Kinerjaku)	Kenaikan 2024-2025 (%)	Target 2025	% Capaian 2025	Target 2029	% Capaian 2029
-	90	100	111,11 (111,11)	- (-)	-	-	-	-

A. Capaian IK Tahun 2025

Capaian indikator kinerja Persentase Dokumen Kerja Sama yang Disepakati tahun 2025 adalah sebesar 100% dari target 90% atau tercapai 111,11% sesuai dengan Nota Dinas Ketua Tim Kerja Sama dan Data Nomor 14/DJPRL.1/TU.140/I/2026 tanggal 5 Januari 2026 perihal Laporan Capaian Indikator Kinerja Kerja Sama Tahun 2025. Adapun kerjasama yang disepakati pada tahun 2025 adalah sebanyak 9 perjanjian kerja sama dengan mitra sebagai berikut:

1. Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen PRL dengan Yayasan WWF Indonesia tentang Dukungn Penataan Ruang Laut yang Berkelanjutan, yang ditanda-tangani pada tanggal 15 Mei 2028;
2. Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen PRL dengan PT Danareksa (Persero) tentang Peningkatan Kapasitas Ekonomi dan Komersialisasi Kawasan Ekonomi dalam Penataan Wilayah Pesisir dan Laut, yang ditanda-tangani pada tanggal 15 Juli 2025;
3. Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen PRL dengan Yayasan Konservasi Cakrawala Indonesia tentang Dukungan Penataan Ruang Laut dan Pengembangan Kawasan Ekosistem Karbon Biru, yang ditanda-tangani pada tanggal 15 Juli 2025;
4. Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen PRL dengan PT Informasi Geo Sistem tentang Pengembangan Sistem Pemantauan Laut dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Bidang Penataan Ruang Laut, yang ditanda-tangani pada tanggal 10 September 2025;
5. Perjanjian Kerja Sama antara Setditjen PRL bersama PT Bank BNI (Persero) tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Produk dan Layanan Perbankan dalam Mendukung Program Penataan Ruang Laut, yang ditanda-tangani pada tanggal 9 Oktober 2025;

6. Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen PRL bersama Institut Teknologi Nasional Malang tentang Dukungan Penataan Ruang Laut melalui Penerapan Tridharma Perguruan Tinggi, yang ditanda tangani tanggal 15 Oktober 2025;
 7. Perjanjian Kerja Sama antara Sekretaris Jenderal KKP bersama Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL tentang Sinergitas Data dan/atau Informasi Bidang Kelautan, Perikanan, Survei dan Pemetaan Hidro-Oseanografi, yang ditanda-tangani pada tanggal 15 Oktober 2025;
 8. Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen PRL bersama Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran tentang Peningkatan dan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut melalui Tridharma Perguruan Tinggi, yang ditanda-tangani pada tanggal 17 Oktober 2025;
 9. Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen PRL bersama Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta tentang Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Bidang Penataan Ruang Laut Melalui Penerapan Tridharma Perguruan Tinggi, yang ditanda-tangani pada tanggal 30 Oktober 2025.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024
Capaian Kinerja Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan Capaian Tahun 2024 karena indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 dan Setditjen PRL merupakan unit kerja baru yang terbentuk pada tahun 2025.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra DJPRL 2025-2029
Capaian Kinerja Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan karena tidak ada di dalam target renstra 2025-2029.
- D. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Organisasi Setara)
Tidak ada target nasional atau target di unit kerja lain untuk Indikator kinerja Persentase Dokumen Kerja Sama yang Disepakati, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target nasional.
- E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
- Faktor Pendukung Keberhasilan
 - Dukungan dan partisipasi aktif dari unit kerja teknis Ditjen PRL sebagai pemrakarsa kerja sama program PRL dalam proses penyusunan naskah kerja sama.

- Dukungan asistensi dari Biro Perencanaan dan Biro Hukum Setjen KKP dalam penyusunan rancangan PKS, terutama dalam kerja sama yang konteksnya baru bagi Ditjen PRL seperti kerja sama dengan perusahaan yang melibatkan pihak lainnya (anak perusahaan).
 - Antusiasme dari para mitra dalam penyusunan dan penyelenggaraan penandatanganan dokumen PKS.
 - Faktor Penghambat / Kendala:
 - Komunikasi dan koordinasi di level internal masih perlu ditingkatkan terutama dalam penyusunan rancangan PKS agar dapat mengakomodir kebutuhan seluruh unit eselon II lingkup Ditjen PRL yang terkait.
 - Adanya perbedaan pemahaman antara Ditjen PRL dengan mitra kerja sama dalam penyusunan rancangan PKS sehingga perlu meningkatkan intensitas koordinasi satu sama lain.
 - Solusi:
 - Meningkatkan koordinasi di level internal untuk mempercepat proses finalisasi naskah kerja sama yang telah dibahas para pihak.
 - Meningkatkan intensitas koordinasi antara Ditjen PRL dan mitra kerja sama.
- F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Dokumen Kerja Sama yang Disepakati tercapai 111,11% dan dari sisi alokasi anggaran yang tersedia untuk mendukung pencapaian indikator ini adalah sebesar Rp80.000.000 (layanan kerjasama sub bidang penataan ruang laut) yang juga digunakan untuk mendukung pencapaian 3 indikator kinerja lainnya (Tingkat kepatuhan pengelolaan data, dokumen pengelolaan data yang dihasilkan, dan Pemenuhan kertas posisi) , realisasi anggaran sebesar Rp79.454.090 atau 99,32%, masih menunjukkan adanya efisiensi anggaran karena output melampaui target dengan realisasi anggaran yang tidak sepenuhnya terpakai.
- Secara kuantitatif sederhana dapat dikalkulasikan pada realisasi alokasi anggaran sebesar 99,32% dan capaian kinerja 111,11%, sehingga rasio efisiensi kinerja terhadap input anggaran sebesar 111,87% yang menunjukkan efektivitas kinerja tinggi.

G. Kegiatan Pendukung

Pada Tahun 2025, kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan adalah audiensi kerja sama dengan para mitra, penyusunan rancangan dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan penandatanganan PKS yang dilakukan baik secara seremonial maupun sirkular (*desk to desk*).



Gambar 39 Penandatanganan PKS Antara Ditjen PRL dengan Yayasan WWF Indonesia dan PT. Danareksa (Persero)



Gambar 40 Penandatanganan PKS Antara Ditjen PRL dengan Universitas Padjadjaran dan Universitas Negeri Jakarta

H. Rencana Aksi Tahun 2026

Pada Tahun 2026 akan dilakukan kegiatan pembahasan usulan kerja sama dan finalisasi rancangan naskah kerja sama yang diprakarsai oleh Satker Pusat/UPT lingkup Ditjen PRL atau calon mitra di level nasional maupun internasional.

IK 16. Persentase Pemenuhan Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri yang Disusun

Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri yang Disusun merupakan dokumen yang disusun untuk digunakan oleh Delegasi

Kementerian yang menghadiri pertemuan/perundingan Perjanjian Internasional. Dokumen Kertas Posisi ini dapat berupa masukan yang dihimpun dari DJPRL untuk disampaikan ke BHKLN atau dokumen yang disusun oleh DJPRL guna menghadiri pertemuan/perundingan perjanjian Internasional. Kertas Posisi sekurang-kurangnya memuat: agenda pertemuan; rincian informasi mata agenda; perkembangan isu setiap mata agenda; perkembangan Kerja Sama; suggested point of intervention; dan/atau usulan posisi Indonesia.

Formula Perhitungan:

Membandingkan antara jumlah dokumen kertas posisi yang disusun dengan jumlah pertemuan/perundingan perjanjian internasional yang dihadiri pada periode April – Desember 2025. adapun penghitungannya dengan dengan rumus:

$$\frac{a}{b} \times 100\%$$

Keterangan: a = Jumlah dokumen kertas posisi yang disusun; b = Jumlah pertemuan/perundingan perjanjian internasional

Berikut capaian dan perkembangan IK ini pada Tahun 2025

Tabel 28 Capaian IK Persentase Pemenuhan Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri yang Disusun

SK-1	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut							
IK-16	Persentase Pemenuhan Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri yang Disusun							
Tahun 2024	Tahun 2025				Renstra 2025-2029			
Realisasi	Target PK	Capaian	% Capaian (%Kinerjaku)	Kenaikan 2024-2025 (%)	Target 2025	% Capaian 2025	Target 2029	% Capaian 2029
-	90	100	111,11 (111,11)	- (-)	-	-	-	-

A. Capaian IK Tahun 2025

Capaian indikator kinerja Persentase Pemenuhan Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri yang Disusun tahun 2025 adalah sebesar 100% dari target 90% atau tercapai 111,11% sesuai dengan Nota Dinas Ketua Tim Kerja Sama dan Data Nomor 14/DJPRL.1/TU.140/I/2026 tanggal 5 Januari 2026 perihal Laporan Capaian Indikator Kinerja Kerja Sama Tahun 2025.

Berikut 17 kertas posisi yang disusun pada tahun 2025 untuk 17 pertemuan Internasional, yang disajikan juga pada Lampiran:

- 1) *The 10th Our Ocean Conference (OOC-10)* di Busan, Korea Selatan
 - 2) *The 5th APEC Ocean-Related Ministerial Meeting (AOMM-5)* di Busan, Korea Selatan
 - 3) *The 3rd UN Ocean Conference (UNOC-3)* di Nice, Prancis
 - 4) *The Second G20 Environment and Climate Sustainability Working Group (ECSWG)* di Skukuza, Afrika Selatan
 - 5) *The Second Part of The Fifth Session of The Intergovernmental Negotiation Committee to Develop an International Legally Binding Instrument on Plastic Pollution, including in the Marine Environment* di Jenewa, Switzerland
 - 6) *Asean Digital Economy Framework* di Hanoi, Vietnam
 - 7) *Second Session of Preparatory Committee BBNJ* di New York, Amerika Serikat
 - 8) *The Second Consultative Meeting of the ATSEA Regional Coordination Committee (RCC) virtual meeting*
 - 9) *Knowledge Exchange Program "Marine Spatial Planning Offshore Wind Development and Permitting"* di Denmark
 - 10) *Threatened Species Technical Working Group back to back with the Bismarck Solomon-Seas Seascape (BSS) Dialogue* di Solomon Island
 - 11) *Women Leaders Forum Regional Exchange for Coral Reefs Fisheries and Food Security* di Solomon Island
 - 12) *Business Forum and World Osaka Expo* di Osaka, Jepang
 - 13) *The 48th Meeting of The SEAFDEC Program Committee* di Malaysia
 - 14) *The 28th Meeting Fisheries Consultative Group of the Asean - SEAFDEC Strategic Partnership (FCG/ASSP)* di Malaysia
 - 15) *The Second Annual Meeting of the ATSEA Regional Coordination Committee (RCC)* di Jakarta, Indonesia
 - 16) *Pre-Senior Official Meeting CTI CFF* di Bali, Indonesia
 - 17) *The 20th Senior Official Meeting CTI CFF* di Bali, Indonesia
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024
- Capaian Kinerja Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan Capaian Tahun 2024 karena indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 dan Setditjen PRL merupakan unit kerja baru yang terbentuk pada tahun 2025.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra DJPRL 2025-2029

Capaian Kinerja Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan karena tidak ada di dalam target renstra 2025-2029.

D. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Organisasi Setara)

Tidak ada target nasional atau target di unit kerja lain untuk Indikator kinerja Persentase Pemenuhan Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri yang Disusun, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target nasional.

E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

- Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan capaian ini didukung oleh komitmen Ditjen PRL dan instansi terkait lainnya dalam menentukan posisi Indonesia pada pertemuan internasional yang akan dituangkan dalam kertas posisi. Selain itu juga didukung dengan pemahaman *person in charge* (PIC) dari masing-masing direktorat teknis terkait isu pembahasan pada kertas posisi Indonesia di forum-forum internasional.

- Faktor Penghambat / Kendala

Kendala yang dihadapi yaitu membutuhkan waktu lebih lama dalam menghimpun bahan penyusunan kertas posisi. Selain itu kompleksitas isu yang dibahas dalam pertemuan internasional membutuhkan analisis teknis yang mendalam.

- Solusi

Meningkatkan intensitas koordinasi dengan direktorat teknis terkait dalam penyusunan bahan kertas posisi, pembahasan kertas posisi idealnya dilakukan secara tatap muka. Selain itu juga diperlukan peningkatan kapasitas SDM yang terlibat dalam penyusunan dan pertemuan internasional.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri yang Disusun tercapai 111,11% dan dari sisi alokasi anggaran yang tersedia untuk mendukung pencapaian indikator ini adalah sebesar Rp80.000.000 (layanan kerjasama sub bidang penataan ruang laut) yang juga digunakan untuk mendukung pencapaian 3 indikator kinerja lainnya (Tingkat kepatuhan pengelolaan data, dokumen Pengelolaan data yang dihasilkan, dan Kerjasama yang disepakati), realisasi

anggaran sebesar Rp79.454.090 atau 99,32%, masih menunjukkan adanya efisiensi anggaran karena output melampaui target dengan realisasi anggaran yang tidak sepenuhnya terpakai.

Secara kuantitatif sederhana dapat dikalkulasikan pada realisasi alokasi anggaran sebesar 99,32% dan capaian kinerja 111,11%, sehingga rasio efisiensi kinerja terhadap input anggaran sebesar 111,87% yang menunjukkan efektivitas kinerja tinggi.

G. Kegiatan Pendukung

Pada Tahun 2025, kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan berupa pertemuan koordinasi lintas unit eselon 1 KKP maupun lintas kementerian/lembaga dalam proses penyusunan 17 dokumen kertas posisi (termasuk juga pedoman delegasi) untuk 17 pertemuan internasional yang terdiri dari pertemuan bilateral, regional dan multilateral. Adapun rincian dokumen kertas posisi yang telah disusun secara rinci disajikan pada Tabel berikut:



Gambar 41 Pertemuan The 5th APEC Ocean-Related Ministerial Meeting (AOMM-5) di Busan, Korea Selatan



Gambar 42 Pertemuan BBNJ Agreement Preparatory Commission 2, di New York, Amerika Serikat, 18-29 Agustus 2025



Gambar 43 Pertemuan The 20th Senior Official Meeting CTI CFF di Bali, Indonesia

H. Rencana Aksi Tahun 2026

Pada Tahun 2026 akan dilakukan kegiatan pembahasan penyusunan kertas posisi dan pedoman delegasi yang akan digunakan oleh Delegasi Ditjen PRL dalam pertemuan kerja sama luar negeri program PRL tahun 2026.

IK 17. Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk serta pihak internal atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang

disediakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (Permen KP Nomor 15 Tahun 2021).

Upaya yang dilakukan untuk Pelayanan Publik:

- Pengumpulan/Inventaris bahan pelayanan publik lingkup Ditjen PRL
- Membahas/menelaah/mengevaluasi dokumen pelayanan publik
- Penyiapan/penyusunan bahan/konsep/dokumen pelayanan publik yang diselesaikan dengan ketentuan dalam kurun waktu 1 tahun

Dokumen Pelayanan Publik adalah kumpulan bahan atau laporan yang terkait dengan kegiatan/rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan meliputi Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan dan/atau Inovasi Pelayanan Publik.

Dokumen Pelayanan Publik meliputi:

- Laporan Pengendalian Gratifikasi;
- Laporan Penanganan Pengaduan;
- Laporan Tata Laksana Pelayanan Perizinan dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ditjen PRL Tahun 2025

Formula Perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah dokumen pelayanan publik yang disusun}}{\text{Jumlah dokumen pelayanan publik yang ditentukan}} \times 100\%$$

Pada tahun 2026, IK Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik digantikan dengan IK mandatory yaitu Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik DJPRL. Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik ini sudah terakomodir pada kegiatan pencapaian IK reformasi birokrasi.

Berikut capaian dan perkembangan IK ini pada Tahun 2025:

Tabel 29 Capaian IK Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik pada Tahun 2025

SK-1	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut							
IK-17	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik							
Tahun 2024	Tahun 2025				Renstra 2025-2029			
Realisasi	Target PK	Capaian	% Capaian (%Kinerjaku)	Kenaikan 2024-2025 (%)	Target 2025	% Capaian 2025	Target 2029	% Capaian 2029
-	100	100	100 (100)	- (-)	-	-	-	-

A. Capaian IK Tahun 2025

Capaian indikator kinerja Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik tahun 2025 adalah sebesar 100% dari target 100% sesuai dengan Nota Dinas Ketua Tim Kerja SDM Aparatur dan Organisasi Nomor 50/DJPRL.1/TU.140/I/2026 tanggal 8 Januari 2026 perihal Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik. Adapun pemenuhan dokumen pelayanan publik yang disusun meliputi: Laporan Pengendalian Gratifikasi, Laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat, dan Laporan Tata Laksana Pelayanan Perizinan dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ditjen PRL Tahun 2025 atau dapat diakses pada tautan bit.ly/DokumenYanblikPRL_2025. Pengukuran capaian dilakukan tahunan dan pada tahun 2025 telah dilaksanakan:

1. Koordinasi kegiatan pelayanan perizinan/piket petugas Ditjen PRL di PTSA KKP.
2. Penyusunan Keputusan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut terkait Pelayanan Publik Ditjen PRL Tahun 2025.
3. Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman.
4. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri Instansional pada OP lingkup Ditjen PRL Tahun 2025 dan PEKPPP Inklusif dan Ramah Kelompok Rentan lingkup Ditjen PRL Tahun 2025.
5. Pelaksanaan Kegiatan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) lingkup Ditjen PRL Tahun 2025.
6. Pelaksanaan Wawancara Unit Kerja yang diusulkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
7. Penyusunan Manajemen Risiko Korupsi, Kolusi, Nepotisme (MR KKN) Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut.
8. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Peningkatan Pelayanan Publik.
9. Sosialisasi Antikorupsi dan Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dan Deklarasi Antikorupsi Ditjen PRL pada HAKORDIA Tahun 2025.
10. Validasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan II, III, dan IV tahun 2025 lingkup Ditjen PRL.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024

Capaian Kinerja Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 karena indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada Tahun 2025 dan Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut merupakan unit kerja yang baru terbentuk di Tahun 2025.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra DJPRL 2025-2029

Indikator kinerja tidak terdapat pada Renstra sehingga Capaian kinerja tahun 2025 tidak bisa dibandingkan dengan target Renstra DJPRL 2025-2029.

D. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Kerja Setara)

Tidak ada target nasional atau target di unit kerja lain untuk IK Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik sehingga capaian kinerja Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan target nasional atau capaian unit organisasi setara.

E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

- Faktor Pendukung Keberhasilan
Adanya komitmen unit kerja dalam pencapaian target indikator kinerja melalui pemenuhan dokumen pelayanan publik, dukungan mitra yang berkelanjutan dari Setjen dan Itjen KKP.
- Faktor Penghambat
Perlu dilakukan peningkatan kualitas indikator kinerja pemenuhan dokumen pelayanan publik pada periode berikutnya.
- Solusi
Sebagai upaya peningkatan kualitas direkomendasikan indikator kinerja tidak digunakan lagi dan diganti dengan Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik DJPRL untuk periode berikutnya.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik tercapai 100%, pemanfaatan teknologi terutama rapat-rapat dan kegiatan dapat melalui zoom, penyimpanan dokumen-dokumen terkait penilaian-penilaian pelayanan publik dan monitoring/evaluasi dapat dilakukan secara digital melalui gdrive, repository, WA group, dan informasi melalui persuratan dengan memanfaatkan portal.kkp.go.id dan dari sisi alokasi anggaran yang

tersedia untuk mendukung pencapaian indikator ini adalah sebesar Rp80.000.000 (layanan organisasi dan tata kelola internal) yang juga digunakan untuk mendukung pencapaian 3 indikator kinerja lainnya (IP ASN DJPRL, IP ASN Setditjen PRL, dan Pemenuhan dokumen RB), realisasi anggaran sebesar Rp79.299,906 atau 99,12%, masih menunjukkan adanya efisiensi anggaran karena output melampaui target dengan realisasi anggaran yang tidak sepenuhnya terpakai.

Secara kuantitatif sederhana dapat dikalkulasikan pada realisasi alokasi anggaran sebesar 99,12% dan capaian kinerja 100%, sehingga rasio efisiensi kinerja terhadap input anggaran sebesar 100,88% yang menunjukkan efektivitas kinerja tinggi.

G. Kegiatan Pendukung

Pada Tahun 2025, kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan:

1. Penyusunan Keputusan Dirjen Penataan Ruang Laut Tahun 2025, yaitu:
 - a. Tim Penanganan Pengaduan (TPP) Ditjen PRL Tahun 2025.
 - b. Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Ditjen PRL Tahun 2025
2. Dukungan Tim/Keanggotaan pada Penilaian Lingkup KKP:
 - a. Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik Lingkup KKP Tahun 2025.
 - b. Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPP) Lingkup KKP Tahun 2025.
3. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pelayanan Publik:
 - a. Bahasa Isyarat dan Pelayanan Prima.
 - b. Bimbingan Teknis Pengelolaan Pengaduan Masyarakat.
 - c. Bimbingan Teknis Pengendalian Gratifikasi Lingkup Ditjen PRL Tahun 2025.
4. Pelaksanaan Kegiatan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) lingkup Ditjen PRL Tahun 2025:
 - a. Pelaksanaan E-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2025.
 - b. Monitoring dan Evaluasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) Lingkup Ditjen PRL.
5. Mengikuti pelaksanaan Pleno Proposal Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2025.

6. Rapat Monitoring dan Evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Ditjen PRL Triwulan II Tahun 2025.
7. Pengusulan jumlah peserta *e-learning* Peningkatan Pemahaman Gratifikasi Bagi Pegawai.
8. Persiapan Evaluasi Lapangan terhadap Satker WBK/WBBM yang Diusulkan kepada TPN Kementerian PANRB Tahun 2025.
9. Pemutakhiran Data SIPPN CariYanlik.
10. *Mapping* layanan publik pada Direktorat Lingkup Ditjen PRL.
11. Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat.
12. Pemenuhan Dokumen Pemantauan Pembangunan Integritas.



Gambar 44 Kegiatan Pelayanan Publik Ditjen PRL Tahun 2025

H. Rencana Aksi Tahun 2026

Pada tahun 2026, IK Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik digantikan dengan IK mandatory yaitu Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik DJPRL. Sehingga kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2026 meliputi:

1. Penetapan Keputusan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut tentang Nama Inovasi Lingkup Ditjen PRL Tahun 2026.
2. Penetapan Keputusan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut tentang Tim Penilai Inovasi Ditjen PRL Tahun 2026.
3. Mengikuti sosialisasi KIPP tahun 2026.

IK 18. Nilai Keterbukaan Informasi Publik DJPRL

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu hal penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan.

Badan publik dituntut untuk berbenah diri melakukan perubahan sejalan dengan tuntutan masyarakat serta pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini juga sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana badan-badan publik memiliki kewajiban menyampaikan informasi yang dikuasainya.

Salah satu pelaksanaan dari UU. No. 14 Tahun 2008 yakni dilakukannya monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Sesuai dengan peraturan tersebut bahwa monev keterbukaan informasi publik dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran. Adapun penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 42 Tahun 2023.

Aspek penilaian dalam keterbukaan informasi publik meliputi 5 komponen indikator yaitu:

- a. Mengumumkan informasi publik
- b. Menyediakan informasi publik
- c. Sarana dan Prasarana
- d. Kelembagaan
- e. Digitalisasi.

Formula perhitungan

- 1) Monev Keterbukaan Informasi Publik dilakukan melalui pengisian SAQ (*Self Assesment Questionnaire*) terbagi dalam 5 komponen indikator (mengumumkan informasi publik, menyediakan informasi publik, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan digitalisasi).
- 2) SAQ disediakan oleh Biro Humas Kerja Sama dan Luar Negeri yang mengacu pada format kuesioner Komisi Informasi Pusat.
- 3) Penilaian keterbukaan informasi publik dilakukan oleh tim penilai internal KKP.
- 4) Hasil penilaian keterbukaan informasi publik merupakan hasil dari kumulatif penilaian dengan sistem pembobotan yang terdiri atas pengisian SAQ sebanyak 80% dan presentasi sebanyak 20%.
- 5) Nilai dan predikat atas hasil penilaian keterbukaan informasi publik yang diperoleh dari tim penilai internal KKP berupa:

No	Predikat	Interval Sektor
1	Informatif	90 – 100
2	Menuju Informatif	80 – 89,9
3	Cukup Informatif	60 – 79,9

4	Kurang Informatif	40 – 59,9
---	-------------------	-----------

Berikut capaian dan perkembangan IK Nilai Keterbukaan Informasi Publik DJPRL

Tabel 30 Capaian IK Nilai Keterbukaan Informasi Publik DJPRL

SK-1	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut							
IK-18	Nilai Keterbukaan Informasi Publik DJPRL							
Tahun 2024	Tahun 2025				Renstra 2025-2029			
Realisasi	Target PK	Capaian	% Capaian (%Kinerjaku)	Kenaikan 2024-2025 (%)	Target 2025	% Capaian 2025	Target 2029	% Capaian 2029
-	91	100	109,89 (109,89)	- (-)	-	-	-	-

A. Capaian IK Tahun 2025

Capaian indikator kinerja Nilai keterbukaan informasi publik DJPRL tahun 2025 adalah sebesar 100 dari target 91 atau tercapai 109,89% sesuai dengan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PPID-KKP/XII/2025 tanggal 2 Desember 2025 tentang Hasil Penilaian Evaluasi Mandiri Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025. atas hasil penilaian tersebut Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut memperoleh predikat Informatif.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024

Capaian kinerja pada Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2024 karena indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 dan DJPRL merupakan unit organisasi yang baru terbentuk pada tahun 2025.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra DJPRL 2025-2029

Indikator kinerja tidak terdapat pada Renstra sehingga Capaian kinerja tahun 2025 tidak bisa dibandingkan dengan target Renstra DJPRL 2025-2029.

D. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Organisasi Setara)

Perbandingan capaian Indikator Nilai keterbukaan informasi publik Unit Eselon I Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 disajikan pada gambar berikut:



**Gambar 45 Nilai keterbukaan informasi publik Unit Eselon I
Lingkup KKP Tahun 2025**

Berdasarkan perbandingan hasil pencapaian indikator kinerja Nilai keterbukaan informasi publik, Sekretariat DJPRL memperoleh nilai 100 atau memperoleh nilai sempurna begitu pula dengan unit kerja lingkup KKP lainnya. Hasil ini mengindikasikan adanya komitmen unit organisasi dalam keterbukaan informasi publik dan adanya peluang untuk mempertahankan pada periode berikutnya.

E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

- **Faktor Pendukung Keberhasilan**
Adanya komitmen unit kerja dalam pencapaian target indikator kinerja melalui pemenuhan 5 komponen indikator dalam aspek penilaian oleh tim penilai internal KKP diantaranya mengumumkan informasi publik, menyediakan informasi publik, sarana dan prasarana, kelembagaan, digitalisasi.
- **Faktor Penghambat**
Belum terdapat fitur persyaratan permohonan informasi publik, pemahaman proses bisnis informasi publik masih lemah, DJPRL unit kerja yang baru terbentuk dan belum dikenal.
- **Solusi**
perlu menyiapkan fitur untuk pemohon informasi agar bisa mengunggah kelengkapan persyaratan permohonan informasi publik, koordinasi secara berkala lingkup Ditjen PRL untuk penguatan pemahaman proses bisnis layanan informasi publik,

diseminasi informasi mengenai tugas dan fungsi Ditjen PRL secara intens di beberapa kanal media informasi.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian Indikator Kinerja Nilai keterbukaan informasi publik tercapai 109,89%, pemanfaatan teknologi informasi dalam penyampaian informasi publik dan dari sisi alokasi anggaran yang tersedia untuk mendukung pencapaian indikator ini adalah sebesar Rp80.000.000 (layanan organisasi dan tata kelola internal) yang juga digunakan untuk mendukung pencapaian 3 indikator kinerja lainnya (IP ASN DJPRL, IP ASN Setditjen PRL, dan Pemenuhan dokumen RB), realisasi anggaran sebesar Rp79.891.890 atau 99,86%, masih menunjukkan adanya efisiensi anggaran karena output melampaui target dengan realisasi anggaran yang tidak sepenuhnya terpakai.

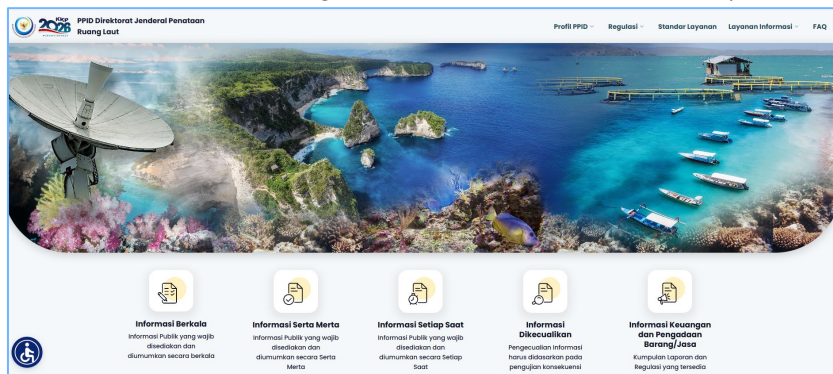
Secara kuantitatif sederhana dapat dikalkulasikan pada realisasi alokasi anggaran sebesar 99,86% dan capaian kinerja 109,89%, sehingga rasio efisiensi kinerja terhadap input anggaran sebesar 110,01% yang menunjukkan efektivitas kinerja tinggi.

G. Kegiatan Pendukung

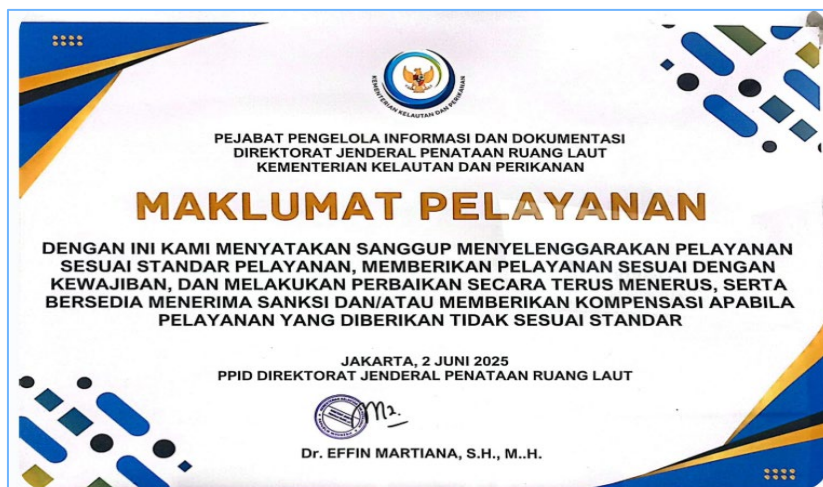
Pada Tahun 2025, kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan:

1. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik 2025
2. Pemutakhiran konten website PPID
3. Pemutakhiran konten website DJPKRL
4. Publikasi informasi melalui media sosial dan website DJPKRL
5. Pelayanan Informasi Publik
6. Penandatanganan komitmen bersama Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan KKP oleh Setditjen PKRL.
7. Publikasi konten pada website PPID, DJPRL, media sosial, dan media massa
8. Penyusunan dan publikasi rekapitulasi informasi publik yang ditindaklanjuti
9. Publikasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Informasi Publik TW II
10. Penetapan SOP Layanan Informasi Publik
11. Mengirimkan Surat Dinas kepada UPT Lingkup DJPRL untuk mengusulkan Daftar Informasi Publik 2025
12. Mengirimkan Nota Dinas kepada seluruh unit kerja lingkup DJPRL terkait Penyampaian Kelengkapan Data Dukung Monev Keterbukaan Informasi Publik 2025

13. Penerbitan SK Daftar Informasi Publik DJPRL 2025
14. Pengisian Self Assessment Questioner (SAQ) Monev Keterbukaan Informasi Publik
15. Pembuatan video profil layanan informasi publik DJPRL 2025
16. Pemenuhan fasilitas ruang layanan informasi publik (banner informasi, maklumat pelayanan, SOP Layanan Informasi Publik, QR Code Survei Kepuasan Masyarakat, Foto Petugas Pelayanan Informasi Publik, Aplikasi Hear Me untuk kaum disabilitas tuna rungu dan tuna wicara, dan Laptop).



Gambar 46 Laman PPID Ditjen PRL



Gambar 47 Maklumat Pelayanan

H. Rencana Aksi Tahun 2026

1. Penetapan Daftar informasi publik tahun 2026
2. Publikasi informasi dan Pelayanan informasi publik

IK 19. Persentase Penyelesaian Instrumen Hukum Penataan Ruang Laut

Instrumen hukum merupakan bagian dari pembentukan produk hukum. Penyelesaian Instrumen hukum merupakan rancangan instrumen hukum yang diajukan oleh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut. Instrumen Hukum Penataan Ruang Laut antara lain berupa Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal, surat edaran, kegiatan di bidang bantuan hukum, serta *legal opinion*.

Teknik Menghitung:

Menginventarisasi dan memproses penyelesaian dokumen instrumen hukum di bidang pengelolaan ruang laut yang diajukan oleh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan/atau penetapan. Berikut capaian dan perkembangan IK ini pada Tahun 2025

Tabel 31 Capaian IK Persentase Penyelesaian Instrumen Hukum Penataan Ruang Laut

SK-1	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut							
IK-19	Persentase Penyelesaian Instrumen Hukum Penataan Ruang Laut							
Tahun 2024	Tahun 2025				Renstra 2025-2029			
Realisasi	Target PK	Capaian	% Capaian (%Kinerjaku)	Kenaikan 2024-2025 (%)	Target 2025	% Capaian 2025	Target 2029	% Capaian 2029
-	100	100	100 (100)	- (-)	-	-	-	-

A. Capaian IK Tahun 2025

Capaian indikator kinerja Persentase Penyelesaian Instrumen Hukum Penataan Ruang Laut tahun 2025 adalah 100% dari target 100% sesuai dengan Nota Dinas Ketua Tim Kerja Hukum Nomor 54/DJPRL.1/TU.140/I/2026 tanggal 8 Januari 2026 perihal Penyampaian Capaian Persentase Penyelesaian Instrumen Hukum Penataan Ruang Laut. Jumlah Kepdirjen yang ditetapkan selama 2025 adalah sebanyak 18 Keputusan dan 1 perkara Bantuan hukum

yang telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Yaitu sebagai berikut:

Sampai dengan berakhirnya tahun 2025 telah terbit 14 (empat belas) Keputusan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut yakni

1. Keputusan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
2. Keputusan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Nomor 2 Tahun 2025 tentang Unit Kehumasan di Lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
3. Keputusan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tim Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
4. Keputusan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tim Penanganan Pengaduan di Lingkungan Direktorat Jenderal penataan Ruang Laut
5. Keputusan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
6. Keputusan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Nomor 6 Tahun 2025 tentang Nama Pemangku Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
7. Keputusan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pengelola Arsip di Lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
8. Keputusan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tim Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru di Lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
9. Keputusan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Nomor 14 Tahun 2025 tentang Panitia Rakernis Ditjen PRL.
10. Keputusan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Nomor 15 Tahun 2025 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut
11. Keputusan Dlraktur Jenderal Penataan Ruang Laut Nomor 16 Tahun 2025 tentang Tim Penilai Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

12. Keputusan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Nomor 17 Tahun 2025 tentang Nama Inovasi Pelayanan Publik
 13. Keputusan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Nomor 19 Tahun 2025 tentang Tim Pengelola Konflik Kepentingan di Lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
 14. Keputusan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Nomor 24 Tahun 2025 tentang Tim Penyusun Produk Hukum di Lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut.
 15. Keputusan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Nomor 26 tentang Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025
 16. Keputusan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Nomor 27 tentang Tim Perencanaan Pengembangan Sistem Informasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
 17. Keputusan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Nomor 34 tentang Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
 18. Keputusan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Nomor 35 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024
Capaian kinerja pada Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2024 karena indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 dan DJPRL merupakan unit organisasi yang baru terbentuk pada tahun 2025
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra DJPRL 2025-2029
Indikator kinerja tidak terdapat pada Renstra sehingga Capaian kinerja tahun 2025 tidak bisa dibandingkan dengan target Renstra DJPRL 2025-2029.
- D. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Organisasi Setara)
Tidak ada target nasional atau target di unit kerja lain untuk IK Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik sehingga capaian kinerja Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan target nasional atau capaian unit organisasi setara.
- E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

- Faktor Pendukung Keberhasilan
Faktor Pendukung dalam pencapaian target kinerja yaitu Pembahasan penyusunan rancangan instrumen hukum dilakukan secara intensif. Selain itu, juga dilakukan koordinasi dengan K/L terkait, pemangku kepentingan dalam percepatan penyelesaian rancangan instrumen hukum
- Faktor Penghambat
Tidak terdapat kendala yang menghambat dalam pencapaian indikator kinerja ini.
- Solusi
Tidak terdapat solusi, karena tidak ada kendala yang dihadapi.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian Indikator Persentase Penyelesaian Instrumen Hukum Penataan Ruang Laut tercapai 100% dan dari sisi alokasi anggaran yang tersedia untuk mendukung pencapaian indikator ini adalah sebesar Rp80.000.000 (layanan hukum), realisasi anggaran sebesar Rp79.569.950 atau 99,46%, masih menunjukkan adanya efisiensi anggaran karena output melampaui target dengan realisasi anggaran yang tidak sepenuhnya terpakai.

Secara kuantitatif sederhana dapat dikalkulasikan pada realisasi alokasi anggaran sebesar 99,46% dan capaian kinerja 100%, sehingga rasio efisiensi kinerja terhadap input anggaran sebesar 100,54% yang menunjukkan efektivitas kinerja tinggi.

G. Kegiatan Pendukung

Pada Tahun 2025, kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan:

1. Rapat masukan revisi UU 23 Tahun 2023 tentang Pemerintah Daerah
2. Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Identifikasi Kebutuhan Regulasi Ditjen PRL Tahun 2025-2029
3. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021
4. Rapat Pembahasan Konsep Matriks Indikasi Program Prioritas Utama lingkup Ditjen PK ke dalam RPP RTRWN
5. Rapat Pembahasan Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut tentang Tim Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru
6. Rapat Lanjutan Pengisian Data Dukung Indeks Reformasi Hukum KKP
7. Rapat Audit Tata Ruang Laut sebagai tindak lanjut kasus pemagaran laut di perairan kabupaten bekasi

8. Rapat Revisi Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar
9. Rapat koordinasi usulan Penyusunan Keputusan Presiden tentang Dewan Nasioanal Sabang
10. Identifikasi kebutuhan regulasi Ditjen PRL tahun 2025-2029
11. Pembahasan Pedoman Teknis Pemberian Penghargaan dan Teguran Kinerja di Lingkungan Ditjen PRL
12. Rapat Pembahasan Revisi Rancangan Peraturan Pemerintah RTRWN dan Integrasi RTRL kedalam RTRWN
13. Pembahasan Pedoman Penyusunan RZ KSNT Cadangan Karbon Biru
14. Rapat Pembahasan RKepdirjen tentang Tim Perencanaan Pengembangan Sistem Informasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
15. Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan tentang Penataan Ruang Perairan Darat
16. Rapat Sinkronisasi Penataan Ruang Laut dengan Pemerintah Provinsi yang sudah mempunyai Perda RTRWP sebanyak 22 Provinsi
17. Pembahasan Pedoman Tata Cara Penyusunan RZ KSNT Cadangan Karbon Biru
18. Pembahasan masukan revisi Permen KP 28 Tahun 2021 dan Pengaturan Penerbitan PKKPR di KPBPB.
19. Finalisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
20. Tindak lanjut pembahasan revisi Permen KP Nomor 28 Tahun 2021.
21. Pembahasan Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut tentang Indikator Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
22. Pembahasan Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
23. Melakukan pendampingan hukum terhadap kasus gugatan Class Action PT. Jawa Satu Power
24. Melakukan pendampingan hukum terhadap Gugatan Tata Usaha Negara dari PT. Dirgantara Inti Abadi (PT. DIA) register perkara nomor 342/G/2025/PTUN.JKT di PTUN Jakarta
25. Melakukan pendampingan hukum terhadap Gugatan Tata Usaha Negara Register Perkara Nomor 195/G/LH/2025/PTUN.JKT, di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
26. melakukan pendampingan hukum terhadap Gugatan Nomor 368/G/LH/2024/PTUN.JKT, dengan Penggugat Freedy Bastian

Andrian, DKK terhadap Menteri Investasi/kepala BKPM selaku Tergugaelakukan pendampingan hukum terhadap.

27. melakukan pendampingan hukum terhadap Gugatan PTUN Nomor 169/G/2025/PTUN.JKT dan 170/G/2025/PTUN.JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
28. melakukan pendampingan hukum terhadap Gugatan Tata Usaha Negara Register Perkara Nomor 234/G/2025/PTUN.JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

H. Rencana Aksi Tahun 2026

1. Menyusun manual IKU penyelesaian instrumen hukum DJPRL
2. Melakukan penyusunan dan penetapan Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut
3. Melakukan pembahasan penyelesaian permasalahan hukum di lingkungan DJPRL
4. Melakukan pendampingan bantuan hukum terhadap gugatan/permasalahan hukum di lingkungan DJPRL

IK 20. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal DJPRL

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, dan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang mampu mendukung program reformasi birokrasi maka perlu melakukan upaya peningkatan kualitas pengelolaan persuratan dan kearsipan meliputi kewajiban Implementasi Tata Naskah Dinas, Kode Klasifikasi, Jadwal Retensi Arsip serta Sistem Keamanan dan Hak Akses sesuai ketentuan.

Penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:

1. Pengawasan sistem kearsipan internal

Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:

- a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
- b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana

2. Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif

Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.

3. Pengawasan penyelamatan arsip statis internal

Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau memiliki nilai guna kesejarahan.

Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Adapun Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 50%)
 - a. penciptaan arsip (25%),
 - b. penggunaan arsip (25%),

- c. pemeliharaan arsip (25%)
- d. penyusutan arsip (25%)
- 2. Sumber daya kearsipan (bobot 50%)
 - a. sumber daya manusia kearsipan (50%),
 - b. prasarana dan sarana (50%).

Nomenklatur kegiatan menyesuaikan dengan organisasi baru meskipun masih menggunakan DIPA DJPKRL. Capaian Direktorat Perencanaan Ruang Laut merupakan capaian indikator Nilai Pengawasan Kearsipan Internal DJPRL. Berikut capaian dan perkembangan IK ini pada Tahun 2025.

Tabel 32 Capaian IK Nilai Pengawasan Kearsipan Internal DJPRL

SK-1	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut							
IK-20	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal DJPRL							
Tahun 2024	Tahun 2025				Renstra 2025-2029			
Realisasi	Target PK	Capaian	% Capaian (%Kinerjaku)	Kenaikan 2024-2025 (%)	Target 2025	% Capaian 2025	Target 2029	% Capaian 2029
-	70	92,81	132,59 (120)	- (-)	70	132,59	80	116,01

A. Capaian IK Tahun 2025

Capaian indikator kinerja Nilai pengawasan kearsipan internal DJPRL tahun 2025 adalah sebesar 92,81 dari target 70 atau tercapai 132,59% (kinerjaku 120%), nilai tersebut berasal dari hasil penilaian pengawasan kearsipan internal terhadap Direktorat Perencanaan Ruang Laut yang sebelumnya tergabung dalam Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. Hasil penilaian tersebut sesuai dengan Nota Dinas Kepala Biro Umum Nomor 2021/SJ.6/TU.220/XI/2025 tanggal 21 November 2025 perihal Penyampaian Hasil Pengawasan Kearsipan Internal KKP tahun 2025. Adapun rincian perolehan nilai pengawasan kearsipan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 33 Hasil Penilaian Kearsipan Internal

Unit Pengolah	Nilai Aspek PAD	Nilai Aspek SDK	Nilai Aspek PAD + SDK	Kategori
Sekretariat DJPKRL	55,50	37,00	92,50	AA (Sangat Memuaskan)

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024

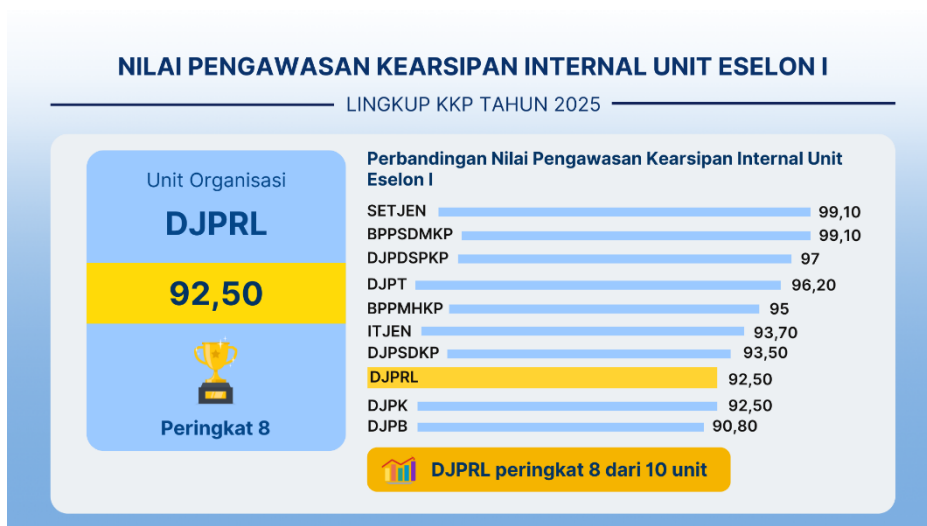
Capaian indikator kinerja Nilai pengawasan kearsipan internal DJPRL pada Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 dikarenakan Indikator kinerja baru dan Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut merupakan unit kerja yang baru terbentuk pada tahun 2025.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra DJPRL 2025-2029

Target Renstra DJPRL Tahun 2025–2029 untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 70 pada tahun 2025 dan 80 pada tahun 2029, capaian kinerja pada Tahun 2025 adalah sebesar 92,81, sehingga apabila dilakukan perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan target renstra, maka pada tahun 2025 telah tercapai sebesar 132,59% dan tahun 2029 tercapai sebesar 116,01%. posisi capaian saat ini berada jauh di atas baseline dan menunjukkan tren positif yang mencerminkan efektivitas upaya peningkatan kinerja kearsipan internal. Kondisi ini memberikan ruang untuk mempertahankan performa serta mengarahkan fokus pada penguatan aspek-aspek berkelanjutan agar target Renstra di tahun-tahun berikutnya dapat dicapai dengan konsisten.

D. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Organisasi Setara)

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai pengawasan kearsipan internal Unit Eseon I Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 disajikan pada gambar berikut:



**Gambar 48 Nilai pengawasan kearsipan internal Unit Eselon I
Lingkup KKP Tahun 2025**

Berdasarkan perbandingan capaian Nilai pengawasan kearsipan internal antar unit Eselon I Lingkup KKP, DJPRL memperoleh skor 92,50 yang berada di bawah rata-rata. Posisi ini menempatkan DJPRL pada kelompok menengah-bawah dibandingkan unit lainnya, terutama bila dibandingkan dengan SETJEN dan BPPSDMKP yang mencapai skor tertinggi (99,10). Meskipun capaian DJPRL masih berada pada kategori baik, hasil ini mengindikasikan adanya ruang peningkatan dalam aspek pengelolaan arsip, baik pada dimensi pengelolaan arsip dinamis maupun sumber daya kearsipan. Dengan memperkuat tata kelola, penyediaan SDM, pemanfaatan teknologi informasi, serta penetapan regulasi dan SOP yang lebih optimal, DJPRL berpotensi meningkatkan capaian nilai ke arah yang lebih kompetitif pada penilaian berikutnya

E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

- Faktor Pendukung Keberhasilan

Adanya komitmen unit kerja dalam pencapaian target dengan realisasi sebesar 132,59% (kinerjaku 120%), dan juga telah memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan kearsipan melalui menu korespondensi pada portal kkp.go.id, serta dikerjakan oleh pegawai dengan jabatan fungsional arsiparis sebanyak 2 pegawai.

- Faktor Penghambat Kegagalan dan Kendala
SOP pengelolaan arsip belum ditetapkan karena unit kerja masih baru terbentuk, sarana penyimpanan arsip fisik belum tersedia yang berpotensi mengganggu keamanan dan keselamatan arsip, keterbatasan SDM pengelola arsip yang hanya terpenuhi 2 orang dari kebutuhan 9 orang,
- Solusi
Melakukan penyusunan dan penetapan SOP pengelolaan arsip, penyediaan tempat penyimpanan arsip melalui pembangunan atau menyewa gedung untuk arsip, meningkatkan SDM pengelola arsip melalui penugasan atau penambahan formasi.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian indikator kinerja Nilai pengawasan kearsipan internal DJPRL tercapai 132,59% (kinerjaku 120%) dari target, namun dari sisi prosedur, belum ditetapkan SOP pengelolaan arsip meskipun pemanfaatan korespondensi pada portal kkp.go.id telah dilakukan sebagai dukungan digital, dari sisi sarana dan prasarana belum tersedia tempat khusus untuk penyimpanan arsip fisik yang dapat berdampak pada keamanan dan keselamatan arsip, dari sisi SDM baru terpenuhi 2 pegawai dari kebutuhan 9 pegawai sesuai peta jabatan, dan dari sisi alokasi anggaran yang digunakan untuk pencapaian indikator ini adalah sebesar Rp1.355.085.000 (layanan umum) dengan realisasi Rp1.353.499.533 atau (99,88%), menunjukkan efisiensi anggaran karena output melampaui target dengan realisasi anggaran yang tidak sepenuhnya terpakai.

Secara kuantitatif sederhana dapat dikalkulasikan pada realisasi alokasi anggaran sebesar 99,88% dan capaian kinerja 132,59%, sehingga rasio efisiensi kinerja terhadap input anggaran sebesar 132,75% yang menunjukkan efektivitas kinerja tinggi, meskipun struktur pendukung belum terpenuhi.

G. Kegiatan Pendukung

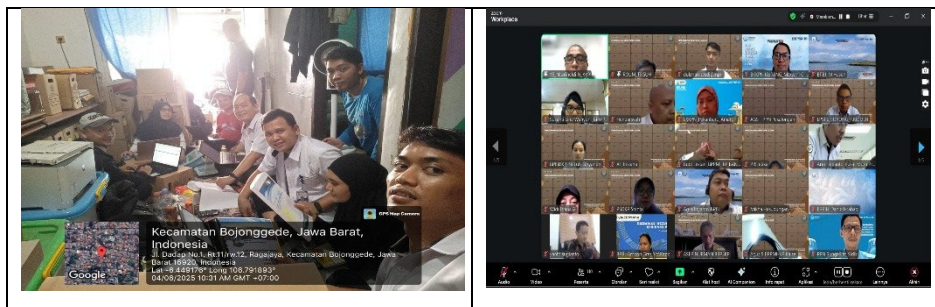
Pada Tahun 2025, kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan:

1. Pembahasan Pengelolaan Kearsipan Lingkup DJPKRL Tahun 2025;
2. Rapat Koordinasi Persuratan dan Kearsipan;
3. Peminjaman Arsip dari Record Center DJPKRL di Petojo ke Record Center DJPKRL di Kwartang;

4. Pengajuan Daftar Usul Musnah Arsip DJPKRL kepada Biro Umum dan PBJ selaku Unit Kearsipan
5. Kegiatan Upload Arsip DJPKRL pada Aplikasi SIKN (Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional).
6. Tata Naskah Dinas di lingkungan DJPRL
7. Penataan Arsip inaktif Ditjen PRL
8. Penilaian Pengawasan Arsip internal di lingkup KKP.
9. Kegiatan penilaian pengawasan kearsipan internal tahun 2025 tingkat Pusat
10. Asisten penilaian pengawasan kearsipan internal tahun 2025 tingkat UPT
11. Penilaian pengawasan kearsipan internal tahun 2025 tingkat UPT tahap
12. Penilaian pengawasan kearsipan internal tahun 2025 tingkat UPT tahap 2.



Gambar 49 Pemusnahan Arsip



Gambar 50 Pemberkasan Arsip dan Sosialisasi Kearsipan

H. Rencana Aksi Tahun 2026

1. Pemberkasan Arsip Tahun 2026
2. Pembentukan Tim Pengelola Arsip
3. Penyusutan PermenKP tentang Jadwal Retensi Arsip
4. Evaluasi dan Target Kearsipan Tahun 2026
5. Fasilitasi Portal Produk Hukum
6. Pengawasn Kearsipan Internal
7. Penyusunan SOP Kearsipan
8. Pengelolaan Arsip Vital
9. Pengelolaan Arsip Statis
10. Pemusnahan Arsip
11. Bimtek Kearsipan
12. Pembinaan Kearsipan di Lingkungan UPT DJPRL
13. SIKN JIKN kearsipan

IK 21. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP DJPRL

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa oleh Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun

2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Formula perhitungan

$$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Tabel 34 Capaian IK Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP DJPRL

SK-1	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut							
IK-21	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP DJPRL							
Tahun 2024	Tahun 2025				Renstra 2025-2029			
Realisasi	Target PK	Capaian	% Capaian (%Kinerjaku)	Kenaikan 2024-2025 (%)	Target 2025	% Capaian 2025	Target 2029	% Capaian 2029
-	76	100	131,58 (120)	-	76	131,58	80	125

A. Capaian IK Tahun 2025

Capaian indikator kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP DJPRL sampai dengan periode triwulan IV tahun 2025 ini adalah sebesar 100% dari target 76% atau tercapai 131,58% (kinerjaku 120%) Sesuai dengan Nota Dinas Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa nomor 41/SJ.7/PL.410/I/2026 tanggal 13 Januari 2026 Hal Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan di Lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP triwulan 4 Tahun Anggaran 2025, penilaian indikator kinerja ini menggunakan hasil penilaian terhadap unit organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, dikarenakan masih dalam 1 DIPA antara Ditjen PK dan Ditjen PRL pada Tahun 2025.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024

Capaian indikator kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP DJPRL pada Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 dikarenakan Indikator kinerja baru dan Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan

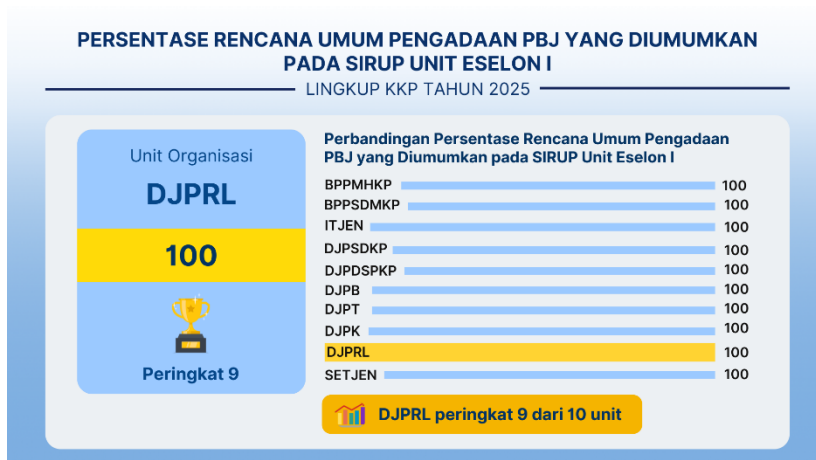
Ruang Laut merupakan unit kerja yang baru terbentuk pada tahun 2025

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra DJPRL 2025-2029

Capaian indikator kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP DJPRL pada tahun 2025 sebesar 100 menunjukkan hasil yang sangat optimal dan jauh melampaui target tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 76, dengan tingkat capaian mencapai 131,58%. Jika dibandingkan dengan target Renstra 2025–2029, capaian ini tidak hanya memenuhi target awal tahun 2025, tetapi juga telah melampaui target akhir tahun 2029 yang sebesar 80 sehingga tercapai 125%. Dengan demikian, capaian tahun 2025 mengindikasikan kinerja yang sangat progresif dan berada pada level yang lebih tinggi dibandingkan ekspektasi jangka menengah. Hasil ini menjadi modal penting untuk menjaga konsistensi performa serta mengarahkan perhatian pada strategi keberlanjutan agar capaian tetap stabil dalam rentang waktu Renstra.

D. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Nasional (Unit Organisasi Setara)

Perbandingan capaian Indikator Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Unit Eselon I Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 disajikan pada gambar berikut:



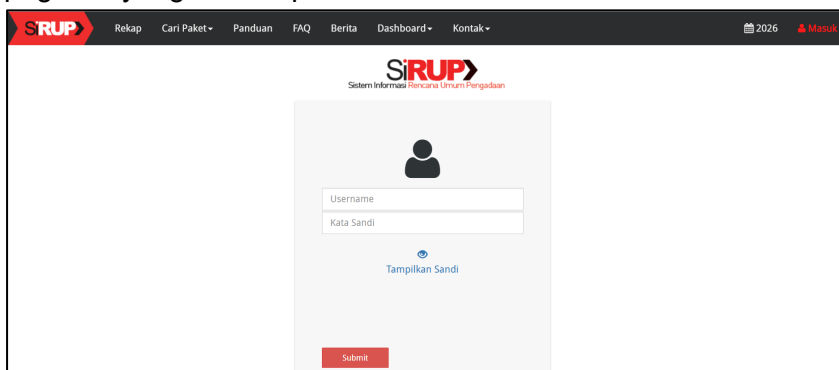
Gambar 51 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Unit Eselon I Lingkup KKP Tahun 2025

Berdasarkan data persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) PBJ yang diumumkan pada SIRUP di lingkungan Unit Eselon I KKP Tahun 2025, hampir seluruh unit mencapai tingkat publikasi sebesar 100%, termasuk DJPRL. Kondisi ini menunjukkan bahwa DJPRL berada pada level yang sama dengan mayoritas unit lain seperti BPPMHKP, BPPSDMKP, ITJEN, DJPSDKP, DJPSDKP, DJPB, DJPT, dan DJPK yang juga mencapai 100%. Satu-satunya unit yang berada di bawah capaian tersebut adalah SETJEN dengan persentase 91,19%. Dengan demikian, dari perspektif komparatif, DJPRL menunjukkan kinerja maksimal dalam pemenuhan kewajiban publikasi RUP pada SIRUP, setara dengan unit-unit berkinerja terbaik, sekaligus menempatkan DJPRL di atas satu-satunya unit yang belum mencapai tingkat optimal, yaitu SETJEN. Kondisi ini mencerminkan tertib administrasi perencanaan PBJ yang baik serta kepatuhan terhadap ketentuan transparansi pengadaan.

E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

- Faktor Pendukung Keberhasilan

Adanya komitmen unit kerja dalam pencapaian target dengan realisasi sebesar 131,58% (kinerjaku 120%), dan juga telah memanfaatkan teknologi informasi dalam publikasi rencana umum pengadaan melalui aplikasi SIRUP, serta dikerjakan oleh pegawai yang berkompeten.



Gambar 52 Aplikasi SIRUP

- Faktor Penghambat Kegagalan dan Kendala

Kendala utama dalam penggunaan SIRUP umumnya bersumber dari aspek teknis, kompetensi pengguna, kesiapan data, serta alur administrasi. Dari sisi teknis, pengguna sering menghadapi

akses yang lambat, gangguan sistem, atau keterbatasan fitur saat melakukan koreksi data. Sementara itu, dari sisi SDM, masih terdapat operator yang belum memahami sepenuhnya mekanisme penginputan RUP, ditambah dengan adanya rotasi personel yang menyebabkan terputusnya pengetahuan teknis. Kendala juga muncul ketika dokumen perencanaan belum siap atau belum lengkap sehingga input RUP menjadi tertunda.

- Solusi

Untuk mengatasi kondisi tersebut, diperlukan beberapa langkah perbaikan. Pertama, peningkatan kompetensi melalui pelatihan rutin, bimtek, dan pendampingan teknis bagi operator PBJ agar pengisian SIRUP dapat dilakukan secara tepat dan konsisten. Kedua, pembentukan SOP atau alur kerja internal untuk menjamin koordinasi yang lebih baik antara unit teknis, bagian perencanaan, dan operator PBJ. Ketiga, optimalisasi kesiapan data dengan memastikan dokumen perencanaan disusun lebih awal serta sinkron dengan siklus anggaran.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian indikator kinerja persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) PBJ yang diumumkan pada SIRUP DJPRL tercapai 131,58% (kinerjaku 120%) dari target, publikasi PBJ telah menggunakan sistem digital melalui aplikasi SIRUP, dilaksanakan oleh operator yang kompeten, dan dari sisi alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian indikator ini adalah sebesar Rp3.066.595.000 (layanan perkantoran dan layanan sarana internal) dengan realisasi Rp2.910.743.044 atau 94,92%, menunjukkan efisiensi anggaran karena output melampaui target dengan realisasi anggaran yang tidak sepenuhnya terpakai.

Secara kuantitatif sederhana dapat dikalkulasikan pada realisasi alokasi anggaran sebesar 94,92% dan capaian kinerja 131,58%, sehingga rasio efisiensi kinerja terhadap input anggaran sebesar 138,62% yang menunjukkan efektivitas kinerja tinggi.

G. Kegiatan Pendukung

Pada Tahun 2025 telah dilaksanakan

1. Rapat validasi Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Tahun 2025 Indikator Rencana Umum Pengadaan (RUP)
2. Survei harga pasar untuk pembandingan pengadaan Sarana Prasana untuk meubeler ruang kerja GMB 2 lantai 15

3. Pengadaan sarana prasarana untuk meubeler ruang kerja GMB 2 lantai 15 dan pemasukan pada aplikasi SiRUP.
4. Pengadaan Meubelair Ruang Kerja DJPRL
5. Pengadaan Jasa Konsultan
6. Pembuatan Paket Pengadaan dan pengumuman paket pengadaan
7. Pelaksanaan pengadaan barang jasa.



Gambar 53 Monitoring RUP PBJ

H. Rencana Aksi Tahun 2026

1. Rapat validasi Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Tahun 2026 Indikator Rencana Umum Pengadaan (RUP)
2. Pembuatan SK PPK di lingkungan DJPRL dan Pejabat Pengadaan
3. Pembuatan dan Perpanjang akun SPSE dan Inaproc PPK di lingkungan DJPRL
4. Sosialisasi dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa
5. Pengadaan kontrak PJLP di lingkungan DJPRL
6. Pembuatan Paket Pengadaan dan pengumuman paket pengadaan
7. Bimtek Pembuatan Kontrak PBJ
8. Pelaksanaan pengadaan barang jasa

3.2 Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran yang tersedia untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025 sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2025

yang ditandatangani tanggal 2 Juni 2025 adalah sebesar Rp4.534.770.000 dan terdapat adanya blokir anggaran sebesar Rp470.927.000, sehingga pagu efektif yang dapat digunakan adalah sebesar Rp4.063.843.000 yang bersumber dari rupiah murni, namun demikian pada tanggal 2 Desember 2025 terjadi perubahan perjanjian kinerja yang disebabkan adanya penambahan pagu anggaran sebesar Rp366.910.00 dari pergeseran alokasi anggaran, sehingga total pagu anggaran sebesar Rp4.901.680.000 dengan blokir anggaran sebesar Rp72.610.000, sehingga pagu efektif yang dapat digunakan sebesar Rp4.829.070.000, alokasi anggaran tersebut tercantum pada DIPA Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dengan kode satuan kerja 622145 yang digunakan oleh 2 unit organisasi yaitu Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, dikarenakan sebelumnya merupakan 1 unit organisasi. Adapun realisasi anggaran hingga akhir periode tahun 2025 adalah sebesar Rp4.739.851.328 dengan persentase sebesar 96,70 % dari total pagu anggaran atau 98,15% dari pagu anggaran efektif. Rincian realisasi anggaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 35 Rincian Realisasi Anggaran Setditjen PRL Tahun 2025

Uraian	Pagu (Rp)	Blokir (Rp)	Efektif (Rp)	Realisasi (Rp)	% Pagu	% Efektif
Layanan Kerjasama sub Bidang Penataan Ruang Laut	80.000.000	-	80.000.000	79.454.090	99,32	99,32
Layanan Hukum	80.000.000	-	80.000.000	79.569.950	99,46	99,46
Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	80.000.000	-	80.000.000	79.891.890	99,86	99,86
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Interna	80.000.000	-	80.000.000	79.299.906	99,12	99,12
Layanan Umum	1.355.085.000	-	1.355.085.000	1.353.499.533	99,88	99,88
Layanan Perkantoran	2.240.712.000	72.610.000	2.168.102.000	2.084.867.524	93,04	96,16
Layanan Sarana Internal	825.883.000	-	825.883.000	825.875.520	100	100
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	80.000.000	-	80.000.000	79.822.970	99,78	99,78
Layanan Manajemen Keuangan	80.000.000	-	80.000.000	77.569.945	96,96	96,96
Jumlah	4.901.680.000	72.610.000	4.829.070.000	4.739.851.328	96,70	98,15

Realisasi anggaran sangat mendukung dalam pencapaian kinerja Sekretariat Ditjen PRL pada tahun 2025, seluruh indikator kinerja yang

dikendalikan oleh Sekretariat Ditjen PRL pada tahun 2025 tercapai dengan baik sesuai dengan target yang telah direncanakan.

Dalam laporan kinerja ini, realisasi anggaran dijadikan dasar dalam perhitungan efisiensi dan efektivitas pencapaian kinerja terhadap penggunaan anggaran, adapun nilai kinerja organisasi Sekretariat Ditjen PRL pada tahun 2025 ini adalah sebesar 109,71 dengan kategori baik dari perhitungan 21 indikator kinerja, sedangkan realiasi anggaran tahun 2025 adalah sebesar 96,70% dari total pagu anggaran, secara sederhana perhitungan tingkat efisiensi dan efektivitas dapat dihitung dengan formula nilai kinerja organisasi dibagi persentase realisasi anggaran dikali dengan 100%, sehingga didapat tingkat efisiensi sebesar 113,45% yang menunjukkan efektivitas kinerja tinggi.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (Setditjen PRL) Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Program dan Kegiatan Setditjen PRL dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja Setditjen PRL Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Dalam perjanjian kinerja Sekretariat Ditjen PRL terdapat 21 Indikator Kinerja yang termasuk dalam sasaran kegiatan Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut. Pengukuran kinerja dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja, yaitu <https://www.kinerjaku.kkp.go.id> dan diperoleh Nilai Capaian Kinerja. Nilai Capaian Kinerja Sekretariat Ditjen PRL Tahun 2025 sebesar 109,71 (termasuk kriteria Baik).

Pada Tahun 2025 terdapat 21 indikator kinerja dengan target dan capaian sebagai yaitu 1). Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL tercapai 88,94 dari target 66, 2). Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Setditjen PRL tercapai 72,85 dari target 66, 3). Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NPKA) DJPRL tercapai 87,09 dari target 81,5, 4). Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL tercapai 84,18 dari target 89, 5). Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja DJPRL tercapai 96,72 dari target 80, 6). Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen PRL tercapai 100 dari target 80, 7). Nilai maturitas struktur dan proses SPIP DJPRL tercapai 3,806 dari target 3,5, 8). Laporan SPIP Setditjen PRL yang disusun tercapai 2 dari target 2, 9). Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPRL tercapai 0,076 dari target 0,5, 10). Indeks profesionalitas ASN DJPRL tercapai 84,13 dari target 80, 11). Indeks profesionalitas ASN Setditjen PRL tercapai 85,23 dari target 80, 12). Persentase pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi yang diselesaikan sesuai ketentuan tercapai 100 dari target 100, 13). Tingkat kepatuhan pengelolaan data DJPRL tercapai 100 dari target 91, 14). Persentase Dokumen Pengelolaan Data Penataan

Ruang Laut yang Dihasilkan tercapai 100 dari target 100, 15). Persentase Dokumen Kerja Sama yang Disepakati tercapai 100 dari target 90, 16). Persentase Pemenuhan Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri yang Disusun tercapai 100 dari target 90, 17). Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik tercapai 100 dari target 100, 18). Nilai keterbukaan informasi publik DJPRL tercapai 100 dari target 91, 19). Persentase Penyelesaian Instrumen Hukum Penataan Ruang Laut tercapai 100 dari target 100, 20). Nilai pengawasan kearsipan internal DJPRL tercapai 92,81 dari target 70, 21). Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP DJPRL tercapai 100 dari target 76.

Alokasi anggaran yang tersedia untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025 sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2025 yang ditandatangani tanggal 2 Juni 2025 adalah sebesar Rp4.534.770.000 dan terdapat adanya blokir anggaran sebesar Rp470.927.000, sehingga pagu efektif yang dapat digunakan adalah sebesar Rp4.063.843.000 yang bersumber dari rupiah murni, namun demikian pada tanggal 2 Desember 2025 terjadi perubahan perjanjian kinerja yang disebabkan adanya penambahan pagu anggaran sebesar Rp366.910.00 dari pergeseran alokasi anggaran, sehingga total pagu anggaran sebesar Rp4.901.680.000 dengan blokir anggaran sebesar Rp72.610.000, sehingga pagu efektif yang dapat digunakan sebesar Rp4.829.070.000, alokasi anggaran tersebut tercantum pada DIPA Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dengan kode satuan kerja 622145 yang digunakan oleh 2 unit organisasi yaitu Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, dikarenakan sebelumnya merupakan 1 unit organisasi. Adapun realisasi anggaran hingga akhir periode tahun 2025 adalah sebesar Rp4.739.851.328 dengan persentase sebesar 96,70 % dari total pagu anggaran atau 98,15% dari pagu anggaran efektif.

Terdapat kendala dalam pelaksanaan kinerja pada Tahun 2025 yakni keterbatasan SDM yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan.

4.2 Rekomendasi

Sebagai upaya peningkatan kinerja Setditjen PRL ke depan, sedang dilakukan Analisis Beban Kerja untuk memetakan kembali kebutuhan pegawai di lingkup Setditjen PRL.

4.3 Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya

Rekomendasi pada periode sebelumnya telah dilakukan tindak lanjut, dengan bukti sebagaimana dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 36 Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Link Bukti Dukung
1	Melakukan revisi DIPA pembukaan blokir apabila sudah mendapatkan persetujuan relaksasi blokir efisiensi lingkup DJPRL	Revisi DIPA relaksasi blokir efisiensi anggaran	https://portal-repo.kkp.go.id/s/Da dukrekomLKJSetdit PRL25
2	Peningkatan jumlah SDM untuk mendukung pelaksanaan kegiatan	Telah terdapat penambahan pegawai pada Sekretariat Ditjen PRL	https://portal-repo.kkp.go.id/s/Da dukrekomLKJSetdit PRL25
3	Belum adanya SOP informasi pelayanan publik	Penetapan SOP informasi pelayanan publik	https://portal-repo.kkp.go.id/s/Da dukrekomLKJSetdit PRL25
4	Melakukan Analisis Beban Kerja untuk memetakan kembali kebutuhan pegawai di lingkup Setditjen PRL	Analisis Beban Kerja untuk memetakan kembali kebutuhan pegawai di lingkup Setditjen PRL	https://portal-repo.kkp.go.id/s/Da dukrekomLKJSetdit PRL25

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025 (Awal)



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAR www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Effin Martiana**

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Kartika Listriana**

Jabatan : Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Juni 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Sekretaris Direktorat Jenderal
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Effin Martiana

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut	1.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL (Nilai)	66
		2.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Setditjen PRL (Nilai)	66
		3.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NPKA) DJPRL (Nilai)	81,5
		4.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai)	89
		5.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja DJPRL (%)	80
		6.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen PRL (%)	80
		7.	Nilai maturitas struktur dan proses SPIP DJPRL (Nilai)	3,5
		8.	Laporan SPIP Setditjen PRL yang disusun (Dokumen)	2
		9.	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPRL (%)	<0,5
		10.	Indeks profesionalitas ASN DJPRL (Indeks)	80
		11.	Indeks profesionalitas ASN Setditjen PRL (Indeks)	80
		12.	Persentase pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi yang diselesaikan sesuai ketentuan (%)	100
		13.	Tingkat kepatuhan pengelolaan data DJPRL (%)	91
		14.	Persentase Dokumen Pengelolaan Data Penataan Ruang Laut yang Dihasilkan (%)	100
		15.	Persentase Dokumen Kerja Sama yang Disepakati (%)	90

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		16.	Persentase Pemenuhan Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri yang Disusun (%)	90
		17.	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik (%)	100
		18.	Nilai keterbukaan informasi publik DJPRL (Nilai)	91
		19.	Persentase Penyelesaian Instrumen Hukum Penataan Ruang Laut (%)	100
		20.	Nilai pengawasan kearsipan internal DJPRL (Nilai)	70
		21.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP DJPRL (%)	76

Data Anggaran:

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	4.534.770.000
Total Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025		4.534.770.000

Keterangan:

1. Blokir anggaran sebesar Rp470.927.000 sehingga Pagu Efektif Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025 sebesar Rp4.063.843.000;
2. Nomenklatur Kegiatan menyesuaikan dengan Organisasi baru.

Jakarta, 2 Juni 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Sekretaris Direktorat Jenderal
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Effin Martiana

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025 (Revisi)



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAM www.kkp.go.id SUREL sespridirenpri@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Effin Martiana**
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Kartika Listriana**
Jabatan : Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Sekretaris Direktorat Jenderal
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Effin Martiana

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut	1.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL (Nilai)	66
		2.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Setditjen PRL (Nilai)	66
		3.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DJPRL (Nilai)	81,5
		4.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai)	89
		5.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja DJPRL (%)	80
		6.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen PRL (%)	80
		7.	Nilai maturitas struktur dan proses SPIP DJPRL (Nilai)	3,5
		8.	Laporan SPIP Setditjen PRL yang disusun (Dokumen)	2
		9.	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPRL (%)	<0,5
		10.	Indeks profesionalitas ASN DJPRL (Indeks)	80
		11.	Indeks profesionalitas ASN Setditjen PRL (Indeks)	80
		12.	Persentase pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi yang diselesaikan sesuai ketentuan (%)	100
		13.	Tingkat kepatuhan pengelolaan data DJPRL (%)	91
		14.	Persentase Dokumen Pengelolaan Data Penataan Ruang Laut yang Dihasilkan (%)	100
		15.	Persentase Dokumen Kerja Sama yang Disepakati (%)	90

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		16.	Persentase Pemenuhan Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri yang Disusun (%)	90
		17.	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik (%)	100
		18.	Nilai keterbukaan informasi publik DJPRL (Nilai)	91
		19.	Persentase Penyelesaian Instrumen Hukum Penataan Ruang Laut (%)	100
		20.	Nilai pengawasan kearsipan internal DJPRL (Nilai)	70
		21.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP DJPRL (%)	76

Data Anggaran:

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	4.901.680.000
Total Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025		4.901.680.000

Keterangan:

1. Blokir anggaran sebesar Rp72.610.000 sehingga Pagu Efektif Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025 sebesar Rp4.829.070.000;
2. Nomenklatur Kegiatan menyesuaikan dengan Organisasi baru.

Jakarta, 2 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Sekretaris Direktorat Jenderal
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Effin Martiana

Lampiran 3. Daftar Kertas Posisi Tahun 2025

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	<i>The 10th Our Ocean Conference (OOC-10)</i> di Busan, Korea Selatan	28 - 30 April 2025	Dalam pertemuan ini Indonesia menyampaikan komitmen baru: a. Penambahan MPA baru seluas 200.000 ha. b. peningkatan efektivitas pengelolaan MPA eksisting seluas 19.3 juta ha 5% lebih tinggi di tahun 2025 dibandingkan tahun 2024. c. membangun Ocean Monitoring System (OMS) di 11 provinsi dan 15 MPA. d. menyelesaikan dokumen perencanaan zonasi, reviu dan melegalkan rencana zonasi (Inter-Regional MSP, National Strategic Areas MSP, Particular National Strategic Areas MSP)
2	<i>The 5th APEC Ocean-Related Ministerial Meeting (AOMM-5)</i> di Busan, Korea Selatan	30 April - 1 Mei 2025	Ditjen Penataan Ruang Laut memberikan masukan pada agenda: Statements by Economies, Ocean Resilience, Sustainable Fisheries and Aquaculture, dan Economic Development.
3	<i>The 3rd UN Ocean Conference (UNOC-3)</i> di Nice, Prancis	9 - 13 Juni 2025	Indonesia melalui Dirjen PRL menyampaikan instrumen ratifikasi persetujuan BBNJ kepada UN, dan melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa negara di sela-sela UNOC-3.
4	<i>The Second G20 Environment and Climate Sustainability Working Group (ECSWG)</i> di Skukuza, Afrika Selatan	14 - 18 Juli 2025	Dalam pertemuan ini DJPRL menyampaikan intervensi pada <i>technical paper</i> : - <i>Advancing Marine Spatial Planning (MSP) for a Sustainable Blue Economy: G20 perspectives on policy and practice of biodiversity-inclusive MSP</i> - <i>Current impact of and mitigation measures for Abandoned, Lost or otherwise Discarded Fishing Gear (ALDFG) in the marine environment</i>
5	<i>The Second Part of The Fifth Session of The Intergovernmental</i>	5 – 14 Agustus 2025	Ditjen Penataan Ruang Laut memberikan masukan pada agenda article 8 tentang Waste Management diantaranya adalah terkait pencegahan dan pengurangan

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
	<i>Negotiation Committee to Develop an International Legally Binding Instrument on Plastic Pollution, including in the Marine Environment</i> di Jenewa, Switzerland		ALDFG dan juga integrasi tata ruang darat dan laut salah satunya dalam hal relokasi tempat pembuangan akhir (TPA) yang berada di dekat sungai untuk mengurangi pencemaran sampah di perairan darat dan laut.
6	<i>Asean Digital Economy Framework</i> di Hanoi, Vietnam	4 - 8 Agustus 2025	Ditjen Penataan Ruang Laut memberikan intervensi pada materi <i>submarine cable system</i> .
7	<i>Second Session of Preparatory Committee BBNJ</i> di New York, Amerika Serikat	18 – 25 Agustus 2025	Ditjen Penataan Ruang Laut bersama delegasi RI dari KKP dan K/L lainnya memberikan intervensi dan menyampaikan posisi Nasional pada beberapa dokumen yang disampaikan oleh <i>co-chair</i> terkait persiapan BBNJ.
8	<i>The Second Consultative Meeting of the ATSEA Regional Coordination Committee (RCC) virtual meeting</i>	21 Agustus 2025	Indonesia menyampaikan posisi Nasional pada agenda pembahasan diantaranya <i>organizational matter, ATSEA RGM arrangement, ALDFG Regional Action Plan, GEF Median Size Project</i> dan <i>strategic development partner</i>
9	<i>Knowledge Exchange Program “Marine Spatial Planning Offshore Wind Development and Permitting”</i> di Denmark	25 – 28 Agustus 2025	Ditjen Penataan Ruang Laut melakukan pertemuan bilateral dengan Pemerintah Denmark untuk menindak-lanjuti peluang kerja sama terkait pengembangan <i>Offshore Wind</i> dari aspek MSP
10	<i>Threatened Species Technical Working Group back to back with the Bissmarck Solomon-Seas Seascape (BSS) Dialogue</i> di Solomon Island	22 - 26 September 2025	Ditjen Penataan Ruang Laut bersama Delegasi Indonesia lainnya menyampaikan update capaian RPOA/NPOA dan juga praktik baik terkait <i>Threatened Species</i> dan <i>Bissmarck Solomon-Seas Seascape</i>
11	<i>Women Leaders Forum Regional Exchange for Coral Reefs Fisheries and Food Security</i> di Solomon Island	22 - 26 September 2025	Ditjen Penataan Ruang Laut bersama Delegasi Indonesia lainnya menyampaikan update capaian RPOA/NPOA dan juga praktik baik terkait peran perempuan di Indonesia pada <i>Coral Reefs Fisheries and Food Security</i>

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
12	<i>Business Forum and World Osaka Expo</i> di Osaka, Jepang	25 – 26 September 2025	Ditjen Penataan Ruang Laut bersama PT Danareksa menghadiri <i>World Osaka Expo</i> salah satunya adalah untuk mencari peluang kerja sama bilateral dengan pemerintah dan perusahaan Jepang khususnya di bidang investasi dan pengelolaan <i>blue carbon</i>
13	<i>The 48th Meeting of The SEAFDEC Program Committee</i> di Malaysia	3 – 5 November 2025	Ditjen PRL memberikan masukan pada agenda Regional Collaborative Research and Capacity Building for Monitoring and Reduction of Marine Debris from Fisheries in Southeast Asia (SEC)
14	The 28th Meeting Fisheries Consultative Group of the Asean - SEAFDEC Strategic Partnership (FCG/ASSP) di Malaysia	6 – 7 November 2025	Ditjen PRL memberikan intervensi pada agenda Ecosystem and Biodiversity Protection Policies and Sustainable of Fisheries (SEC) dan menyampaikan informasi terkait implementasi BBNJ di Indonesia.
15	The Second Annual Meeting of the ATSEA Regional Coordination Committee (RCC) di Jakarta, Indonesia	3 - 4 Desember 2025	KKP memberikan masukan terkait RGM ATSEA untuk integrasi secara institusional dengan CTI-CFF dan mengusulkan untuk disampaikan kepada negara anggota CTI-CFF di pertemuan SOM-20.
16	Pre-Senior Official Meeting CTI CFF di Bali, Indonesia	8 - 9 Desember 2025	KKP mewakili Indonesia aktif memberikan masukan pada setiap agenda di Pre-SOM CTI-CFF dan menyampaikan laporan capaian dari masing-masing working group.
17	The 20th Senior Official Meeting CTI CFF di Bali, Indonesia	10 - 11 Desember 2025	Menyepakati dan menyetujui hasil diskusi bersama negara anggota di agenda Pre-SOM CTI-CFF